

I.B. 11

SEJARAH

Perlawanan Terhadap
Imperialisme dan
Kolonialisme di
JAWA TIMUR

SEJARAH
Perlawanan Terhadap
Imperialisme dan
Kolonialisme

Direktorat
Kebudayaan

SEJARAH
Perlawanan Terhadap
Imperialisme dan
Kolonialisme

4/1983

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

Perla
Imperi
nialis

959.828

HER

S

MILIK DEP. P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH JAWA TIMUR

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

TIM PENULIS :

1. Drs. Heru Sukardi
2. Drs. Soetjipto
3. Drs. Suwarno
4. Drs. Bambang S.S.

959.826

SEJ



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 574/1982
Tanggal terima : 10-4-83
Tanggal catat :
Beli/hadiah dari : Proyek IDEN
Nomor buku : 759.82502 Sej
Kopi ke : 3

Penyunting :

- 1. Sutrisno Kutoyo**
- 2. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja**

Gambar Kulit

Oleh :

Hafid Alibasyah

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1982

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prot. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi berbagai perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1982

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saat ini Tim Penyusun Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Jawa Timur dapat menyelesaikan tugasnya.

Tugas tersebut berlandaskan kepada perjanjian kerjasama antara Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Pusat dengan Tim Penyusun di daerah Jawa Timur.

Tim Penyusun di daerah menyadari bahwa meskipun tugas tersebut telah dapat diselesaikan namun pasti masih terdapat kekurangan, sehingga masih diperlukan koreksi yang positif.

Lebih lanjut kami ingin menyampaikan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Bapak Rektor IKIP Negeri Surabaya.
3. Bapak Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur.
4. Bapak Dekan FKIS — IKIP Negeri Surabaya yang semuanya telah memberi dorongan dalam penyelesaian tugas ini.

Selain itu kepada segala pihak yang tidak dapat kami sebutkan semuanya yang telah memberi bantuannya tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah kiranya untuk dimaklumi adanya.

Surabaya, Desember 1982

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. TUJUAN PENELITIAN	1
B. MASALAH	2
C. PERTANGGUNGJAWABAN PENU- LISAN	4
 BAB II LATAR BELAKANG PERLAWANAN	
A. PERIODE VOC	7
B. PERIODE HINDIA BELANDA	14
C. PERIODE PENDUDUKAN TENTARA JEPANG	34
 BAB III WUJUD PERLAWANAN	
A. PERLAWANAN TRUNAJAYA	39
1. Latar Belakang	39
2. Proses Perlawanan	44
3. Akibat Perlawanan	53
B. PERLAWANAN UNTUNG SURAPATI .	
1. Latar Belakang	54
2. Proses Perlawanan	56
3. Akibat Perlawanan	61

C. GERAKAN SOSIAL	69
1. Gerakan melawan Pemerasan	69
2. Gerakan Ratu Adil	79
3. Gerakan Sekte Agama	91
D. SARIKAT ISLAM	96
1. Latar Belakang	96
2. Proses Perlawanan	99
3. Akibat Perlawanan	114
E. INDONESISCHE STUDIE CLUB	116
1. Latar Belakang	116
2. Proses Perlawanan	117
3. Akibat Perlawanan	122
4. Hubungan dengan daerah Lain	122
F. PEMBERONTAKAN PETA DI BLITAR	123
1. Latar Belakang	123
2. Proses Perlawanan	140
3. Akibat Perlawanan	167
4. Hubungan dengan daerah Lain	170
 BAB IV AKIBAT PERLAWANAN	 172
 BAB V HUBUNGAN PERLAWANAN DENGAN DAERAH LAIN	 181
A. PERLAWANAN TRUNAJAYA	181
B. PERLAWANAN UNTUNG SURAPATI	182
C. GERAKAN SOSIAL	183
D. SARIKAT ISLAM	184

	Halaman
E. INDONESISCHE STUDIE CLUB	186
F. PEMBERONTAKAN PETA DI BLITAR	187
 BAB VI PENUTUP	 189
 DAFTAR CATATAN	 193
 DAFTAR SUMBER	 209

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Keterangan MPR. RI. Nomor : IV/MPR/71, Departemen Penerangan Republik Indonesia, halaman 62, antara lain telah menunjukkan adanya peningkatan usaha pembinaan dan pemeliharaan Kebudayaan Nasional untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan nasional, termasuk menggali dan memupuk kebudayaan daerah sebagai unsur-unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada Kebudayaan Nasional.

Sejarah sebagai suatu bukti masa lampau yang memberi gambaran, tentang berbagai usaha yang dapat ditempuh suatu bangsa dan masyarakat dalam pertumbuhan serta perkembangan yang terikat kepada faktor ruang dan waktu. Maka dari itu sudah sewajarnya apabila buku "*Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, 1974/1975 - 1978/1979*", Buku ke III, Departemen Penerangan Republik Indonesia, halaman 201, dengan tegas menentukan bahwa aspek sejarah yang mencari asal-usul dan memperlihatkan proses perkembangan, serta aspek struktural mendapatkan perhatian yang utama. Dengan usahaini diharapkan akan bertambahnya pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaannya, yang akan lebih memantapkan strategi dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian jelaslah, bahwa Sejarah dapat memantapkan strategi dan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan kenyataan inilah, maka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dengan bantuan dari tim peneliti Daerah Jawa Timur mengadakan inventarisasi

dan dokumentasi kejadian-kejadian historis di Jawa Timur, dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan penulisan sejarah yang akan dilakukan di waktu-waktu mendatang yang sanhat berguna untuk memberikan kesadaran mengenai kesinambungan sejarah, dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa.

B. MASALAH

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memberitahukan kepada diri sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Sehari kemudian dasar kemerdekaan tersebut dirumuskan sebagai deklarasi kemerdekaan yang tersimpul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan deklarasi kemerdekaan itu bangsa Indonesia telah mengikatkan dirinya pada beberapa prinsip dan memberitahukan kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip itu. Ternyata prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu terdiri dari empat alinea yang merupakan suatu filsafat sosial yang telah masak dan sempurna, dan merupakan puncak pengalaman sejarah dan penderitaan sejarahumat manusia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya. Alinea pertama mengungkapkan pengakuan dan tekad bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di dunia harus dihapuskan. Sedangkan alinea kedua, berisi penghargaan dan pengakuan terhadap jasa-jasa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang telah mengantarkan dengan selamat dan sentosa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Demikianlah menurut kenyataannya, bahwa sejarah umat manusia penuh peristiwa-peristiwa yang merupa-

kan rangkaian usaha terus menerus dari golongan yang terjajah, secara jasmaniah dan rokhaniah untuk membebaskan dirinya, menuju tercapainya kemerdekaan dan kesempurnaan martabat manusia. ¹⁾

Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak, menghindarkan diri dari suatu keadaan yang celaka.

Seluruh riwayat dunia, menurut Herbert Spencer, adalah riwayat *reactief verzet van verdrukte elementen*. ²⁾

Begitu pula perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, dan perlawanan rakyat Indonesia untuk membela nilai-nilai luhur perikemanusiaan dan keadilan, telah berlangsung sejak bangsa Barat (Eropa) mengembangkan kekuasaannya di Nusantara. Namun demikian, pada pertengahan abad ke-18 pertahanan negara-negara lama di Nusantara terhadap serbuan imperialisme, sudah dapat dipatahkan oleh pihak lawan (bangsa Eropa). Bahkan pada pertengahan abad ke-19 kaum imperialis Barat, mulai menduduki dan menguasai daerah-daerah (di Indonesia) yang berada di luar wilayah negaranya sendiri. Sejak itu sistem imperialisme dengan tegas menjelma menjadi sistem kolonialisme (=imperialisme — kolonialisme). Sistem penguasaan bidang perekonomian di Indonesia telah ditingkatkan, menjadi penguasaan politik langsung terhadap wilayah-wilayah di Indonesia. Akibatnya, perjuangan pada tahap pertahanan terhadap imperialisme telah meningkat menjadi perlawanan terhadap kaum kolonialis. ³⁾

Dalam periode perlawanan tersebut, di medan sejarah daerah Jawa Timur ternyata telah muncul peristiwa-peristiwa sejarah yang ikut serta menentukan jalannya sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terhadap imperialisme kolonia-

lis bangsa asing. Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut telah ada yang diungkapkan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, namun penulisankhusus tentang sejarah pellawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Jawa Timur, belum pernah dilakukan. Mengingat betapa pentingnya andil Jawa Timur, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mencapai kemerdekaannya, maka sudah wajar, apabila penelitian yang berupa inventarisasi dan dokumentasi sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Jawa Timur dilakukan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN

Penyusunan naskah ini dilaksanakan oleh suatu tim kerja sama, antara pihak Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kependidikan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, dengan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan Sejarah IKIP Negeri Surabaya.

Dalam pembagian kerjanya, tiap anggota tim mendapat tugas untuk menyelesaikan laporan dari bab-bab tertentu, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Pedoman Penulisan Pimpinan Proyek. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian, antara lain berupa studi kepustakaan (*library research*), dokumentasi, observasi dan wawancara.

Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional kepada Tim, maka penelitian yang telah dilaksanakan ini masih bersifat eksploratif, yang menjurus ke arah *preliminary research*, yaitu suatu penelitian permulaan yang masih memerlukan pengembangan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, apabila ditinjau dari segi metodologi sejarah masih dalam tahap heuristik. Namun demikian, karena pihak Pimpinan Proyek

menghendaki agar supaya naskah laporan berbentuk kisah sejarah, maka data sejarah yang ada secara deskriptif disusun dalam bentuk kisah sejarah.

Selain itu perlu dilaporkan, karena terbatasnya biaya dan waktu yang dapat dipergunakan dalam penelitian, karena para anggota tim peneliti, ternyata sangat terikat dengan tugas-tugas kedinasan di mana mereka bekerja. Maka penyusunan naskah ini, lebih menitik-beratkan pada penggunaan metode pengumpulan data perpustakaan.

B A B II

LATAR BELAKANG PERLAWANAN

A. PERIODE VOC

Sesudah kerajaan Majapahit runtuh, pusat kekuasaan yang baru beralih ke Jawa Tengah (Demak). Walaupun demikian, hal itu bukan berarti bahwa Daerah Jawa Timur sama sekali tenggelam dalam sejarah. Pada saat itulah proses Islamisasi masyarakat Jawa Timur dari pusat-pusat pondok pesantren (Surabaya, Gresik, Tuban, dan lain-lain) makin meluas. Bahkan menurut berita dari Tome Pirees, pada waktu itu di Jawa Timur masih ada kerajaan-kerajaan kecil, seperti Pasuruan, Panarukan dengan pusat kerajaan Balambangan, yang belum masuk Islam.

Karena ancaman dari kekuasaan Islam, maka Balambangan mencari bantuan kekuatan dari luar, yaitu Portugis, yang dapat menguntungkan pada kedua belah pihak. Portugis yang berkedudukan di Malaka (Malaysia) sejak 1511, dengan demikian mendapatkan barang produksi Balambangan yang sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhannya, atau mencukupi barang dagangannya. Sebaliknya Raja Balambangan mengundang pendeta-pendeta Kristen ke negerinya, bukanlah karena ia tertarik dan menginginkan perubahan agama, tetapi karena adanya misionaris tersebut dapat pula mendatangkan tentara Portugis serta persenjataannya. Kerajaan Balambangan itu ada mempertahankan kekuasaannya, sampai pada masa serangan Sultan Agung dan Amangkurat dari Mataram, pada abad ke-17.¹⁾

Sementara itu di Jawa Tengah, terjadi perubahan kekuasaan dan perpindahan pusat kerajaan. Kerajaan Demak runtuh dan Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir) berhasil men-

dirikan kerajaan Pajang (di daerah Boyolali; 1568). Setelah kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri, ia segera mendapat pengakuan dari adipati-adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur.²⁾

Namun demikian kerajaan Pajang hanya berumur delapan tahun, karena pada tahun 1586 kerajaan tersebut jatuh, sebab diserang oleh Sutawijaya (Senopati), bupati Mataram. Sejak itu berdirilah kerajaan Mataram, yang dalam jaman pemerintahan Sultan Agung (raja ke-2 ; 1613–1645) telah berhasil mempersatukan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (termasuk Madura), kecuali daerah Balambangan.³⁾

Dengan memperhatikan proses penguasaan Mataram terhadap daerah Jawa Timur, dengan jalan penaklukan-penaklukan, dapatlah dikirakan bahwa penduduk Jawa Timur pada waktu itu, walaupun cinta pada perdamaian namun lebih cinta terhadap kemerdekaannya.

Sementara itu di Mataram terjadi suatu perubahan situasi. Amangkurat I (1645–1677), pengganti Sultan Agung, menjalankan pemerintahan secara mutlak, dan pada tahun 1646 mengadakan perdamaian dengan Belanda (V O C), yang memungkinkan V O C mendirikan loji di Jepara (bandar Mataram; 1651).

Kekuasaan mutlak Amangkurat I menyebabkan adanya tindakan kekejaman dan tekanan terhadap rakyat, sehingga menimbulkan perasaan kecewa di kalangan bangsawan dan rakyat. Timbullah persekutuan Trunajaya (putera Demang Melayu dari Arisbaya–Madura) dengan Raden Kajoran (Panembahan Rama dari Kajoran Klaten dan mertua Trunajaya) dan Pangeran Adipati Anom (Putera Mahkota Mataram), untuk menggulingkan kekuasaan mutlak Amangkurat I. Pecahlah perlawanan Trunajaya terhadap Amang-

kurat I, raja Mataram yang mungkin dipandang kurang berbuat adil dalam pemerintahannya (1675–1679). Dalam melakukan perlawanan tersebut, Trunajaya mendapat bantuan dari tokoh Raden Kajoran dan Kraeng Galengsung (pemimpin orang Makasar).⁴⁾

Untuk menghadapi serangan Trunajaya – Raden Kajoran – Kraeng Galengsung itu, fihak Mataram (Amangkurat I) meminta bantuan Kompeni (VOC), dengan menandatangani Perjanjian Jepara (25 Maret 1677), yang isinya antara lain, bahwa sebagai pengganti biaya perang pihak Kompeni tiap tahun diberi hak menarik penghasilan di semua bandar pantai, antara Karawang sampai Ujung Jawa Timur.⁵⁾

Hal itu berarti, bahwa pihak Kompeni Belanda mendapat kesempatan untuk melancarkan sistim imperialismenya ke daerah Jawa Timur. Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila pihak Kompeni Belanda segera menyerang benteng Trunajaya di Surabaya, dan menduduki kota tersebut pada tanggal 13 Maret 1677.⁶⁾

Kesempatan Kompeni Belanda makin terbuka, ketika Amangkurat II, pengganti Amangkurat I, menandatangani kontrak perjanjian dengan Kompeni (VOC), yang antara lain berisi, bahwa Kompeni memasukkan daerah antara Ujung Jawa Timur dan Karawang di bawah pengawasannya dan Kompeni memegang monopoli impor cita serta candu di Jawa.⁷⁾

Karena perjanjian itu sangat menguntungkan (pihak Kompeni), maka Kompeni segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang benteng-benteng Trunajaya. Dengan demikian perlawanan Trunajaya berhadapan langsung dengan Kompeni Belanda yang sedang mengembangkan sistim imperialisme kolonialisnya di Jawa Timur. Oleh karena

kalah kuat dalam bidang persenjataannya, maka perlawanan Trunajaya pada tahun 1679 dapat dipadamkan.⁸⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, di Matara terjadi suatu peristiwa pengambil-alihan kekuasaan oleh Pangeran Puger yang dibantu oleh Kompeni Belanda terhadap Amangkurat III (Sunan Mas), pengganti Amangkurat II. Sebagai balas jasa atas bantuannya Pangeran Puger menyerahkan Madura bagian timur kepada Kompeni Belanda (VOC).⁹⁾

Sedangkan Amangkurat III (= Sunan Mas) terpaksa meninggalkan Mataram, dan menggabungkan diri dengan pasukan Untung Surapati, yang telah menyusun kekuatan untuk menentang imperialisme Belanda di daerah Pasuruan (Jawa Timur). Oleh karena Kompeni mengetahui, bahwa gerakan anti Belanda yang dipimpin Untung Surapati itu makin lama makin kuat, maka pada tahun 1706 mulai diadakan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan Untung Surapati. Pada tahun 1706 itu juga Untung Surapati pasti gugur, setahun kemudian pasuruan diduduki Kompeni dan dalam waktu yang singkat Kompeni mendirikan tiga buah benteng di Pasuruan. Sedangkan putera-putera Suropati tiga buah bentang di Pasuruan. Sedangkan putera-putera Surapati dan Sunan Mas, tidak mau menyerah, tetapi mengundurkan diri ke tempat pengunduran diri (*terugval basis*) alamiah ke pegunungan di sekitar Malang untuk melanjutkan perjuangannya.

Demikianlah akibat dari Perang Trunajaya, pihak Kompeni Belanda (VOC) mempunyai hak untuk menarik (pajak) penghaishan bandar-bandar di Jawa Timur (1677). Sedangkan Perang Untung Surapati dan perebutan kekuasaan di ibukota Mataram membawa akibat VOC (Belanda) secara formal memiliki Madura Timur, dan memegang monopoli perdagangan di Mataram (termasuk di Jawa Timur). Untuk melaksanakan

hak-haknya dan dalam rangka mengembangkan imperialisme kolonialisnya, VOC mendirikan loji-loji atau benteng-benteng di Bandar-bandar yang dianggap penting di Jawa Timur (Surabaya dan Pasuruan). Sedangkan rakyat Jawa Timur harus membayar bea cukai pelabuhan kepada VOC. Di samping itu kalau pada mulanya rakyat Jawa bebas mengadakan perdagangan, maka dengan adanya hak monopoli perdagangan oleh VIC, kebebasan tersebut dinilai mulai dibatasi. Maka dari itu tidaklah mengherankan, apabila di Jawa Timur kemudian timbul perasaan tidak puas, yang kemudian menjelma dalam gerakan anti kekuasaan Belanda.

Gerakan anti Belanda itu, semula dipimpin oleh Adipati Surabaya (Jayengrana) yang selalu berusaha mengadakan perlawanan terhadap Belanda, oleh karena gerakan Jayengrana itu dianggap makin berbahaya, maka dengan segala tipu muslihat pihak VOC telah berhasil membunuhnya, ketika berada di ibu kota Mataram. Setelah itu kabupaten Surabaya dibagi-bagikan kepada tiga orang saudara Jayengrana, yaitu: Arya Jayapuspita sebagai Bupati Kasepuhan di Surakarta, Wirareja sebagai Bupati Anom di Surabaya, dan seorang laki-laki yang menguasai di Lamongan.¹⁰⁾

Dengan demikian Kompeni Belanda mulai menjalankan politik *divide et impera* di Jawa Timur. Meskipun demikian ketiga saudara Jayengrana tersebut tetap menyusun gerakan anti Belanda dengan menggabungkan diri kepada putera ketiga saudara Jayengrana tersebut tetap menyusun gerakan anti Belanda dengan menggabungkan diri kepada putera-putera Surapati, yang masih mempertahankan diri di Balambangan atau pun di daerah Tengger.¹¹⁾

Demikianlah, pada tahun 1714, para bupati Surabaya dan Sampang (Cakraningrat III) bersama-sama dengan putera-putera Untung Surapati melancarkan pemberontakan umum

yang meliputi pesisir utara Jawa Timur. Untuk mengatasi perlawanan itu pihak Belanda bertempur mati-matian, karena perang ini menentukan hidup atau matinya (*to be or not to be*), bagi nasib imperialismenya di Jawa Timur pada khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. Hanya dengan susah payah dan korban yang tidak sedikit, Belanda dapat mematahkan perlawanan tersebut.

Meskipun demikian, pada waktu itu Banyuwangi masih tetap merupakan bandar merdeka. Banyuwangi merupakan pusat perniagaan merdeka, setelah Makasar, Banten dan bandar-bandar di pesisir lainnya mati perdagangannya. Kapal dagang Inggris tidak segan-segan datang ke situ untuk menukarkan senjata dan kain katun dengan hasil bumi Banyuwangi atau Balambangan. Itulah sebabnya pihak Kompeni Belanda berusaha mati-matian untuk menjatuhkan Banyuwangi di bawah kekuasaannya. Akhirnya pada tahun 1766, meskipun penduduk Banyuwangi dengan segala kekuatannya berusaha mempertahankan kotanya, namun karena kekuatan tidak seimbang Banyuwangi dapat diduduki Kompeni Belanda. Muncullah benteng dan loji-loji Kompeni Belanda di Banyuwangi di tempat yang dinamakan Banyualit.¹²⁾ Lima puluh orang setiap hari harus masuk kerja untuk Kompeni dan menyerahkan setiap hari, lembu dan sapi kepada pasukan pendudukan (Kompeni).¹³⁾

Dengan demikian kemerdekaan rakyat Banyuwangi telah hilang, sedangkan Kompeni Belanda telah mengembangkan imperialisme kolonialismenya di Ujung Timur Pulau Jawa. Gubernur Belanda di Semarang berkuasa atas negeri-negeri Pesisir Timur, dan dapat menjatuhkan hukuman mati, menurunkan raja dari tahta, serta dapat mengangkat bupati Pesisir Timur.¹⁴⁾

Meskipun demikian, semangat anti penjajah Belanda

dari para pejuang rakyat Jawa Timur tidak dapat dipadamkan. Jawa Timur dapat diumpamakan sebagai pangkalan pemberontakan di Jawa dan Indonesia Timur. Keinsyafan dan keyakinan rakyat Jawa Timur akan kemerdekaannya sangat mendalam, sehingga tiap rumah dapat menjadi kubu pertahanan jiwa merdeka.¹⁵⁾ Lumajang, Malang, dan Ngantang merupakan benteng pertahanan yang penghabisan dari para pejuang di Jawa Timur. Hanya dengan persiapan yang matang, dan atas bantuan tentara dari Mataram serta pasukan para bupati pesisir Jawa Timur yang memihak Belanda, benteng para pejuang anti penjajah Belanda di Jawa Timur, satu persatu jatuh ke tangan Kompeni Belanda.

Dalam rangka menaklukkan kota Malang dan Ngantang, pihak Kompeni Belanda mendapat perlawanan yang gigih dari pasukan Malayakusuma (Bupati Malang), Pangeran Singasari (Pangeran Prabu) dari Lopura, Pangeran Mas dari Ngantang dan pasukan keturunan Untung Surapati. Namun demikian oleh karena kalah kuat, baik persenjataannya, maupun jumlah pasukannya, maka perlawanan mereka dapat dipatahkan satu per satu.¹⁶⁾

Sejak tahun 1767 di daerah Malang tidak lagi ada perlawanan yang berarti terhadap Kompeni Belanda. Pada tahun 1767 itu juga Kompeni mengambil-alih pemerintahan Malang dari tangan Sunan (Mataram), bahkan lambat laun daerah Malang dimasukkan dalam daerah milik Belanda (*rechstreeksbestuur gebied*) sebagai kabupaten dalam karesidenan Pasuruan (1771). Untuk menjaga jangan sampai ada huru-hara anti Belanda lagi, maka pada tahun 1767 itu juga Belanda menempatkan tentara di Malang. Mula-mula hanya terdiri dari 14 orang, kemudian menjadi sebuah garnisun yang mendirikan sebuah benteng di Claket (tempat Rumah Sakit sekarang). Di situlah kemudian muncul untuk pertama kalinya masyarakat dan pemerintahan Belanda di Malang.¹⁷⁾

Berlakulah semacam sistem pajak atau upeti yang disebut *Contingenten en Verplichte Leverantien*. *Contingenten* semacam pajak yang berlaku di daerah yang langsung (*direct*) dikuasai oleh Belanda, sedangkan *Verplichte Leverantien* hanya berlaku di daerah yang secara tidak langsung (*indirect*) di bawah kekuasaan Belanda. Keduanya merupakan penyerahan wajib, melalui bupati atau raja kepada Belanda, berupa hasil bumi yang lebih dahulu telah ditetapkan jumlah, jenis dan harganya. *Contingenten* tidak mendapat imbalan pembayaran terhadap penyerahan wajib tersebut, karena dianggap pajak *in natura*, tetapi *Verplichte Leverantien* mendapat imbalan pembayaran, karena dianggap semacam kontrak perdagangan antara Raja dan Pemerintah Belanda. Ketika kopi menjadi semakin terkenal, permintaan dan keuntungan makin meningkat, maka kopi dijadikan obyek *Contingenten en Verplichte Leverantien*. Akibatnya pada tahun 1800, untuk pertama kalinya muncullah tanaman kopi di daerah sekitar Malang (Batu, Dinoyo, dan mungkin Ngantang).¹⁸⁾

B. PERIODE HINDIA BELANDA

Perkembangan selanjutnya menunjukkan, bahwa pada tahun 1800 kongsi dagang Hindia Timur (VOC) dibubarkan. Kemudian diganti oleh pemerintahan *Republiek Bataaf*, yang selanjutnya menjadi *Koninkrijk Holand* (1806). Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia adalah H.W. Daendels, dengan mengemban tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk pertahanan Pulau Jawa, H.W. Daendels membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, membuat pangkalan Angkatan Laut di Surabaya, dan mendirikan pabrik senjata di Gresik. Salah satu usaha H.W. Daendels untuk menambah biaya pertahanan Jawa, ialah menjual tanah kepada pihak partikular,

sehingga daerah Panarukan dan Probolinggo dibeli orang Cina bernama Han Tie Ko. Tetapi ketika Rafles berkuasa di Indonesia (1811–1816), ia terpaksa membeli kembali tanah partikelir di Panarukan dan Probolinggo, oleh karena adanya kerusuhan rakyat di daerah tersebut akibat adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pemilik tanah partikelir tersebut.¹⁹⁾

Akibat Konvensi London (1814) Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda (1816). Indonesia dijajah kembali oleh Belanda dengan bentuk pemerintahan baru, yang terkenal dengan sebutan *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda (1816–1942). Pada waktu itu Pulau Jawa mulai dibagi atas 20 karesidenan, dan muncullah enam karesidenan di Jawa Timur, yaitu Karesidenan Surabaya, Pasuruan, Besuki, Banyuwangi, Madura-Sumenep, dan Gresik.²⁰⁾

Sebagai akibat Perang Diponegoro (1825–1830) dan oleh karena kas negeri induk (Nederland) kosong akibat peperangan, maka muncullah di Indonesia peraturan *Cultuur stelsel* atau Tanam paksa, yang merupakan pemerasan yang benar-benar sistematis terhadap bangsa Indonesia (1830). Sistem tanam paksa tersebut memaksa para petani untuk menyerahkan hasil tanaman wajib yang berorientasi kepada bahan dagangan yang laku di pasar luar negeri. Tanaman wajib itu antara lain berupa : tebu, kopi, tembakau, nila, kapas dan kayu manis.

Hasil-hasil tanaman wajib itu harus dikumpulkan dan ditimbun di salah satu pelabuhan, yang kemudian diekspor. Di Jawa Timur kota pelabuhan yang dimaksud, ialah Pasuruan dan Surabaya. Akibat dari kebutuhan sarana dan komunikasi tersebut, maka jalan raya mulai dibangun dan muncul pula pabrik yang didirikan oleh orang partikelir (Cina).²¹⁾

Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan sistem perkebunan negara kolonial, untuk menjadikan Pulau Jawa suatu koloni yang menguntungkan Belanda. Sedangkan bagi rakyat Jawa Timur (Indonesia) Tanam Paksa merupakan suatu sistem yang membawa kesengsaraan dan kemelaratan. Para petani tidak hanya diwajibkan menanam tanaman tertentu, tetapi juga diwajibkan kerja rodi (bekerja tanpa dibayar) sebagai pengganti pajak tanah. Pemerintah kolonial telah menentukan bahwa pajak tanah harus dibayar dengan kerja bakti di perkebunan-perkebunan. Sedang pemungutan kerja bakti/kerja paksa itu melalui sistem jatah (*quota*) dan per desa, tidak menurut perorangan.

Hal itu mengakibatkan desa-desa memaksa para tuan tanah yang tinggal di tanahnya untuk membagi-bagikan tanah itu kepada golongan petani miskin yang tidak memiliki tanah. Di Madiun proses perkembangan tersebut mengakibatkan semua tanah milik pribadi, yang dikenal dengan istilah tanah pusaka, dijadikan milik desa atau komunal. Dengan sistem tanah komunal desa dapat dengan cara yang lebih mudah menentukan jatah kerja sesuai dengan kebutuhan perkebunan. Makin berkembangnya perkebunan negara, makin banyak tenaga kerja yang diperlukan, dengan akibat bahwa para petani makin lama makin menerima bagian tanah yang makin kecil juga, karena setiap pekerja harus diberi tanah untuk mensahkan kedudukannya sebagai pembayar pajak tanah.

Demikianlah sekitar tahun 1850 kira-kira 65% dari seluruh penduduk petani Madiun terdaftar sebagai pekerja paksa di perkebunan. Angka itu akan lebih tinggi lagi, apabila diingat adanya keperluan akan kerja paksa untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan raya, jembatan, irigasi, dan sebagainya, yang tentunya sarana tersebut harus diperbaiki untuk keperluan ekonomi modern.²²⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa yang diletakkan di atas punggung rakyat oleh sistem Tanam Paksa itu sangat berat. Karena itu pula membawa akibat banyak kematian dan kemelaratan. Akibatnya pada tahun 1833 rakyat Jawa Timur mengadakan perlawanan dan huru-hara di perkebunan tebu di Pasuruan.²³⁾ Ternyata perlawanan terhadap sistem Tanam Paksa tidak hanya datang dari kalangan rakyat Indonesia, tetapi juga dari kaum humanis Belanda, kaum literalis dan kaum kapitalis Belanda. Dengan bantuan kaum liberalis, kaum kapitalis Belanda berjuang untuk menghapuskan sistem tanam paksa di Indonesia dengan tujuan untuk menyulurkan modalnya yang telah mencapai kejenuhan di negeri Belanda. Akhirnya pada tahun 1870 perjuangan penghapusan sistem tanam paksa di Parlemen Belanda berhasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria 1870 kemudian disusul dengan keluarnya Surat Kepugusan Agraris (*Agrarische Besluit*) tahun 1870.

Kedua peraturan tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah (Belanda) untuk memberikan tanah-tanah di Indonesia kepada orang-orang partikular (kapitalis) dengan hak-hak yang beraneka ragam.²⁴⁾

Sehingga sejak tahun 1870 itu di Indonesia berlaku Politik Kolonial Liberal, yang kemudian disusul dengan Politik Pintu Terbuka (*Opendeur-politiek*), dan Indonesia kemudian terbuka bagi masuknya modal-modal asing (Belanda, Amerika, Inggris, Jepang, Belgia dan lain-lainnya).

Modal asing tersebut tertanam dalam sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti: karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah, minyak dan sebagainya. Sehingga bermunculanlah sebagian perkebunan-perkebunan dan industri-industri di Jawa Timur, yang membawa akibat makin meningkatnya hubungan antara kota Malang dan Surabaya.

Muncullah usaha pembuatan jalan kereta api Surabaya—Malang (1875) dan Kalisat — Banyuwangi (1901) dan muncullah pabrik-pabrik gula di sepanjang jalan kereta api itu. Industri gula tersebut ternyata mencapai puncak kemegahannya setelah tahun 1900, sehingga Pasuruan merupakan daerah tebu yang paling utama di seluruh Jawa. ²⁵⁾

Sebenarnya penanaman tebu pada jaman kolonial Belanda itu selamanya bersifat paksaan. Pada jaman tanam paksa, paksaan itu dilakukan secara terang-terangan, sedangkan pada jaman politik kolonial liberal paksaan itu dilakukan secara halus melalui pimpinan pangreh praja. Para pemilik pabrik gula (*suiker baronen* atau raja-raja gula) sangat besar pengaruh dan kekuasaannya terhadap pemerintah Belanda. Hal itu disebabkan oleh karena uang yang dibayarkannya sebagai pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara. Tanpa pajak dari industri gula dan perkebunan kopi, maka keuangan negara kacau. *Ondernemers bond-lah* (gabungan pengusaha-pengusaha Belanda) yang merajai Indonesia. ²⁶⁾ Maka dari itu bukan hanya lurah atau bupati, bahkan residen pun tunduk kepada *suiker-baronen* ini. Seorang asisten wedana (camat) yang berani menentang seorang administrateur pabrik pasti dipecat atau dipindahkan oleh pemerintah Belanda. Orang desa (petani) yang tidak mau menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu tidak akan diberi air irigasi. Mereka yang mau menyewakan tanahnya diberi sebegitu banyak uang muka, sehingga setelah uang sewanya habis, maka mereka terpaksa menyewakannya lagi untuk musim yang akan datang. ²⁷⁾

Demikianlah masalah sewa tanah sering menimbulkan penderitaan rakyat. Dalam proses produksi yang semakin maju itu, bangsa Indonesia tidak memegang peranan penting, kecuali menyewakan tanah dan tenaganya secara mu-

rah. Sebaliknya kekayaan Indonesia terus mengalir ke negeri Belanda sebagai hasil keuntungan dan bunga modal yang ditanamkan dalam perusahaan, perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Tidak ada pemakaian modal untuk mempertinggi taraf kehidupan serta perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. 28)

Kaum kapitalis yang menanamkan modalnya di bidang perdagangan, perkapalan dan industri di Nederland, dengan sendirinya menginginkan pula Indonesia sebagai daerah pemasaran hasil-hasil industrinya. Kondisi yang sangat diperlukan bagi pemasaran hasil-hasil industri tersebut ialah adanya daya beli yang kuat bagi penduduk pribumi. Daya beli pribumi menjadi kuat, apabila mereka mengenyam kemakmuran dan menerima upah yang lebih tinggi. Berdasarkan kepentingan itulah, maka sejak sekitar tahun 1805, mereka telah melancarkan propaganda agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pribumi diperhatikan.

Gerakan perbaikan nasib rakyat pribumi ini ternyata mendapat dukungan dari kaum agama, kaum sosialis dan kaum etis. Mereka memiliki persamaan ide yang dirumuskan dengan kata-kata: "adalah menjadi kewajiban moral bagi orang Belanda untuk mengangkat penduduk pribumi". Salah seorang juru bicara dari kaum etis yang terkemuka antara lain Mr. Conrad Th. van Deventer, yang terkenal dengan teori triloginya: irigasi, emigrasi, dan edukasi, untuk memajukan dan memperbaiki nasib rakyat pribumi. 29)

Perjuangan kaum kapitalis di Nederland, kaum agama, kaum sosialis, kaum humanis dan kaum etis tersebut ternyata tidak sia-sia. Terbukti pada tahun 1901 raja Belanda telah mengumumkan haluan politik kolonial baru yang kemudian terkenal dengan sebutan politik etis (*Ethische Politiek*),

yang menggunakan tiga sila sebagai semboyannya, yaitu: irigasi, emigrasi dan edukasi. ³⁰⁾

Sebagai ide "triloginya van Deventer" yang berdasarkan "kewajiban moral orang Belanda terhadap perbaikan nasib rakyat bumiputera" itu memang baik, akan tetapi dalam realisasinya pemerintah Hindia Belanda menerima ide tersebut untuk disesuaikan dengan kepentingan kaum kapitalis yang menanamkan modalnya di Indonesia (Hindia Belanda), yang beranggapan bahwa Indonesia adalah daerah untuk mengambil keuntungan (*wingewest*).

Pelaksanaan politik kolonial etis yang dibarengi dengan politik pintu terbuka di Jawa Timur menimbulkan proses perubahan sosial dan kemiskinan rakyat pedesaan (kaum tani). Meluasnya *estate* partikulier atau *onderneming* tebu yang membawa komersialisasi pertanian, pajak dan sewa tanah yang tak ter pikul dan mengakibatkan penciutan tanah pusaka, masuknya uang dalam ekonomi (desa) sederhana yang menambah jumlah kaum buruh tani, itu semua faktor yang menimbulkan penciutan daerah penghidupan dan pemiskinan kaum tani. Hal itu terjadi oleh karena adanya benturan dengan kebudayaan Barat yang datang di daerahnya (desanya), maka dari itu timbullah kebencian terhadap dominasi asing (*Xenophobia*).

Keadaan yang makin dirasakan memburuk menyebabkan rakyat pedesaan menolak tatanan yang ditimpakan kepada mereka dan mengharapkan tatanan baru yang sama sekali berlainan dan sesuai dengan alam pedesaan dan pikiran mereka. Kebencian terhadap tatanan dan kultur asing inilah, yang menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat untuk mengadakan gerakan protes massa tani. ³¹⁾

Gerakan protes kaum tani ini ada yang bersifat pasif dan lebih berorientasi kepada kerokhanian atau kebakaan

(*otherworldly orientation*), tetapi ada pula yang bersifat agresif, radikal, revolusioner yang berorientasi kepada keduniawian (*this worldly orientation*). Gerakan protes yang pertama tidak perlu menimbulkan konfrontasi terhadap penguasa; mereka cukup bertapa, mengasingkan diri dan menyerahkan segala sesuatunya kepada takdir (*predistination*) atau melakukan pemboikotan secara diam-diam (*lijdelijk verzet*), misalnya gerakan Samin di Blora. Sedangkan gerakan protes yang kedua berusaha menumbangkan yang sedang berkuasa untuk mempertahankan atau mengembalikan tata dan nilai tradisional (sektaris atau revivalistis).³²⁾

Dalam keadaan kegelisahan sosial semacam inilah massa tani menantikan kepemimpinan yang dapat mewujudkan aspirasinya. Berbicara soal kepemimpinan, dalam masyarakat pribumi pada jaman kolonial ada tiga kelompok sosial pribumi yang bersaing dalam memperebutkan pengaruh di antara penduduk Indonesia, yaitu kelompok aristokrat tradisional, kelompok Islam dan kelompok intelektual (intelligensia).³³⁾

Kelompok aristokrat tradisional adalah anggota keluarga besar raja yang lama kelamaan berkembang menjadi suatu dinasti yang dilembagakan. Suatu dinasti kekuasaan seperti itu dapat diintegrasikan sedemikian kuatnya dalam masyarakat setempat, sehingga akarnya menembus sampai ke seluruh jaringan lembaga sosial. Stratifikasi penduduk, sistem nilai dan norma serta peningkatan adat kebiasaannya diatur sedemikian rupa sehingga mereka selaras dan sesuai dengan posisi yang paling tepat untuk dinasti yang memerintah. Mereka bahkan menjadi standar sistem keyakinan kultural yang mekalmukan raja sebagai mata rantai yang mutlak di antara dunia manusia dan kekuatan-kekuatan kosmologis yang memerintah alam semesta. Sistem semacam itu telah

bertahan secara sosial dan kultural dalam menghadapi perubahan-perubahan besar di bidang politik atau di bidang lainnya. Bahkan dalam jaman pemerintahan Hindia Belanda sistem tersebut dipertahankan dalam suatu politik pemerintahan langsung, dan dikontrol olehnya agar supaya merekalah yang memerintah penduduk.

Oleh karena kelompok aristokrat tradisional ini di bawah kontrol yang ketat dari Pemerintah Hindia Belanda, maka sangat kecil kemungkinannya bagi rakyat tani untuk mendapatkan kepemimpinan dari golongan ini (yang dapat mencetuskan aspirasinya). Namun demikian di desa Patik (kawedanan Pulung, kabupaten Ponorogo) karesidenan Madiun, pernah terjadi pemberontakan tani yang menurut dugaan didalangi oleh dua orang priyayi (1885).³⁴⁾

Kelompok kedua meliputi para pemimpin agama Islam. Karena lebih dari 95% penduduk memeluk agama Islam, maka kader-kader Islam mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pendapat rakyat tani. Meskipun agama dunia itu ditimpakan begitu saja ke atas sistem kepercayaan pribumi yang ada, namun berkat proses saling mempengaruhi yang lama kedua unsur itu telah diintegrasikan secara terpadu, dan sekarang pun agama itu menjadi bagian integral dari kebudayaan setempat. Atas dasar inilah prestasi dan pengaruh para pemimpin agama terhadap penduduk telah dilembagakan. Proses pelembagaan itu terus menerus dimantapkan, antara lain lewat sosialisasi dalam keluarga, lewat jalan pendidikan dan pembinaan agama di langgar, madrasah, pondok dan pesantren. Betapa besar daya tarik pondok pesantren bagi rakyat, dapatlah dilihat jumlah murid pondok pesantren Tegalsari (kabupaten Ponorogo, Madiun) pada tahun 1877 telah mencapai 252 orang. Maka dari itu tidak mengherankan apabila pemerintah Belanda berusaha menghalangi per-

kembangan pondok pesantren dengan jalan membentuk *priesterraden* yang bertugas mengawasi pengajaran di pesantren-pesantren (1882) dan mengeluarkan peraturan bagi orang yang akan mengajar harus minta ijin lebih dahulu (1905).³⁵⁾

Sebaliknya dari pihak pengikut Islam sendiri ada usaha menghalangi pengembangan agama Kristen yang dibawa oleh pemerintah Belanda, dengan melancarkan agitasi bahwa pemerintah kolonial Belanda, dipadang sebagai pemerintah orang kafir yang harus ditentang dengan gerakan perang sabil. Pandangan yang demikian itu bertemu dengan pandangan rakyat tani yang menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah kekuasaan yang merusak tata masyarakat tradisional, yang harus ditentang dengan gerakan nativistis, milenaristis atau gerakan Ratu Adil. Harapan akan datangnya Ratu Adil (Jawa) ternyata dapat bertemu dengan harapan akan datangnya Imam Mahdi (agama Islam). Timbullah di sekitar tahun 1900 gerakan-gerakan mesianis di Jawa pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya yang dipimpin oleh para pemimpin Islam (Kyai).³⁶⁾

Di Jawa Timur pada permulaan abad ke-20, gerakan protes semacam itu pernah terjadi kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Nganjuk, yang terkenal dengan peristiwa Gedangan (1903) dan peristiwa Bandungan (1909).³⁷⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa pada permulaan sebagai akibat pelaksanaan politik kolonial etis dalam perluasan modal asing di Jawa Timur menimbulkan kegelisahan sosial dalam masyarakat pedesaan. Kegelisahan sosial tersebut disebabkan adanya perubahan tatanan dan kultur tradisional setempat yang makin terdesak. Timbullah gerakan protes tradisional (massa tani) terhadap pemerintah kolonial Belanda yang membawa tatanan dan kultur asing tersebut. Benturan

dengan tatanan dan kultur asing itu ternyata membawa akibat disorganisasi masyarakat tradisional yang mulai kehilangan orientasi hidupnya. Justru disorientasi yang menyebabkan oleh perubahan sosial itu mendorong serta membuat masyarakat tradisional cenderung untuk melancarkan gerakan yang mampu mengembalikan keadaan semula. Dalam keadaan demikian muncullah tokoh agama Islam (guru atau kyai) yang merealisasikan potensi gerakan protes tradisional tersebut ke dalam bentuk kekerasan dengan tujuan-tujuan meskipun anistis dan berorientasi kepada nilai-nilai agama. Dengan demikian jelaslah, bahwa gerakan protes tradisional yang terjadi di Jawa Timur pada permulaan abad ke-20 itu lebih menonjolkan latar belakang nilai-nilai keagamaan dari pada faktor-faktor sosial, politik dan faktor ekonomi.³⁸⁾ Namun demikian potensi protes tradisional, yang merupakan "arus bawah" peristiwa-peristiwa politik itu, setelah kelompok intelektual (inteligensia) memaksa organisasi modern sebagai sarana perjuangannya.

Muncullah kelompok intelektual itu sesungguhnya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda, dari suatu produk pendidikan formal sekular atau sistem sekolah Barat. Tujuan pelebaran jaringan sekolah di Hindia Belanda semula agar supaya pemerintah kolonial mendapatkan tenaga murah untuk keperluan administrasi dan terjalinnya hubungan kultural yang erat dan abadi antara negeri Belanda dengan "Hindia Belanda". Maka dari itu tujuan dapat dikatakan untuk mengimbangi proses pelebaran sistem birokrasi (kepegawaian). Hal ini berarti membuka kesempatan bagi para individu yang berasal dari masyarakat lapisan bawah untuk menjadi pegawai (rendahan) pangrehpraja. Menjadi pegawai pangrehpraja berarti mereka telah memasuki dunia priyayi. Terjadilah mobilisasi sosial

vertikal, yng mana anggota masyarakat lapisan bawah mempunyai kesempatan menembus masyarakat lapisan atas.

Perluasan kelas pegawai pemerintah kolonial semacam itu berarti ancaman bagi para pegawai lama yang bermula hanya bertopang kepada kebanggaan keturunan (aristokrat tradisional).

Artinya, untuk mempertahankan legitimasi atau pengesahannya, mereka harus menuntut pengajaran Barat pula. Karena pelebaran jaringan sekolah (Barat) ternyata sangat menentukan kemajuan anggota masyarakat Bumiputera, maka permulaan abad ke-20 itu biasanya dianggap sebagai "jaman kemajuan". Sekolah di samping membawa kemajuan di bidang status sosial dan status kepegawaian, juga membawa kemajuan di bidang cara berfikir.

Diterimanya dan dijadikannya sekolah (sistem Barat) sebagai salah satu syarat mobilisasi sosial adalah kelanjutan dari tradisi yang mengagungkan keunggulan ilmu. Di sekolah-sekolah Belanda telah memperkenalkan pada murid-murid, yang berasal dari berbagai latar belakang buday tradisional dan beberapa golongan masyarakat, suatu pola berpikir yang yang berasal dari berbagai latar belakang budaya tradisional dan beberapa golongan masyarakat, suatu pola berpikir yang sama, yaitu secara rasional dalam menanggapi lingkungannya, sehingga sekolah sistem Barat itu dapat menjadikan para terpelajar sebagai bagian dari dunia intelektual yang kosmopolit. Demikianlah kiranya sekolah modern (sistem Barat) itu telah berfungsi sebagai katalisator bagi terwujudnya dua elite, yaitu elite birokrat modern dan intelektual.³⁹⁾

Dengan demikian, kebijaksanaan dalam bidang pengajaran pemerintah kolonial menunjukkan, bahwa kekuasaan politik dan ekonomi tidak hendak dilepaskan oleh elite kolonial.

Meskipun demikian timbullah sebagai hasil yang tidak disangka golongan elite baru, yaitu kaum intelektual atau sering disebut pula kaum inteligensia atau golongan menengah (*elite white collar*). Golongan ini mencakup mereka yang memegang fungsi di dalam pemerintahan, perusahaan dan semua yang mempunyai pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, dan sebagainya.

Menurut Benda kaum intelegensia sering bertindak sebagai perintis atau pelopor dalam berbagai gerakan dan revolusi serta sebagai elite politik berdiri sendiri. Namun berbeda dengan kaum inteligensia di dunia Barat, kaum inteligensia di dunia ketiga (termasuk Indonesia) mempunyai kedudukan yang sangat berwibawa, terpisah dan dibedakan dari elite tradisional. Mereka terutama merupakan golongan yang berpendidikan Barat dan yang beroposisi terhadap penguasa kolonial. Kaum inteligensia sangat besar perannya di masa kolonial, yaitu sebagai pemimpin nasionalis yang mengarahkan perlawanan terhadap kolonialisme.⁴⁰⁾ Demikianlah menurut kenyataannya bahwa perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya telah berlangsung sejak bangsa Barat (Portugis dan Belanda) berkuasa di Nusantara. Peperangan mempertahankan daerahnya demi perikemanusiaan serta keadilan. Namun usaha mereka mengalami kegagalan karena di samping kalah unggul dalam bidang persenjataannya juga perlawanan mereka masih bersifat lokal dan sporadis, tanpa ada persatuan di antara mereka.

Kegagalan tersebut berarti memberi kesempatan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mengembangkan kekuasaannya di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Hakekat kolonialisme ialah mengeksploitasi bangsa lain. Pendidikan rakyat pribumi tidak mendapat perhatian sepenuhnya, dalam bidang ekonomi menjalankan sistem

perekonomian pemerasan atau *provit making policy*.⁴¹⁾

Hasil kekayaan alam Indonesia yang digalinya bukan untuk kesejahteraan rakyat pribumi, tetapi untuk membangun negeri induk (Negeri Belanda). Akibatnya rakyat pribumi mengalami kemiskinan dan menderita lahir-batin serta martabatnya merosot menjadi anggota masyarakat yang paling rendah. Demikianlah kenyataannya dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda terdapat tiga lapisan masyarakat yang tersusun dari atas ke bawah sebagai berikut :

1. Lapisan masyarakat kelas satu : golongan Eropa (*Europeanen*).
2. Lapisan masyarakat kelas dua : golongan Timur Asing (*Vreemde Oesterlingen*).
3. Lapisan masyarakat kelas tiga : golongan pribumi (*Inlanders*).⁴²⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa rakyat pribumi tergolong manusia kelas tiga atau kelas bawahan, yang berarti terus diperintah dan dapat diperintah. Sedangkan di dalam bidang pemerintahan dan ekonomi dengan jelas pemerintah kolonial menjalankan sistem *buffer* atau tameng. Sistem ini memang sesuai dengan politik induknya, yaitu politik pecah belah dan menguasai (*divide et impera*). Dengan politik ini tidak saja suku-suku bangsa yang satu bermusuhan dengan yang lain, tetapi juga lapisan masyarakat yang satu memusuhi yang lain. Akibatnya dalam masyarakat Indonesia yang terjajah itu telah tertanam bahaya permusuhan yang satu dengan yang lainnya secara laten yang kadang-kadang bahaya itu tidak disadari oleh mereka sendiri.⁴³⁾

Kehidupan ekonomi rakyat makin lama makin merosot, bahkan sampai pada ukuran yang paling minimal di dunia. Walaupun demikian mereka masih tahan menderita. Hanya

pemimpin yang tegas dan berani menjadi juru bicara, merekalah yang masih dinantikannya. Pada permulaan abad ke-20 dari lapisan masyarakat kelas tiga lahirlah golongan inteligensia yang berani menyatakan isi hati rakyat dengan organisasi modern sebagai wahananya. Muncullah Pergerakan Nasional di pentas panggung peristiwa Sejarah Indonesia, yang pada hakekatnya merupakan usaha bangsa Indonesia untuk membina persatuan nasional (Indonesia) dan mencapai kemerdekaan nasional dengan mempergunakan organisasi modern sebagai wahananya.⁴⁴⁾

Kelompok inteligensia tersebut ialah kelompok pelajar *STOVIA* (*School tot Opleiding van Indlandsche Artsen*), yang di bawah pimpinan Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908, telah mendirikan organisasi modern yaitu Budi Utomo untuk pertama kalinya sebagai wahana perjuangannya. Tujuan Budi Utomo pada waktu itu secara samar-samar tersimpul dalam semboyannya: Hindia Maju (*Indie Vooruit*) dan berpendirian: Jangka pendek, akan mempersatukan penduduk bumiputera, sedangkan jangka panjang akan membentuk organisasi umum di Jawa, dengan adanya suatu persaudaraan nasional yang tidak memandang perbedaan rasa, jenis kelamin dan kepercayaan.⁴⁵⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa para pelajar *STOVIA* pada waktu itu telah menunjukkan adanya usaha dan cita-cita untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang berdasarkan atas kesadaran nasional Indonesia (Nasionalisme Indonesia). Cita-cita semacam itu tentunya berlandaskan pola berfikir Indonesia-sentris yang mengatasi pola berfikir regio-sentris (kedaerahan) atau pun etno-sentris (kesukuan). Pola berfikir Indonesia-sentris inilah yang membawa kebangkitan nasionalisme-Indonesia, yang dalam taraf permulaannya dapat disebut proto-nasionalisme Indonesia. Namun perjuang-

an mereka untuk menggalang persatuan nasional Indonesia mengalami jalan buntu, setelah anggaran dasar hasil Kongres I Budi Utomo menentukan, bahwa tujuannya ialah: dengan jalan kerja sama mencapai kemajuan yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura. ⁴⁶⁾

Hal itu menunjukkan bahwa pada waktu itu pandangan regio-sentris (daerah-isme) dan etno-sentris (sukuisme) masih menguasai pandangan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia).

Dalam situasi dan kondisi masyarakat Hindia Belanda seperti tersebut di atas, di Surabaya H.U.S. Cokroaminoto menggalang persatuan nasional dengan melancarkan propaganda nasionalisme religius dan organisasi Sarikat Islam sebagai wahananya (1912). Walaupun anggota Sarikat Islam hanya terdiri dari orang-orang yang beragama Islam, namun pola berfikir nasionalisme religius telah mengatasi pola berfikir etno-sentris dan regio-sentris. Organisasi Sarikat Islam ini merupakan gerakan yang bersifat nasionalistis-demokratis-religius-ekonomis, yang lebih berorientasi kepada rakyat jelata. Akibatnya oleh gerakan arus bawah (Massa tani) H.U.S. Cokroaminoto dipandang sebagai "Ratu Adil" atau "Raja Jawa" yang akan membawa kembali ke jaman keemasan dan ia mendapat julukan *Gatutkaca Sarikat Islam*. ⁴⁷⁾

Karena usaha menggalang persatuan nasional dengan agama Islam sebagai dasar ikatannya, rupanya mencapai hasil yang nyata, maka pemerintah kolonial Belanda berusaha menggagalkannya dengan melancarkan politik *Verdeel en heers* (*divide et impera* = memecah dan menguasai). Pemerintah kolonial Belanda tidak mau mengakui persatuan seluruh Sarikat Islam sebagai badan hukum, tetapi yang diakui hanyalah cabang-cabang Sarikat Islam. Untuk mengatasi adanya kemungkinan perpecahan, maka H.U.S. Cokroami-

noto membentuk *Centraal Sarikat Islam* di Surabaya, yang merupakan koordinator cabang-cabang Sarikat Islam daerah (1915). Pengaruh Sarikat Islam di kota Surabaya mengalami pasang naik sampai tahun 1921. Sejak H.O.S. Cokroaminoto sering kali ditahan oleh polisi kolonial, maka pemuda Kusno (Bung Karno) meninggalkan kota Surabaya. Akibatnya pengaruh Sarikat Islam di kota Surabaya mengalami pasang surut. Hal itu disusul dengan peristiwa-peristiwa adanya keputusan disiplin partai pada Kongres Sarikat Islam ke V di Surabaya (1921) dan disusul dengan keputusan perubahan nama Sarikat Islam menjadi *Partai Sarikat Islam* (PSI) pada Kongres Sarikat Islam ke-VII di Madiun (1923) serta munculnya Partai Komunis Indonesia (1923) yang anggotanya sebagian berasal dari anggota Sarikat Islam juga.

Pengaruh gerakan komunis (PKI) di bawah pimpinan Muso dan Alimin mengalami pasang naik di kota Surabaya. Pemogokan-pemogokan di berbagai pabrik gula, bengkel-bengkel dan pabrik baja dimulai. Pemogokan terkenal pada tahun 1923 di bengkel-bengkel kereta api, dan pada tahun 1925 di pabrik-pabrik baja di kota Surabaya.⁴⁸⁾

Dalam situasi yang demikian itu Dr. Sutomo datang di Surabaya dan mendirikan *Indonesische Studie Club* (1924). Setelah di negeri Belanda mencapai gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran, pada tahun 1924 Dr. Sutomo oleh pemerintah Belanda ditempatkan di Surabaya sebagai Doktor Spesialis (kulit) di Rumah Sakit Negeri *Centrale Burgerlijke Zieken inrichting* (CBZ) dan merangkap sebagai dosen pada *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS). Ketika berada di negeri Belanda Dr. Sutomo pernah menjadi anggota (bahkan Ketua) perkumpulan mahasiswa *Indonesische Vereeniging* yang kemudian berubah namanya menjadi *Perhimpunan Indonesia* (PI) (1924). Perkumpulan itu mempropagandakan

faham nasionalisme Indonesia dan semboyannya "*Indonesia Merdeka Sekarang*".⁴⁹⁾

Pada waktu itu di Surabaya terdapat perkumpulan-perkumpulan bumiputera yang berdasarkan kedaerahan, kesukuan, agama (Budi Utomo, PSI, *Jong Java* dan Sarikat Madura) dan ada pula yang berdasarkan faham komunis (PKI Madura) dan ada pula yang berdasarkan faham komunis (PKI).

Di tengah-tengah situasi yang demikian itu Dr. Sutomo mengetahui, bahwa banyak generasi muda yang memerlukan tempat di luar perkumpulan-perkumpulan tersebut, untuk dapat mengeluarkan rasa nasionalisme mereka. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka pada tanggal 12 Juli 1924 Dr. Sutomo mendirikan organisasi *Indonesische Studie Club* di kota Surabaya. *Studie Club* ini merupakan suatu lembaga studi di mana kaum intelektual muda dan tua dari segala aliran, faham politik dan kepercayaan agama dapat berkumpul, berkomunikasi dan berdiskusi secara ilmiah, tentang berbagai persoalan kepentingan nusa dan bangsa. Dengan demikian diharapkan oleh Dr. Sutomo tumbuhnya rasa persatuan (nasional Indonesia) dan sikap saling menghargai di antara para pemimpin bumiputera. Usaha Dr. Sutomo untuk menggalang persatuan bangsa itu kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakannya "Hari Inter-insulair" di kota Surabaya pada bulan Juli 1925, yang merupakan pertemuan antara wakil suku-suku di Pulau Jawa, Madura, Ambon, Sumatera, Sunda, Menado, Bali dan sebagainya.⁵⁰⁾

Dengan demikian maka semangat nasionalisme Indonesia yang merupakan ide dari Perhimpunan Indonesia mulai disebar-luaskan oleh Dr. Sutomo di Jawa Timur.

Ternyata pendirian *Indonesische Studie Club* tersebut dapat menarik kaum intelektual muda di kota-kota lain, se-

hingga dengan meniru kota Surabaya muncullah *Algemeene Studie Club* di Bandung. Begitu pula kota-kota Solo, Yogya, Jakarta, Semarang, dan Bogor mengikuti jejak kota Surabaya. Walaupun *studie club* tersebut berbeda-beda, namun ada satu hal yang sama ialah kesadaran atas persatuan Indonesia dan tujuan kemerdekaan.⁵¹⁾

Hasrat untuk bersatu di kalangan pemuda kemudian dinyatakan dengan Kongres Pemuda I di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut muncullah cita-cita untuk mencapai Negara Kesatuan Indonesia yang merdeka. Muncullah pula cita-cita agar supaya bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan, dan muncul juga cita-cita untuk menggalang potensi kaum muda dalam suatu wadah organisasi.⁵²⁾

Propaganda nasionalisme Indonesia yang sedang menentang kolonialisme, makin dipergiat setelah para pelajar dari tiga sekolah tinggi (RHS, STOVIA, dan THS) mendirikan organisasi *Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)* di Jakarta (September 1926). PPPI yang telah dijiwai oleh Perhimpunan Indonesia ini mempunyai suatu prinsip, bahwa persatuan Indonesia adalah senjata yang kuat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, maka dari itu perjuangan PPPI adalah untuk kemerdekaan tanah air sesuai dengan hasrat Indonesia akan kemerdekaan.⁵³⁾

Hasrat untuk menggalang persatuan Indonesia, rupanya juga meresap ke dalam tubuh organisasi kaum tua. Pada tahun 1927, atas inisiatif PNI, diadakan federasi partai-partai kebangsaan Indonesia dalam wadah organisasi *Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)*, yang meliputi organisasi: PNI, PSI, Budi Utomo, Pasundan, Sarikat Sumatera, Kaum Betawi dan *Indonesische Studie Club*.⁵⁴⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa pada saat menjelang tahun 1928 cita-cita persatuan Indonesia dan menuju Indonesia Merdeka, telah memenuhi udara politik Pergerakan Nasional Indonesia. Rasa satu bangsa Indonesia telah diin-syafi oleh sebagian besar kaum pergerakan. Pengertian tanah air Indonesia telah meresapi benak mereka, begitu juga bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, dari tahun ke tahun pemakaiannya makin berkembang.⁵⁵⁾

Dalam situasi yang demikian itu, muncullah golongan pemuda yang merumuskan dan mengikrarkan aspirasi-aspirasi tersebut dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Sesudah peristiwa Sumpah Pemuda, pergerakan nasional Indonesia diliputi semangat persatuan Indonesia dan cita-cita kemerdekaan. Dengan rasa toleransi dan solidaritas, asas-asas yang tercantum dalam Sumpah Pemuda dapat diterima oleh sebagian besar organisasi kebangsaan Indonesia sebagai landasan perjuangan. Hal ini terbukti dengan adanya gerakan penggabungan secara federasi ataupun secara fusi dari organisasi-organisasi pergerakan nasional. Sejalan dengan itu lagu Indonesia Raya dan Bahasa Indonesia oleh organisasi-organisasi pergerakan dipakai sebagai lambang dan kebanggaan nasional Indonesia.

Pengaruh Sumpah Pemuda dan Lagu Indonesia Raya tidak hanya menyusup dalam organisasi-organisasi politik dan pemuda saja, tetapi juga berpengaruh terhadap peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh (*De Zeven Provinciën*) yang meletus di pelabuhan Oleh-Leh (Kutaraja, Aceh) tanggal 4 Pebruari sampai dengan 10 Pebruari 1933. Pemberontakan tersebut telah direncanakan di kota Surabaya dan merupakan puncak rentetan peristiwa pemogokan-pemogokan dan

demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung di Surabaya. ⁵⁶⁾

Walaupun pemberontakan tersebut mengalami kegagalan, namun dengan adanya peristiwa itu bangsa Indonesia telah menunjukkan kepada dunia, bahwa tanpa bangsa Belanda ia telah sanggup menguasai dan mengemudikan kapal perang sebesar 6.500 ton.

Sementara itu, apabila usaha menggalang persatuan nasional dan pengarahannya cita-cita Indonesia Merdeka mengalami kemajuan pesat, tetapi dalam bidang taktis perjuangan mengalami kemunduran. Kalau semula perjuangan bersifat radikal, non koperasi dengan pemerintah kolonial dan dengan tegas menuju ke Indonesia Merdeka, maka gerakan berikutnya melakukan taktik koperasi dan hanya menuntut : "Status dominion Indonesia dalam ikatan negeri Belanda" (Petisi Sutarjo tahun 1936), bahkan GAPI hanya menuntut "Indonesia Berparlemen". ⁵⁷⁾

Tuntutan Indonesia Berparlemen GAPI tersebut menimbulkan Komisi Visman (1940) yang bertugas untuk mempelajari kemungkinan perubahan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Laporan Komisi Visman tersebut ternyata baru diserahkan pada tahun 1942. Beberapa hari sesudah penyerahan laporan tersebut, Jepang mendarat di Jawa dan pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Mulailah Indonesia dikuasai oleh Jepang.

C. PERIODE PENDUDUKAN TENTARA JEPANG

Tujuan Jepang menduduki Indonesia tidaklah untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber material dan sumber tenaga dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Hal itu akan

dapat terlaksana, apabila ia dapat menggunakan pengaruh dan wibawa dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, baik dari fihak nasionalis ataupun dari fihak Islam. Sehingga untuk mempropagandakan Perang Asia Timur Raya tersebut, tokoh-tokoh nasionalis diajak bersama dalam gerakan-gerakan: *Tiga A* (29-4-1942), *Putera* (9-3-1943), *Jawa Hokokai* (8-1-1944) dan *Gerakan Rakyat Baru* (28-7-1945).

Sedangkan pemudanya akan digerakkan melalui organisasi: *Pemuda Asia Raya* (11-9-1943), *Gemblengan Pemuda Asia Raya* (=Gempar; 1943) dan *Angkatan Muda* (1944). Dengan anggapan bahwa golongan Islam pada dasarnya anti Belanda, karena soal perbedaan agama, maka pemerintah militer Jepang menaruh perhatian istimewa terhadap golongan tersebut. Untuk dapat kerjasama dengan tokoh-tokoh ini, maka dihidupkan kembali organisasi-organisasi Islam: MIAI (1942), NU (1943), Muhammadiyah (1943) dan dibentuklah Masyumi (1943).

Demikianlah dengan mempergunakan pengaruh dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, pemerintah pendudukan Jepang berusaha mengerahkan pemuda Indonesia untuk memperkuat pertahanan Jepang di Indonesia. Karena untuk keperluan itu para pemuda perlu mendapat latihan dasar militer, maka lahirlah organisasi-organisasi para militer, seperti: *Seinendan* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Bantu Polisi), *Heiho* (Barisan Pembantu Prajurit), *Shuisintai* (Barisan Pelopor). Bahkan kemudian dibentuk pula Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA = *Boei Giyugun*; 3-10-1943).⁵⁸⁾

Tindakan Jepang untuk mengeksploitasi sumber alam dan tenaga manusia Indonesia tersebut menimbulkan akibat yang sangat negatif bagi rakyat Indonesia. Sikap manis pemerintah pendudukan Jepang yang mengaku sebagai "Sau-

dara Tua” dengan propaganda ”Nippon Indonesia sama-sama”, berubah menjadi kekejaman dan pemerasan. Rakyat pedesaan mengalami penderitaan, karena harus menjual segala atau sebagian besar hasil panennya kepada pemerintah pendudukan Jepang dengan harga murah. Mereka juga harus menghabiskan hari kerjanya untuk kerja bakti (*kinrohosi*), mencari iles-iles di hutan, menanam pohon jarak, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Desa-desa menjadi kekurangan tenaga laki-laki, karena mereka harus menjalankan kerja paksa sebagai *romusha*. Tanpa dibayar *romusha* harus membuat jalan atau pun kubu-kubu dan mereka mendapat perlakuan di luar batas perikemanusiaan.

Golongan tengah dan atas masyarakat Indonesia juga mengalami penindasan dan penghinaan. Dengan dalih untuk keperluan perang, mereka harus menyetorkan perhiasan emas, intan, dan berlian kepunyaan pribadi. Di antara mereka juga banyak yang kehilangan dan menyerahkan anak-anak gadisnya dengan terpaksa kepada Jepang, yang dengan bujukan akan disekolahkan ke Jepang. Akhirnya mereka dijadikan pemuas nafsu serdadu-serdadu Jepang. Penangkapan dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai, penyiksaan dilakukan di luar batas perikemanusiaan.⁵⁹⁾

Tindakan pemerintah militer yang merendahkan martabat dan melampaui batas perikemanusiaan inilah yang kemudian menimbulkan perlawanan-perlawanan, yang antara lain terjadi di Jawa Timur dan terkenal dengan peristiwa Pemberontakan Peta di Blitar. (14-2-1945).

Meskipun pemberontakan Peta di Blitar mengalami kegagalan, namun pemerintah militer Jepang tidak dapat memungkiri arti historis, bahwa pemuda dan rakyat Indonesia tidak pernah mundur dalam perjuangannya mencapai Indo-

nesia Merdeka. Hal ini terbukti dengan munculnya Peristiwa 1 Juli 1945 di Gedung Radio Surabaya, di mana para pemuda telah mencetuskan tuntutan, bahwa pemuda hanya mau memanggul senjata melawan Sekutu kalau Indonesia Merdeka sekarang juga diberikan dan diakui oleh Jepang.⁶⁰⁾

Surabaya yang menurut pandangan dari strategi militer Sekutu merupakan kota pelabuhan kedua yang harus diduduki sesudah Singapura.⁶¹⁾

Pada pertengahan tahun 1945 setiap malam mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Sasaran serangan adalah pertahanan-pertahanan Jepang, baik di darat maupun di sekitar daerah angkatan laut Jepang di Ujung Surabaya. Bahaya kebakaran kota, karena serangan udara itu selalu ada. Latihan-latihan untuk mengatasi semua itu membuat rakyat menjadi tabah. Demikian juga latihan-latihan kemiliteran yang secara paksa diberikan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia, membuat bangsa Indonesia menjadi pandai dalam menggunakan senjata api, selain bambu runcing. Pada waktu itu di kota Surabaya pada khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya, sedang terpadu kepedihan penderitaan dengan kemantapan dan ketetapan hati untuk mencari kesempatan melawan pemerintah Jepang yang sedang dalam kesulitan.

Kesempatan tersebut itu tiba, setelah pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Dengan kejadian itu berarti di Indonesia secara formal terdapat kekosongan kekuasaan. Pada saat-saat yang demikian inilah terjadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Demikianlah berkat kesatu-paduan antara angkatan tua dan angkatan muda bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan di kota Jakarta.

B A B III

WUJUD PERLAWANAN

A. PERLAWANAN TRUNAJAYA

1. Latar Belakang

Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1575, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga, memerintah pada tahun 1613 – 1645. Pada waktu itu wilayah kekuasaan kerajaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat. Namun dalam masa pemerintahan raja-raja yang menggantikannya nampak adanya kemunduran. Berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan makin menyempit akibat aneksasi yang dilakukan oleh Belanda sebagai imbalan intervensi Belanda dalam pertentangan-pertentangan intern dalam kerajaan.

Sebelum Belanda V O C menganeksasi wilayah-wilayah kerajaan Mataram sejak ahir abad ke-17, seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah besar yang konsentris dengan kraton sebagai pusatnya.¹⁾

Istana atau kraton raja merupakan pusat kerajaan dan terletak di ibukota kerajaan, yang biasa disebut wilayah *Kertanegara* atau sering disingkat *Kutagara*. Selanjutnya wilayah yang mengitari Kutagara ini disebut wilayah *Negara Agung*.

Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk daerah pantai disebut wilayah *Mancanegara* yang dibagi dalam dua bagian, yaitu *Mancanegara Wetan* untuk

yang sebelah timur, sedang yang sebelah barat disebut *Manca-negara Kilen*.

Termasuk dalam Mancanegara Wetan, yaitu daerah yang terletak sebagian besar di Jawa Timur, antara lain : Ponorogo, Kediri, Madiun, Pacitan, Magetan, Caruban, Kertasana, Blitar, dan lain-lain. ²⁾ Sedang Mancanegara Kilen, yaitu daerah yang terletak sebagian besar di Jawa Tengah.

Wilayah Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen, masing-masing dikepalai oleh seorang *Wedana Bupati* yang kedudukannya di atas semua Bupati Kepala Daerah yang termasuk dalam wilayah wewenangnya. Tugas *Wedana Bupati*, adalah mengawasi dan mengkoordinasi semua bupati bawahannya. Ia bertanggungjawab pada raja atas keberhasilan pemerintahan daerah, dan kelancaran pengumpulan penghasilan daerah yang harus diserahkan ke pusat.

Selain yang disebut daerah Mancanegara, ada juga wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah *Pasisiran*. Sebagaimana halnya wilayah Mancanegara, wilayah *Pasisiran* juga dibagi menjadi dua bagian, ialah daerah *Pasisiran Wetan* dan *Pasisiran Kilen*. Batas antara kedua daerah ini adalah sungai Tedunan atau sungai Serang, yang mengalir di antara Demak dan Jepara.

Baik wilayah *Pasisiran Wetan* atau pun *Pasisiran Kilen* masing-masing dikepalai seorang *Wedana Bupati*. Untuk wilayah *Pasisiran Wetan*, *Wedana Bupati* bertempat kedudukan di Jepara, sedang untuk *Pasisiran Kilen* berkedudukan di Tegal. Sebagaimana halnya *Wedana Bupati* di wilayah Mancanegara, *Wedana Bupati Pasisiran* bertugas mengawasi dan mengkoordinasi Bupati-bupati Kepala Daerah, yang ada di bawah kekuasaannya.

Termasuk dalam *Pasisiran Wetan*, yaitu daerah yang

terletak di Jawa Timur, antara lain : Lamongan, Tuban, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan lain-lain. ³⁾

Dalam mengurus wilayah yang luas tersebut, telah disusunnya jabatan pemerintahan yang secara hierarkhis menyilang dari atas ke bawah, dan menyebar dari pusat ke daerah. Untuk ini raja memegang kekuasaan sentral dan berkedudukan di atas pejabat-pejabat birokrasi tersebut.

Seperti disebutkan bahwa raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah kerajaannya. Kesahan (*legitimacy*) kedudukan dan kekuasaan raja didapat karena warisan menurut tradisi. Apabila pada masa didirikannya kerajaan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1575, otoritas raja lebih banyak didasarkan pada kharisma dan kelebihan kemampuan pribadinya, pada masa-masa kemudian otoritas raja telah diinstitusikan menjadi tradisi. ⁴⁾

Dengan demikian pengangkatan raja baru, lebih didasarkan pada keturunan atau hak waris menurut tradisi. Hal ini sudah barang tentu tidak menghilangkan kenyataan bahwa ada juga di antara raja-raja tersebut yang mempunyai kecakapan memerintah, keberanian, dan kepribadian maupun sifat-sifat yang baik.

Menurut tradisi Istana sebagai pengganti raja ditetapkan putralaki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan isteri permaisuri (*garwa padmi*). Apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, maka putra laki-laki tertua dari isteri selir (*garwa ampeyan*) dapat diangkat sebagai pengganti raja. Apabila kedua-duanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja (paman) atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti. Penyimpangan dapat terjadi apabila calon yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai raja, seperti mempunyai sakit ingatan atau

pun cacat badan. Penyimpangan dari tradisi, baik disengaja atau pun tidak disengaja dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan, dan bahkan dapat menjurus ke arah intrik dalam istana dan pertentangan intern para bangsawan.⁵⁾

Dalam hubungan ini kepribadian dan sifat yang baik maupun kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar atas otoritas raja. Dalam keadaan demikian loyalitas baik dari kalangan istana, para pejabat birokrasi dan rakyat pada umumnya dapat terjaga. Sebaliknya sifat dan tindakan tidak baik dari raja dapat menimbulkan ketegangan dalam istana ataupun rasa ketidak-puasan. Tindakan dari raja yang menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat kerajaan dapat pula menimbulkan kebencian dan penentangan.

Meskipun di samping raja terdapat semacam dewan penasihat yang anggotanya antara lain terdiri dari para pangeran yang telah berpengalaman, namun kekuasaan raja sangat menentukan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, seperti dalam pengangkatan dan pemecatan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, dalam mengadili kejahatan-kejahatan, dalam mengumumkan perang, dan sebagainya.⁶⁾

Salah satu syarat yang penting untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah pusat kerajaan, dan pemerintah di daerah-daerah adalah tetap adanya kewibawaan raja di satu pihak, dan tetap terpeliharanya loyalitas penguasa-penguasa daerah di pihak lain. Loyalitas terhadap raja menjadi syarat mutlak untuk setiap pengangkatan.

Hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan baik. Hal seperti ini terjadi terutama apabila raja yang sedang memerintah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang

dari syarat-syarat yang diharapkan untuk pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dengan baik. Di pihak lain dapat pula terjadi, bahwa ketegangan antara pusat dan daerah disebabkan karena adanya keinginan penguasa daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat.

Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan timbulnya penentangan dari penguasa daerah, raja mengadakan sistem pengawasan yang teliti. Cara yang dipergunakan untuk pengawasan tersebut misalnya, keharusan hadir dalam upacara-upacara tertentu. Apabila terdapat gejala tidak setianya penguasa daerah, maka diadakan utusan, antara lain : *gandek*, *telik sandi* atau pun *duta ngrampung*.⁷⁾

Sebagai ikatan terhadap penguasa daerah, maka mereka diharuskan memberi upeti kepada raja yang disebut *glondong pengareng-areng*. Lebih dari itu maka sistem perkawinan sering dipergunakan guna mengecilkan kemungkinan timbulnya sikap penentang terhadap raja. Selain dari itu masih terdapat cara-cara lain, misalnya : pemindahan tugas, pengamatan dari dekat, dan lain-lain.

Jelaslah, bahwa pelbagai cara telah dilakukan oleh raja sebagai penguasa pusat kerajaan untuk menjaga hubungan yang stabil antara pusat dan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa daerah yang dapat menggoyahkan hubungan pusat dan daerah akan mendapat hukuman dari raja.

Di samping hal-hal yang disebutkan di atas, kiranya ada suatu pertukaran jasa antara pemerintah pusat kerajaan dan pemerintah daerah, misalnya bantuan pemerintah pusat terhadap pemberantasan gangguan keamanan, pembuatan bangunan, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Namun demikian kesemuanya itu seringkali nampak bahwa dalam peme-

rintahan seorang raja tuntutan arus jasa ke pusat lebih besar dari pada apa yang diberikan oleh raja kepada daerah. ⁸⁾

2. Proses Perlawanan

a. Jalan Perlawanan

Pangeran Cakraningrat I oleh Sultan Agung diberi wewenang memerintah di Madura, mempunyai dua orang anak yaitu :

- 1). Raden Demang Melayakusuma (sering disingkat Demang Melaya).
- 2). Raden Undagan.

Pada tahun 1647 waktu Cakraningrat I sedang berada di Mataram, tiba-tiba di situ terjadi pemberontakan (*kraman*) yang dilakukan oleh Pangeran Alit (adik Sunan Amengkurat I) beserta kira-kira 50 orang pengikutnya. Pertempuran terjadi di alun-alun Plered. Cakraningrat I yang mendapat perintah raja untuk melawan pemberontak, akhirnya gugur. Ia dimakamkan di Magiri, maka sering disebut Pangeran Sedeng Magiri. Sebagai pengganti Cakraningrat I rupanya pilihan Sunan Amangkurat I jatuh pada Raden Undagan, bukan pada Demang Melaya sebagai anak sulung. Raden Undagan memakai gelar Cakraningrat II. Demikianlah, Demang Melaya telah disisihkan bahkan pada tahun 1656, karena ia oleh Amengkurat I dianggap bersalah, kemudian dihukum mati. Trunajaya, putera Demang Melaya waktu itu masih berumur tujuh tahun, dan bernama Nila Prawita. Terpaksa Trunajaya turut dengan pamannya, Cakraningrat II. Peristiwa-peristiwa pahit yang dialami Trunajaya pada waktu kecil ini cukup mengesan dalam hidupnya. Trunajaya makin lama makin dewasa, dan makin pula merasakan akibat-akibat dari kekuasaan mutlak Amengkurat I. ⁹⁾

Pangeran Cakraningrat II ternyata banyak tinggal di Mataram, sehingga pemerintahan di Madura terabaikan, dan menyebabkan kekecewaan rakyat Madura.

Demikianlah, Trunjaya sejak kecil hingga dewasa mengalami penderitaan batin dan menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Mataram.

Peristiwa-peristiwa pahit yang berkesan pada diri Trunajaya seperti digambarkan di atas, dapatlah merupakan salah satu di antara hal-hal yang menyebabkan timbulnya Perang Trunajaya. Di samping itu kekuasaan mutlak Amangkura I berupa tindakan sewenang-wenang atau pun putusan yang melulu berdasarkan kesukaan raja, sehingga menimbulkan sikap menentang dari orang-orang yang terkena.

Di antara tindakan-tindakan itu, misalnya :

- 1) Menjatuhi hukuman kepada isteri-isterinya, karena kematian Ratu Ralang, yaitu isteri yang sangat disayangi.
- 2) Menaruh dendam kepada Pangeran Adipati Anom (putera Mahkota) yang telah berani mengawini Raden Oyi, calon isteri raja.
- 3) Akibat tindakan Pangeran Adipati Anom tersebut, Pangeran Pekik dari Surabaya beserta 40 orang anggota keluarganya dijatuhi hukuman mati. Hal itu terjadi karena Pangeran Pekik dituduh sebagai pelindung Pangeran Adipati Anom.
- 4) Raden Kajoran (Panembahan Rama), sebagai orang yang banyak memperhatikan soal-soal keagamaan tidak senang melihat tindakan sewenang-wenang yang sering

dilakukan Amangkurat I. Penghukuman sejumlah ulama-ulama yang dituduh menghasut Adipati Anom menentang ayahnya begitu menyakitkan hati Raden Kajoran. Bahkan akhirnya tindakan sewenang-wenang juga mengenai keluarga Raden Kejoran sendiri.¹⁰⁾

Di samping adanya persoalan-persoalan intern yang terjadi dalam kerajaan Mataram, maka politik penjajahan Belanda lebih mendorong timbulnya Perang Trunajaya.

Pada tahun 1602 *de Vereenigde Oost Indische Compagnie* (V O C), atau dikenal dengan Kumpeni Belanda telah berdiri dengan maksud untuk mencegah persaingan dan permusuhan di antara pedagang-pedagang Belanda di Hindia Timur. VOC didirikan atas prakarsa seorang pemimpin negara Belanda yang bernama Johan Van Oldenbarneveltdt.

Suatu hal yang diusahakan ialah memperluas kekuasaan atas suatu wilayah, sehingga akhirnya akan berhasil menguasai bangsa dan negara di mana berada, dan sekaligus mengeksploitasinya untuk kepentingannya dan kepentingan negeri Belanda.

Pada mulanya Kumpeni Belanda yang berstatus non pemerintah, hanya bergerak di bidang pelayaran dan perdagangan. Tetapi setelah mendapatkan hak istimewa dari Pemerintah Belanda, Kumpeni (VOC) mulai melakukan hubungan-hubungan datang termasuk di dalamnya hubungan politis. Di samping itu mempunyai hak monopoli, mengadakan perjanjian dengan raja-raja atau kepala-kepala Pemerintahan Negeri; juga diperbolehkan mempunyai Angkatan Perang sendiri; mengangkat pegawai-pegawai yang diperlukan, membuat mata uang sendiri dan mengumumkan perang bahkan boleh mengadakan perjanjian perdamaian.

Setelah melalui pertempuran yang seru melawan pasukan Jayakarta, maka Jayakarta dapat diduduki dan dikuasai. Kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Itulah permulaan daerah kekuasaan Belanda dan selanjutnya menambah dan membangun kekuasaannya di daerah-daerah lain dengan menjalankan politik *divide et impera*.¹¹⁾

Kerajaan Mataram pada jaman pemerintahan Sultan Agung, merupakan satu kerajaan yang besar dan jaya di wilayah Nusantara dan merupakan saingan besar bagi Kumpeni Belanda.

Tetapi setelah ia diganti oleh puteranya, yaitu Sultan Amangkurat I (1645 – 1677), kerajaan Mataram merosot bahkan menjadi sebuah kerajaan yang tak berarti. Pada tahun 1646 Sultan Amangkurat I telah membuat suatu perjanjian perdamaian dengan V O C yang semula merupakan musuh besar bagi Sultan Agung. Di dalam perjanjian perdamaian itu dikemukakan, bahwa kedua belah pihak akan saling membantu bila salah satu pihak di antara mereka mendapat kesukaran. Tindakan ini merupakan tindakan yang salah dan besar sekali akibatnya terutama bagi kerajaan Mataram sendiri. Tindakan seperti ini berarti, bahwa Sunan Amangkurat I telah membuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Kumpeni untuk mencampuri semua urusan dalam negeri kerajaan Mataram.¹²⁾

Adalah suatu hal yang baru bagi kerajaan Mataram, apabila pada tahun 1677 Residen Jepara Jacob Couper atas nama Kumpeni telah membuat perjanjian dengan Amangkurat I dan disaksikan oleh keempat putera Sunan, yaitu Pangeran Adipati Anom, Pangeran Mertasana, Pangeran Singasari dan Pangeran Puger.

Atas dasar itu dilanjutkan dengan pelaksanaan menyerbu Jawa Timur. Hasilnya bagi Kumpeni memang mengun-

tungkan meskipun Trunajaya telah melawan dengan gagah beraninya. Akhirnya pusat kekuasaan Trunajaya dipindahkan dari Surabaya ke Kediri. Dari Kediri serangan ke ibukota kerajaan Mataram, yaitu Plered dilancarkan. Sunan Amangkurat I lari dan dalam perjalanan meninggal dan dimakamkan di Tegalwangi. Penggantinya, yaitu Pangeran Adipati Anom, bergelar Amangkurat II.

Dalam rangka merebut ibu kota kerajaan (Plered), Amangkurat II bersatu dengan Belanda. Bahkan sempat juga menanda tangani perjanjian yang isinya, sebagai berikut :

- a. Daerah antara Ujung Jawa Timur dan Krawang dimasukkan pengawasan Kumpeni.
- b. Tanah-tanah sebelah timur Krawang sampai sungai Pemanukan diberikan kepada Kumpeni.
- c. Pengakuan Sunan yang baru itu atas hutang Mataram kepada Kumpeni sebanyak 250.000 real Spanyol, 3.000 koyan beras, bantuan 20.000 real tiap bulan untuk pengganti biaya perang, yang diperhitungkan mulai bulan Juli 1677.
- d. Kumpeni memegang monopoli impor kain cita dan candu di Jawa.¹³⁾

Dengan perjanjian tersebut, maka Sunan Amangkurat II dan Kumpeni bersepakat mengerahkan pasukannya untuk merebut kembali daerah pusat daratan dan mengenyahkan Trunajaya.

b. Kepemimpinan

Persepakatan antara Trunajaya dan Kraeng Galengsung pada bulan Februari 1674 diikuti persiapan-persiapan ke arah perang. Pada bulan Desember tahun itu juga orang-orang Ma-

dura dan Makasar telah mulai mengadakan pendaratan di ujung timur Pulau Jawa, dan menduduki daerah kosong Denung (dekat Gunung Ringgit), suatu daerah batas antara kekuasaan Mataram dan Balambangan. Di situlah mereka menyusun kekuatan dengan mendirikan benteng untuk mempersiapkan penjelajahan tempur menyusur pantai Jawa di tepi Selat Madura. Pada pertengahan tahun 1675 persiapan telah selesai, maka penjelajahan segera dimulai dan berturut-turut diduduki: Pasuruan, Pejarakan, Gombong dan Gorongan. Semua tempat tersebut terletak antara Denung dan Surabaya. Bahkan lebih dari itu kota bandar Surabaya dapat diduduki.¹⁴⁾

Selanjutnya dalam membangun kekuatan tempurnya berhasil menangkis serangan musuhnya. Trunajaya merasa dirinya telah kuat, maka sejak bulan Agustus 1676 memakai gelar Panembahan Maduretno. Rencana selanjutnya dengan kekuatan yang telah dibinanya, berusaha merebut daerah-daerah ke sebelah barat, bahkan Jawa Tengah.

Melihat keadaan seperti ini, Kumpeni telah menunjukkan keinginan untuk membantu Mataram dalam rangka pelaksanaan politik *divide et impera*. Namun demikian pada permulaan pelaksanaan politik tersebut belum terlihat secara sungguh-sungguh. Kurangnya kesungguhan itu mungkin karena waktu itu Kumpeni belum mendengar janji-janji konkrit yang menguntungkan dari Sunan.

Pada tahun 1677, (tepatnya antara tanggal 12 – 20 Maret) Residen Jepara Jacob Couper, atas nama Kumpeni membuat perjanjian dengan Amangkurat I. Dalam perjanjian itu Kumpeni telah diberi wewenang oleh Sunan, untuk turut menyelesaikan perlawanan Trunajaya. Pada perjanjian tersebut di pihak Mataram diwakili oleh Wedana Pesisir Jepara Wangsadipa atas nama Raja, karena Sunan Amang-

kurat I yang telah tua itu kerap kali sakit. ¹⁵⁾

Kini Kumpeni telah mempunyai dasar kuat untuk turut terjun dalam pertikaian. Bahwa perjanjian yang telah dibuat itu akan membawa akibat yang menguntungkan diinsyafi oleh Speelman (Admiral dan Panglima tentara Kumpeni). Perjanjian itu sendiri sebenarnya disertai pula pengakuan Sunan berdasarkan kontrak 25 Pebruari 1677 atas hutangnya kepada Kumpeni sebanyak 250.000 real. Di samping itu pernah Sunan berjanji sanggup memberi subsidi tiap bulan : 20.000 real dan beras 3.000 koyan, sebagai biaya perang atas bantuan Kumpeni. Karena pembayaran bantuan itu tertunda, sehingga hutang Sunan kepada Kumpeni menjadi 310.000 real (ini berarti tiga bulan subsidi itu belum dibayar), maka sebagai jaminan pembayaran dibuat perjanjian khusus yang menyebutkan bahwa di semua bandar pantai utara, antara Karawang sampai Ujung Jawa Timur, Kumpeni tiap tahun berhak menarik penghasilannya sebagai angsuran hutang. ¹⁶⁾

Pada tanggal 27 Maret 1677 pasukan besar Speelman berangkat ke Jawa Timur, dan merupakan tantangan berat bagi Trunajaya. Namun demikian prajurit-prajurit Madura dan Makasar bertempur dengan keberanian yang mengagumkan. Karena tekanan makin berat dan untuk menghindari kehancuran, Trunajaya terpaksa menarik pasukannya yang masih tinggal dan mengundurkan diri ke arah barat. Benteng Trunajaya di Surabaya jatuh ke tangan Kumpeni pada tanggal 13 Mei 1677. ¹⁷⁾

Meskipun Speelman mendapat kemenangan tetapi selama di Surabaya serdadu-serdadunya banyak terserang penyakit demam dan perut, sehingga pasukan yang menjadi lemah itu tak mampu lagi mengejar pasukan Trunajaya yang mengundurkan diri. ¹⁸⁾ Di antara sebelas *umbul*

(Kepala Daerah) dari Surabaya, tujuh orang tetap setia pada Trunajaya dan turut menyingskir, sedang yang empat tunduk pada Kumpeni.¹⁹⁾ Trunajaya beserta Raden Kajoran dan pasukannya menuju Kediri. Kediri akan dijadikan markas besar dan pusat kekuasaan yang baru. Dari sinilah kekuatan baru dibina dan selanjutnya serangan dilancarkan.

Kali ini yang menjadi sasaran pertempuran adalah ibu-kota kerajaan. Pada akhir bulan Juni 1677 kraton dapat direbut; Amangkurat I meninggalkan Plered dan mengembara dari desa yang satu ke desa yang lain. Akhirnya ia wafat di Wonoyoso dan dimakamkan dekat Tegal, Di Tegal Arum atau Tegalwangi.

Sebelum ia wafat, ditunjuknya puteranya Pangeran Adipati Anom menjadi penggantinya. Dengan demikian Pangeran itu menjadi Raja dengan gelar Sunan Amangkurat II (1677 – 1703).

c. Taktik dan Strategi Perlawanan

Dengan runtuhnya pusat kerajaan Mataram semangat prajurit-prajurit Trunajaya menjadi bertambah tebal. Pasukan Raden Kajoran berkali-kali mengadakan penyerangan ke kota-kota pantai yang masih dikuasai Kumpeni, antaranya dilakukan pada bulan Nopember 1677. Demikian pula pasukan-pasukan Trunajaya selalu mengadakan penjagaan di daerah-daerah yang telah dikuasai termasuk daerah pusat Mataram. Pemimpin-pemimpin pasukan tersebut terdiri antara lain Mangkuyuda, Arya Wangseng Gati, Langi Pati dan Demang Angantaka yang banyak berjasa dalam menghancurkan keraton Plered. Sementara itu pasukan Kraeng Galengsung bergerak di Jawa Timur dengan mengambil pusat kedudukan di Bangil. Rupanya mereka telah membayangkan akan datangnya serangan balasan dari Mataram dengan bantuan Kumpeni.

Memang pada waktu itu sejak tercapainya perjanjian antara Amangkurat II dan Kumpeni, kedua-duanya telah mulai mempersiapkan pasukan-pasukannya untuk mengadakan serangan balasan. Pimpinan pasukan Kumpeni terdiri dari : Antoni Hurdt, Kapten Tack dan Kapten J.A. Sloot. Sedangkan pasukan Mataram langsung di bawah Amangkurat II.²⁰⁾

Perimbangan kekuatan Kumpeni dan Mataram jauh lebih besar daripada pasukan Trunajaya, namun pasukan ini dapat menyambut musuh yang datang dengan berani.

Kediri jatuh ke tangan Kumpeni, kemudian Trunajaya menyusun kekuatan bersama Kraeng Galengsung di Bangil. Pasukan gabungan sempat juga bertahan dari serangan musuh meskipun pada akhirnya benteng Bangil jatuh ke tangan Kumpeni. Trunajaya masih sempat lolos dari perangkap Kumpeni dan meneruskan perjuangannya di daerah pegunungan. Ini adalah satu-satunya yang dapat dilaksanakan dalam melawan musuh yang besar itu.

Daerah pegunungan yang dituju oleh Trunajaya adalah lereng Gunung Kelud. Untuk dapat mengakhiri perang di Jawa Timur ini, Kumpeni mendatangkan pasukan baru yang dipimpin oleh Aru Palaka. Pengikutnya, yaitu Kapten Jonker, mengejar Trunajaya.

Malang bagi Trunajaya, bahwa pasukan Kapten Jonker dapat menjumpai Trunajaya di lereng utara gunung Kelud. Ia mendapat kepungan rapat dari pasukan musuh, sehingga tak mungkin bergerak lagi.

Dalam keadaan sulit yang demikian itu, Trunajaya dengan pasukannya masih mencoba membebaskan diri, namun gagal.²¹⁾

Pada tanggal 25 Desember 1679 ia menyerah dan kemudian oleh Kumpeni diserahkan kepada Amangkurat II. Beberapa hari kemudian ia pun dihukum mati. Dengan demikian gugurlah Trunajaya dalam perjuangannya menentang kekuasaan penjajah, setelah menyusun taktik dan strategi perlawanan yang gigih.

3. Akibat Perlawanan

Sesungguhnya sebab-sebab rakyat daerah Pasuruan, Lumajang, Malang, senang sekali menerima kaum pelawan dan turut pula tiap kali berperang, melawan kaum penjajah (Belanda) belum diketahui secara pasti.

Keadaan yang demikian, terjadi pula sesudah Perang Trunajaya. Perang itu sendiri telah meluas meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Dengan susah payah perang tersebut dipadamkan oleh Mataram maupun Kumpeni. Bagi Mataram untuk penyelesaian Perang Trunajaya itu selain korban tentaranya, tetapi juga pengorbanan dalam bidang perekonomian, strategi militer, dan lain-lain.

Hal ini merupakan beban yang berat akibat perjanjian tahun 1677, antara Sunan Amangkurat I dan Belanda yang mengikatnya, sehingga memberikan keuntungan Belanda yang sangat besar. Lebih lagi dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Sunan Amangkurat II dengan Belanda. Perjanjian ini menyebutkan :

- a. Daerah antara Ujung Jawa Timur dan Karawang dimasukkan dalam pengawasan Kumpeni.
- b. Tanah-tanah sebelah timur Karawang, sampai sungai Pemanukan diberikan kepada Kumpeni.
- c. Pengakuan Sunan yang baru itu atas hutang Mataram, kepada Kumpeni sebanyak 250.000 real Spanyol,

3.000 koyan beras, bantuan 20.000 real tiap bulan untuk pengganti biaya perang, yang diperhitungkan mulai bulan Juli 1677.

- d. Kumpeni memegang monopoli impor kain cita dan candu di Jawa. ²²⁾

Sesungguhnya Amangkurat II benci terhadap orang Belanda, karena ia tidak suka menepati perjanjian yang dipaksakan Kumpeni.

Ia makin sadar akan bahaya Kumpeni, dan berusaha melepaskan Mataram dari pemindahan Belanda. ²³⁾

Tidak mengherankan kalau pusat perhatiannya ditujukan penuh kepada usaha melepaskan diri dari Belanda, antara lain menerima kehadiran Untung Surapati di Mataram.

Rupanya daerah Jawa Timur khususnya wilayah Pasuruan, Bangil, Malang, dan lain-lain di luar jangkauan Mataram. Keadaan yang demikian ini merupakan sebab-sebab daerah Pasuruan dan sekitarnya mendukung perjuangan Untung Surapati, karena menginginkan pemerintahan yang kuat dan berwibawa di wilayahnya.

B. PERLAWANAN UNTUNG SURAPATI

1. Latar Belakang

Kebencian Belanda terhadap Untung Surapati sudah dimulai sejak Untung Surapati melawan Laskar Belanda di Cikalong (Jawa Barat). Dengan peristiwa itu, kemudian ia dikejar-kejar pasukan Belanda.

Pada masa permulaan daerah Periangen merupakan basis perjuangan. Kemudian menuju ke Jawa Tengah karena mendengar Amangkurat II berselisih dengan Belanda. Tentu saja

kedatangan Untung Surapati di Kartasura diterima dengan baik oleh Raja Mataram tersebut, sehingga timbul "persekutuan".

Peristiwa kedatangan Kaptek Tack sebagai utusan Kumpeni untuk mengatur pembayaran hutang di Kartasura disambut dingin oleh Amangkurat II. Raja tidak mau bertemu dengan Tack, dan karena itu ia pergi ke luar kota. Pembesar-pembesar Mataram membantu Surapati, sehingga dalam pertempuran di Kartasura banyak serdadu Belanda yang mati, dan Tack sendiri dapat dibunuh.

Namun demikian setelah berunding dengan Mangkubumi kerajaan Mataram, yaitu Adipati Nerangkusuma dan atas saran bupati Surabaya, yaitu Adipati Jayanegara dan disetujui pula oleh bupati Pasuruan, Ranggajaya, maka diputuskan agar Untung Surapati dan pasukannya segera meninggalkan Kartasura dan langsung menuju ibukota Pasuruan. ²⁴⁾

Demikianlah, Untung Surapati dan pasukan-pasukannya menuju ke Jawa Timur dengan membawa bekal kemenangan dalam menentang penjajahan dan kekuasaan Kumpeni. Dengan kemenangannya itu kedudukan pasukan Untung Surapati bertambah kuat.

Jawa Timur, khususnya daerah Pasuruan akhirnya dijadikan basis kedudukan Untung Surapati. Letak daerah ini sangat strategis, tidak tertutup dari dunia luar dan tidak mudah dicapai musuh.

Selain itu daerah Pasuruan seolah-olah merupakan daerah tak bertuan, karena Mataram sejak pemerintahan Sunan Amangkurat II tidak memperhatikan daerah tersebut. Karena itu Pasuruan sering dipergunakan untuk menyingkir oleh orang-orang atau golongan-golongan, yang karena sesuatu sebab merasa tidak puas di negerinya sendiri atau karena bermusuhan dengan orang-orang Kumpeni Belanda.

Ranggajaya seorang bupati Pasuruan menyadari akan sulitnya menguasai ketertiban dan keamanan daerah kekuasaannya, maka diserahkan wilayah tersebut kepada Untung Surapati, dengan harapan daerah Pasuruan terbentuk menjadi sebuah daerah yang maju dengan pemerintahan yang teratur.²⁵⁾

Dengan segala pengalaman dan kekuatannya, maka Untung Surapati dapat menguasai daerah Madiun, Kediri, Malang, Bangil dan daerah Pasuruan sendiri. Sebagai penguasa baru daerah-daerah tersebut ia bergelar sebagai *Adipati Arya Wiranegara*.

2. Proses Perlawanan

a. Jalan Perlawanan dan Kepemimpinan

Dalam masa kekuasaannya di Pasuruan, Untung Surapati tidak banyak mengalami kesulitan karena penduduk Pasuruan, baik yang berada di pedalaman maupun yang tinggal di pesisir, semuanya menyambut kedatangannya dengan baik. Penduduk pedalaman yang masih tebal kepercayaan hidupnya, merasa ada ikatan batin dengan Untung Surapati yang diketahuinya berasal dari Bali. Sedang penduduk pesisir menggantungkan harapannya kepada penguasa baru Untung Surapati, akan terciptanya keamanan dan ketertiban di daerahnya dari gangguan bajak laut, yang selalu mengganggu kehidupan mereka.²⁶⁾

Dalam masa pemerintahannya, perhatian Untung Surapati ditujukan, terhadap :

1). Menyusun Angkatan Bersenjata

Dalam hal ini cara-cara modern menurut ukuran pada waktu itu yang dipergunakan untuk melatih anak buahnya.

Untung Surapati telah bertindak sebagai pemimpin sehingga dalam waktu yang singkat, telah memiliki sejumlah pasukan yang dapat diandalkan.

Berbeda dengan kerajaan Mataram yang biasanya mengerahkan petani untuk memanggul senjata bila terjadi peperangan, maka Untung Surapati mengadakan pembagian tugas di dalam masyarakatnya sesuai dengan kecakapan dalam bidang masing-masing. Karena kehidupan negara berdasarkan pada pertanian, maka Untung Surapati tidak mengikuti petani-petani secara langsung dalam bidang kemiliteran.²⁷⁾

Menyadari bahwa tombak dan keris atau pedang, tidak cukup untuk melawan orang-orang Kumpeni, maka diusahakan untuk memperoleh senapan-senapan dan meriam-meriam dari orang-orang lainnya, yaitu dari orang-orang Inggris yang juga merupakan musuh orang-orang Belanda waktu itu. Hal demikian ini atas jasa orang-orang Bugis, Makasar yang bergabung dalam pasukan Untung Surapati. Kemudian didirikan benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan yang kuat di beberapa tempat, seperti Kediri, Derma, pegunungan Penanggungan, Bangil, dan pantai-pantai yang diduga dapat dipergunakan sebagai tempat pendaratan pasukan-pasukan Kumpeni Belanda, dan sekutunya. Benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan itu dilengkapi dengan beberapa pucuk meriam. Di antara benteng pertahanan yang dibangun Untung Surapati itu benteng Bangil-lah yang terkuat dan tertangguh. Benteng Bangil itu letaknya di seberang sungai terusan di bagian selatan di pinggir kampung Kakapur. Kampung ini adalah bekas kubu pertahanan Kraeng Galengsung, seorang pahlawan Makasar yang membantu Trunajaya.²⁸⁾

Dalam kegiatan menyusun pertahanan pemerintahannya, Untung Surapati lebih banyak di daerah Bangil dan

Kediri daripada di Pasuruan. Karena itu untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Pasuruan telah dipercayakan dan diselenggarakan oleh ketiga puteranya, yaitu Raden Lembusura dan Raden Brahim.²⁹⁾

2). Pemerintahan dengan Cara Musyawarah

Untung Surapati mempunyai kekuatan multak di dalam pemerintahannya, namun tindakannya tidak sebagaimana seorang yang sangat berkuasa itu. Dalam memecahkan suatu persoalan, ia selalu merundingkan dengan orang-orang yang dianggapnya lebih tahu dalam bidangnya, atau kepada penasehat-penasehatnya, seperti Mangkubumi Nerangkusuma dan Kyai Ebum Jaladirdja. Demikian juga dalam mengambil suatu keputusan, Untung Surapati selalu memperhitungkan-nya. Telah diusahakan menghilangkan kesewenangan di antara sesama manusia. Di kalangan bawahannya terutama di kalangan pasukan-pasukan intinya, Untung Surapati selalu menumbuhkan sikap dan rasa percaya kepada diri sendiri.³⁰⁾

Jelaslah kiranya, bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya benar-benar telah melindungi kepentingan dan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Lebih lagi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama/kepercayaan, dan masalah-masalah kesenian yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, juga menjadi perhatian seperti pencak silat, sodoran, lempar tombak, panahan, dan lain-lain, karena jenis kesenian/seni bela diri ini dapat menambah kegesitan dan ketrampilan serta menamb-
bah sifat keperwiraan pasukan-pasukannya.³¹⁾

3). Hubungan dengan Luar Negeri

Jawa Timur, dengan Pasuruan sebagai ibukota kerajaan betul-betul mencapai puncak kejayaannya pada masa

pemerintahan Adipati Arya Wiranegara. Pantai-pantai Jawa Timur sebagian besar menjadi daerah Untung Surapati, bahkan Balambangan merupakan tempat yang penting, karena dari pantai inilah Untung Surapati mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Suatu ketika Untung Surapati pernah mengirim duta ke Muangthai. Dan dari pantai inilah orang-orang Makasar dan orang-orang Melayu datang ke daerah Untung Surapati, bahkan mereka ikut memperkuat pasukan Untung Surapati.³²⁾

b. Taktik dan Strategi Perlawanan

Selama kurang lebih 20 tahun lamanya, Untung Surapati memegang dan mengendalikan pemerintahan di daerah kekuasaannya. Selama itu pula ia menyadari akan timbulnya serangan Belanda, karenanya segala sesuatunya sudah dipersiapkan, khususnya kekuatan angkatan bersenjata. Masa yang 20 tahun itu berlangsung dari tahun 1686 sampai dengan tahun 1706, yaitu serangan Kumpeni yang merupakan saat yang ditunggu oleh Untung Surapati.

Menjelang tahun itu, di Batavia terjadilah penggantian pimpinan tertinggi dari Gubernur Jenderal J. Camphuys kepada Gubernur Jenderal Willem Van Outhoorn (1691 – 1704). Pada saat penyerbuan dilangsungkan ke Pasuruan, yang menjadi Gubernur Jenderal ialah Johan Van Hoorn (1704 – 1709), seorang pejabat yang masih muda (30 tahun) sangat gesit dan lincah.

Penyerangan terhadap kedudukan Untung Surapati, dilaksanakan dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada pada V O C dengan pengharapan segera selesailah persoalannya. Sebagian dari pasukan V O C itu menyerang melalui daerah Ponorogo, Madiun, Kertasana, dan terus ke Pasuruan dengan pimpinan Jurian Christaffol Roode (3 Sep-

tember 1706). Pasukan lain bertolak dari Surabaya dengan kekuatan yang besar serta dilengkapi dengan pasukan artileri berat. Pimpinan pasukan Belanda terdiri dari Kapten Zacharias Bintang, Kapten Van de Harst, dan lain-lain. Dari susunan pasukan yang mengikuti ekspedisi ini, jelas bahwa Kumpeni tidak menganggap ringan kekuatan Untung Surapati.

Benteng-benteng pasukan Untung Surapati yang terkenal dan dipertahankan dengan korban di kedua belah pihak, yaitu pegunungan Penanggungan, Derma, Bangil dan Pasuruan.³³⁾

Selain kuatnya pertahanan pasukan Untung Surapati, maka hambatan pasukan Belanda dalam melaksanakan serangan adalah hutan yang lebat, rawa-rawa, padang-padang gelagah, sungai, dan lain-lain. Rintangan alam seperti ini bagi pasukan Kumpeni kurang biasa, bahkan banyak di antaranya yang meninggal dunia, akibat malaria. Menjelang berakhirnya perlawanan pasukan Untung Surapati, maka dipertahankannya benteng di Bangil.

Pertempuran seorang lawan seorang yang terjadi dalam benteng ini berlangsung sangat seru, setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian oleh pasukan Untung Surapati, sehingga jatuh korban banyak sekali. Sebelum mencapai Bangil pasukan Kumpeni mendapatkan perlawanan di ladang-ladang dan persawahan. Dalam pertempuran di Bangil inilah, Untung Surapati mendapat luka-luka dan terpaksa diangkut ke garis belakang, ke Pasuruan.

Dengan jatuhnya benteng Bangil yang banyak memakan korban, baik yang mati maupun luka-luka atau sakit malaria, mengakibatkan ragu-ragu dan kecil hati di antara pimpinan pasukan Kumpeni. Dengan perhitungan, bahwa

menyerbu Pasuruan (ibukota) pastilah akan mendapat perlawanan lebih hebat, dan sudah dapat diduga, bahwa korban yang akan diderita lebih banyak lagi, maka sama sekali tidak ada niat bagi Kumpeni untuk meneruskan menyerbu Pasuruan.

Pasukan Untung Surapati, dapat menyimpan rahasia baik-baik tentang gugurnya pucuk pimpinannya. Hal itu baru diketahui Kumpeni, sesudah sebulan kemudian. Sedangkan rakyat Pasuruan tidak mempercayai sama sekali berita tersebut, sehingga tidak meredakan perlawanannya terhadap Belanda.³⁴⁾

Pasuruan mendapat serangan kembali pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1707 di bawah pimpinan Herman de Wilde. Pertempuran terjadi di Carat, dekat Kali Porong, setelah itu dekat Wangkal di daerah Tengger dan pada akhirnya di tanah datar Sangiri. Setelah terjadi pertempuran-pertempuran, didudukilah ibukota Pasuruan.³⁵⁾

Sementara itu putera-putera Untung Surapati bersama Adipati Anom (Sunan Mas) mengundurkan diri ke pegunungan sekitar Malang untuk melanjutkan perang. Perlawanan putera-putera Untung Surapati ini berlangsung bertahun-tahun lamanya dan dilanjutkan oleh cucu-cucunya.

Kepada Sunan Mas dijanjikan Kumpeni perlakuan yang baik, kalau ia menghentikan perlawanan dan datang ke daerah Kumpeni. Sunan Mas berangkat ke Batavia (1708), akan tetapi Kumpeni tidak menepati janjinya. Sunan Mas ditawan dan dibuang ke Sailan.

3. Akibat Perlawanan

Perlawanan putera-putera Untung Surapati yang berlangsung lama, meminta banyak korban di pihak Kumpeni.

Untuk mengatasi hal itu, Kumpeni kemudian mendirikan benteng-benteng di pelbagai tempat, yang sekaligus untuk mengurung pasukan-pasukan musuh. Benteng-benteng tersebut didirikan oleh Herman de Wilde, antara lain di tepi Kali Gembong, Kalianyer dan sebelah timur Pasuruan.³⁶⁾

Selanjutnya bagaimana usaha Kumpeni untuk membersihkan perjuangan keturunan Untung Surapati, dapat diutarakan sebagai berikut :

Di Surabaya, Gubernur dan *Sakebar* Kumpeni sedang mempelajari sejarah mengenai Surapati, mengenai pengiriman tentara Mataram untuk menyerang Batavia, mengenai pemberontakan Surabaya, penaklukan Banten, dan terutama mengenai bupati Malang yang sekarang. Panigro yang telah dipanggil kembali dari Lumajang, diberi tugas menyerbu Malang. Sekaligus ia harus membereskan Pangeran Singasari dari Lopura (yang juga dinamakan Pangeran Prabu) dan anaknya, Pangeran Mas dari Ngantang, dua tokoh yang seringkali merusak negara-negara sekelilingnya. Komandan Madura, Jandanil (Jan Daniel Gondelag), dan pasukannya akan membantunya. Jika Panigro berhasil, gubernur menjanjikan jabatan di Pasuruan bagi Jandanil dan di Solo bagi Panigro. Pasukan-pasukan Surabaya yang bakal ikut menyerbu, dipimpin oleh Jayadirana, putera Kasepuhan, dan Kartawijaya, patih Kanoman. Keberangkatan tentara berkuda itu yang membawa gajah-gajah juga, menjadi tontonan meriah bagi penduduk Surabaya yang melihat iringan-iringan mereka di jalanan kota.

Pasukan-pasukan berkumpul di desa Sompol, yang namanya dahulu Porong: Pasukan Surabaya datangnya dari Bangil, pasukan Madura dari Kamirahan, dan pasukan Panigro yang diiringi bupati Pasuruan Nitinegara dari Pasuruan. Panigro menjelaskan kepada mereka, bahwa sebagai langkah

pertama Kumpeni selalu mencoba membujuk musuh dengan baik-baik, karena kata ramah akan disambut dengan ramah. Tetapi yang pertama-tama harus dijaga, ialah jangan sampai maksud jahat Kumpeni ketahuan.

Malayakusuma, bupati Malang, tidak tunduk kepada raja-raja Jawa (di Mataram). Cucu Surapati itu datang dari keluarga prajurit yang selamanya melawan Kumpeni. Sebelum Malayakusuma, Malang dipimpin oleh saudara sulungnya, Wiraguna, yang sekarang sudah tiada. Adiknya, Tirtanegara, menjadi patih. Tetapi di antara mantrinya ada dua yang diam-diam telah mencari hubungan dengan Kumpeni. Malayakusuma yang menyadari bahwa Kumpeni dewasa itu sedang merupakan kekuatan yang paling besar, lebih besar bahkan dari raja-raja Jawa, menjawab undangan Panigro supaya datang sendiri untuk mengadakan perundingan, demikian: ia bersedia menyerahkan Malang selama ia sendiri tidak perlu bertemu muka dengan kumendan. Panigro kebingungan, tetapi untungnya datanglah perintah untuk menunda penyerbuan Malang. Gubernur Kumpeni bermaksud menghubungi dahulu raja Salakerta.

Sunan Salakerta keturunan Majapahit; ia merupakan angkatan kedelapan sesudah Senapati Mataram. Ia menguasai semua bupati Jawa, dan dihormati oleh Kumpeni Belanda yang siang malam menempatkan tiga ratus serdadu di kraton Sunan untuk menjaga. Gubernur Semarang yang selalu menekankan, bahwa segala tindak tanduknya dilakukan atas nama Sunan minta diberikan pasukan untuk mengepung Malang; ia juga minta ijin bagi pasukan Kumpeni, untuk menginjak bumi kepunyaan Salakerta. Sesudah utusan Gubernur mengundurkan diri, Sunan meninggalkan paseban dan menikmati tari-tarian di tengah-tengah selirnya. Sementara itu persiapan perang berlangsung di luar kraton di bawah pimpinan Tumenggung Patol dan Maesatankondur.

Gubernur Semarang memberitahukan kepada Surabaya, bahwa Sunan Salakerta telah menyerahkan kerajaannya kepada Kumpeni, dan bahwa Sunan selanjutnya memegang tampuk pemerintahan atas nama Kumpeni. Di Surabaya dikerahkan pasukan baru di bawah Kumendan Hunol (Haunod) yang akan menjaga di Jeramwangi, di kaki Gunung Ngantang, kalau-kalau musuh turun dari Ngantang. Kalau turunnyadari Malang, musuh itu menjadi urusan bupati Pranaraga. Bupati Pranaraga memimpin pasukan-pasukan yang dikumpulkan di sebelah timur Gunung Lawu dan yang berkemah di Kadhiri bersama tentara Kerajaan Tengah, yang payung ketumeng-gungannya sampai dua belas biji banyaknya.

Di Malang, Malayakusuma mengusir duta yang sudah lanjut usia, yang dikirim Gubernur Semarang untuk mengundang bupati Malang menunjukkan jalan kepada pasukan Kumpeni yang hendak menyerbu Ngantang, dan mengijinkan Kumpeni menduduki kota Malang dan desa-desanya. Sebaliknya, Malayakusuma mendengar nasehat seorang pertapa dari Gunung Mahameru yang menyuruhnya membubarkan pasukannya; meskipun begitu ia tetap waspada. Menurut rencana tempur yang disusunnya, pertempuran akan berlangsung di Kali Getih, tempat lapang yang baik untuk pertempuran berkuda. Patih Tirtanegara akan memimpin infantri.

Pasukan-pasukan Panigro meninggalkan Porong dalam dua bagian: yang pertama mengambil jalan timur, yang lain langsung ke Bedali. Rintangan-rintangan yang kedapatan dipasang di tempat penyeberangan Kali Surak, diratakan oleh mereka. Suatu pos penjagaan Malang yang tidak secepat itu mengharapkan kedatangan mereka, bubar. Tentara Panigro menyeberangi Kali Getih dan mengambil posisi di perladangan Songsong yang rata tanahnya. Mereka berkemah waktu malam tiba.

Tirtanegara yang paling dahulu meninggalkan Malang, sudah sampai di perladangan Mandaraka, dan Malayakusuma telah mengajak pasukannya ke dalam hutan rimba Singasari. Di bawah berondongan senjata api Kumpeni, prajurit-prajurit Malang yang berkuda turun dari atas gunung untuk berperang tanding dengan tombak. Tirtanegara masuk pertempuran tanpa tombak, hanya dengan busurnya sebagai senjata. Peluru-perluru mengoyak-ngoyak pakaiannya, tetapi orangnya sendiri rupanya tidak kena. Anaknya laki-laki satu satu-satunya yang baru berumur dua belas tahun, gugur. Tirtanegara sendiri pada akhirnya terpaksa mencebur masuk kali untuk menyelamatkan nyawa. Malayakusuma dan orang-orangnya mengamuk. Dari pasukan Kanoman Surabaya hanya tinggal tiga puluh orang; mereka telah ditinggalkan oleh tuan mereka, dan tidak lagi mempunyai senjata; maka mereka mengungsi ke tempat pasukan Kesepuhan Surabaya yang sampai saat itu bisa bertahan di bawah pimpinan Jayanegara yang gagah berani tetapi selalu awas dan arif bijaksana. Garis belakang kocar-kacir membuyar, dan mayat-mayat kuli pengangkut serta barang bawaan Kumpeni tersebar di mana-mana. Selain pertempuran besar ini, terjadi perkelahian kecil di sana-sini. Akhirnya, Kumpeni mengundurkan tentaranya ke atas Gunung Gelap: kerugiannya besar sekali, mimisnya habis. Kumpeni tidak berani lagi turun bertempur. Maka waktu malam tiba kedua belah pihak mendirikan perkemahan mereka masing-masing. Setelah Tirtanegara ditemukan kembali, orang Malang pulang masuk kota di malam hari bolong.

Karena Kumpeni sudah tidak mempunyai senjata lagi, ia minta bantuan kepada Surabaya. Di Surabaya, *Sakebar* sedang mengungkapkan rasa cemasnya kepada Panembahan Madura mengenai ekspedisi ke Malang dan juga mengenai kedua raja Jawa. Panembahan menenangkannya: ia menegaskan

tetap akan setia kepada Kumpeni, juga seandainya kedua raja Jawa itu membalik melawan Kumpeni. Candranegara dari Kasepuhan Surabaya sejiwa pernyataannya. Di luar loji meluas kabar mengenai kekalahan Kumpeni; rakyat Surabaya kebingungan. Akan tetapi sepucuk surat dari medan pertempuran memberi gambaran sesungguhnya. Condronegara yang tadinya sangat malu mendengar kabar seakan-akan anaknya, Jayanegara, telah lari meninggalkan medan laga, juga lega hatinya. Lalu Kumpeni mengirim pasukan dari Surabaya memenuhi permintaan Panigro. Pasukan ini diiringi pasukan Panigro sesudah Porong, karena jalan-jalan sedang dirusuhi orang Malang. Serdadu-serdadu Kanoman yang telah lari dari pertempuran, dikumpulkan lagi dan dibawa kembali ke medan perang.

Karena ingat ketidak mampuan Surapati dahulu dalam menghadapi Kumpeni, maka kaum wanita keluarga Malayakusuma menasehatkan supaya mereka mengungsi saja. Tetapi Malayakusuma yakin, bahwa Kumpeni tak berdaya, dan tidak akan berani menjejarnya. Saat itu dinyatakan dengan candrasengkala, yaitu tahun 1693 (1767 AD). Malayakusuma mengambil putusan untuk melancarkan serangan bersama Pangeran Prabu dari Lopura dan Raden Mas dari Ngantang, yang disertai pasukan berkuda mereka, sekumpulan orang buronan bersenjatakan tombak. Malayakusuma salah sangka, waktu dikiranya bahwa tentara Kumpeni tidak akan berku- tik; setelah tujuh hari tak beranjak dari gunung Gelap, mereka turun ke perladangan tempat berkumpulnya pasukan-pasukan Malang, Lopura dan Ngantang. Pertempuran terjadi, lama sekali dan melelahkan, tetapi tak ada yang menang atau yang kalah. Dalam suatu amukan mendadak, orang Malang maju untuk mengundurkan teman-teman mereka yang gugur atau luka. Malayakusuma yang bukan main capainya, mene-

rima sekapur sirih dari bibir Pangeran Prabu untuk memulihkan kesegaran badannya. Bersama kapur sirih itu, ia menerima kabar, bahwa Raden Mas sedang bertempur di Songsong. Ia mengusulkan senjata kepada musuh, dan masing-masing pihak mundurlah. Raden Mas memang telah menghadang pasukan Kanoman yang baru dibawa kembali dari Surabaya ke medan perang. Ia mengancam akan merebut loji Pasuruan. Marah-marah, komendan Panigro bersiap-siap hendak menyerbu Malang esok harinya.

Malayakusuma merasa kurang kuat menghadapi seorang diri serangan Kumpeni yang kelihatannya bukannya berkurang, malahan bertambah banyak. Maka dimintanya bantuan kepada Pangeran Prabu yang sebagai imbalan minta kota Malang dan pernyataan takluk dari Malayakusuma. Sebagai jawaban, Malayakusuma membakar rumah dan panen. Panigro melihat kepulan asap arah ke Malang. Maka dipercepatnya jalan pasukannya. Kota ditemukannya sudah kosong. Panigro menyuruh bangunkan sebuah loji di pinggir air. Mantri Malang banyak yang datang menyerahkan diri, tetapi pemimpin-pemimpin besar Malang tak ditemukan, meskipun setiap hari patroli menjelajahi daerah itu.

Tentara Panigro hendak menyerbu Ngantang; mereka beristirahat di Batu, sedangkan sebagian mendekati benteng musuh yang bertengger di puncak Gunung Rajegwesi dan dikelilingi jurang-jurang. Serangannya berlangsung di bawah hujan batu karang yang digelundungkan orang Ngantang, dari bentengnya dan yang menyebabkan banyak orang jatuh korban. Beberapa adegan dilukiskan oleh Pujangga Babad. Ketika hujan peluru mereka pun tidak menghalau musuh yang terus merayap ke atas, orang Ngantang mengungsi bersama bupati mereka. Tentara Panigro masuk Ngantang yang sudah dikosongkan itu lewat jalan lain yang lebih gampang ditempuh.

Tanpa memberi keterangan lebih lanjut, pujangga menceriterakan, bahwa pada tahun 1662 (1737 AD) Ngantang untuk pertama kalinya merupakan tempat pengungsian satria pemberontak. Sekarang Kumpeni menyuruh bangunkan sebuah loji di pinggir kali. Di Ngantang, sekali lagi ditetapkan tanggungjawab masing-masing pihak: di daerah Malang, Panigrolah yang harus membereskan musuh; di luar Malang tentara Kasunanan yang sedang berkemah di Kedhirilah yang akan menanganinya.

Malayakusuma tidak terbujuk untuk mencari perlindungan kepada Sultan Mataram. Jadinya ia naik lebih tinggi ke atas gunung.

Raden Mas dari Ngantang dikabarkan berada di hutan rimba Selagurit. Sunan dahulu telah memerintahkan supaya Raden Mas diselesaikan riwayatnya sekalipun ia masih termasuk keluarga. Maka Patrol, pemimpin tentara Kasunanan, minta kehormatan untuk menangkap Raden Mas. Ketika membuyarkan sebuah patroli dari Selagurit, Patrol menyamakan dirinya dengan Pangeran Mangkunegara. Tetapi ia masuk perangkap dan mendapat luka. Raden Mas terpaksa meninggalkan bentengnya. Patrol yang meninggal dunia, dikuburkan di Kadhiri. Sala diberitahukan mengenai kematiannya, Malang mengenai larinya Raden Mas ke daerah itu.

Maka pasukan-pasukan Kumpeni meninggalkan Malang hendak mencari Malayakusuma. Mereka memergoki patrolinya; jadi perkemahan Malayakusuma tidak bisa jauh dari tempat itu. Malayakusuma memang sudah bermarkas di hutan rimba Wanalapa. Ia menyingkirkan kaum wanita ke Pesisir, ke tempat keluarga. Malayakusuma sendiri, bersama Raden Mas, melancarkan serangan terhadap Kumpeni tetapi kalah. Kumpeni melemparkan granat-granat ke tengah-tengah barisannya yang berebutan hendak memungut benda-

benda yang tak mereka kenal itu. Granat-granat meletus melukai banyak orang Malayakusuma. Pasukannya buyar dibekali Kumpeni. Kartawijaya, patih Kanoman, mengusulkan untuk melanjutkan pengejaran malayakusuma yang sudah pasti akan lari ke Lopura, tempat Pangeran Prabu. Tetapi Jayanegara dari Kasepuhan tidak setuju, karena pasukan lelah sekali dan tidak membawa bekal. Maka pulanglah mereka ke Malang.

Pangeran Prabu habis menyergapi Bangil dan Pasuruan, dan menimbulkan banyak kerusakan. Di persimpangan jalan di kaki Gunung Garibig, bekas tapal kudanya masih baru menuju ke selatan. Tetapi mereka tak bisa disusul. Ada suatu pasukan Pangeran Prabu yang tidak bisa maju cepat karena membawa perempuan-perempuan yang dilarikan waktu perampokan mereka. Satuan itu diserang mantri-mantri Malang yang belum lama tunduk kepada Kumpeni. Mereka memotong telinga orang-orang yang terbunuh sebagai tanda bukti penyergapan mereka untuk komendan Kumpeni. Lopura juga sudah kosong. Pangeran Prabu mungkin sudah mengungsi ke Lodhaya, dan Malayakusuma ke bukit barisan Kendheng yang sukar dijelajahi. Dari pengikut mereka banyak yang sudah kecapaian, lalu meninggalkan pemimpin mereka. Adapun Kumpeni mendorong para petani mengerjakan kembali sawahnya dan keluar dari hutan rimba.³⁷⁾

C. GERAKAN SOSIAL

1. Gerakan Melawan Pemerasan

a. Latar Belakang

Proses pengaruh pemerintah Kolonial selama abad ke-19, dan awal abad ke-20 terhadap kehidupan rakyat amat

besar dan berat. Ketentuan-ketentuan yang membawa akibat buruk terhadap kehidupan rakyat, dapat dipulangkan kembali atas kebijaksanaan pemerintah sendiri. Sudah semestinya rangkaian kebijaksanaan itu, apabila diambil pangkalnya mulai semenjak berakhirnya Perang Dipanegara dan akibat peristiwa-peristiwa yang timbul kemudian. Pemerintah kolonial selalu berusaha mencari dan mendapatkan keuntungan, serta sumber keuntungan baru. Suatu penguasaan yang berhasil mengontrol segala segi kehidupan masyarakat dengan melalui lembaga-lembaga baru, yang diciptakan dan tampaknya hal yang sangat baru bagi masyarakat. Keadaan itu terang sekali meskipun bukan menghapuskan lembaga tradisional yang sudah lama, tetapi akan jelas dapat mengurangi kelestarian legalisasinya, bahkan tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu tidak dapat disangsikan lagi, bahwa dominasi Barat beserta perubahan sosial yang mengikutinya menciptakan kondisi-kondisi baru yang penuh kecenderungan bagi rakyat untuk mengadakan pergerakan sosial.³⁸⁾

Praktek pengenalan secara tidak kompromis yang serba barat tidak dengan disertai pendekatan yang baik, menciptakan akibat baru di dalam masyarakat terutama di pedesaan. Tempat inilah sebagai landasan keuntungan bagi negara yang bersifat agraris, seperti Indonesia. Bagi pemerintah kolonial kesemua tindakannya yang berhubungan dengan ide kolonial untuk mewujudkan dominasinya di segala bidang. Hal serupa itu tidak dapat dibantah lagi dalam kondisi masyarakat kolonial. Dominasi di dalam bidang ekonomi, di bidang politik dan di bidang kultural yang berada di satu genggam, yaitu pemerintah kolonial yang sedang berkuasa. Akibatnya membawa pengaruh baru dengan timbulnya desorganisasi di tengah-tengah masyarakat tradisional. Semakin kuatnya pemerintah yang sedang berkuasa tersebut memegang dominasi di segala bidang, menyebabkan semakin amat lemah dan

tidak ada fungsinya lagi peranan lembaga-lembaga tradisional. Dan lama kelamaan tidak dapat dipertahankan lagi adanya desorganisasi di lembaga-lembaga tradisional yang sudah lama ditaati. Dengan masuknya ekonomi keuangan, faktor-faktor produksi baru, seperti pemilikan tanah, pemilikan tenaga buruh, adanya tenaga buruh sendiri, yang hidup dari upahan dan hasil bumi untuk konsumsi perdagangan, pelaksanaan sistem perpajakan, semua sistem itu bukannya membawa kesejahteraan rakyat tetapi justru sebaliknya. Melalui subordinasi ekonomi pemerintah kolonial membuka lapangan kerja baru dan pengerahan tenaga rakyat dengan demikian kondisi kerja rakyat akan tergantung pada pihak penguasa.

Kepesatan perkembangan ekonomi internasional dengan mengambil pusat di Eropa Barat, terang mempengaruhi pula perkembangan ekonomi Barat yang sedang diterapkan di negara jajahan. Di Indonesia sendiri proses ekonomi Barat sedang dilaksanakan, tiada lepas dari pengaruh ekonomi internasional tersebut. Karena itu dengan melalui peningkatan proses ekonomi Barat itu untuk dapat segera memenuhi permintaan para konsumen yang terdapat di pasaran internasional, pemerintah lebih banyak menekankan industri perdagangan. Kecuali itu untuk memperlancar transportasi, sarana penting yang tidak dapat ditinggalkan, dibuka dan diperluas dengan sedemikian itu alat-alat komunikasi tidak dapat ditinggalkan, mendapat perhatian serta prioritasnya pula. Adanya perkembangan perdagangan dan industri pertanian yang terpadu dengan rapinya, menimbulkan deferensiasi struktural di dalam masyarakat Indonesia, sehingga ada peranan sosial baru yang dapat diperoleh dengan jalan lain dari pada peranan tradisional. ³⁹⁾

Sudah barang tentu tidak hanya terbatas di bidang ekonomi saja penanganannya, untuk memperlancar usahanya

terjalin pula dengan penggarapan di bidang administrasi. Lewat sarana itu jelas dengan mudah sekali akan terjangkau segala yang diharapkan yaitu penguasaan seluruh kehidupan rakyat Indonesia.

Penetrasi semakin dalam melalui administrasi kolonial dengan semua jalan ditempuh untuk melegalisasikan segala tindakannya, sudah sepantasnya kalau penerapan dilakukan secara paksa, administrasi kolonial itu mendesak lembaga-lembaga politik tradisional. Proses pemerkosaan itu tidak dapat disangkal lagi akan muncul gejala baru di dalam masyarakat pedesaan. Hal serupa itu pun sama sekali di luar jangkauan pemerintah dan yang segera akan mengatasi. Karena itu tidak dapat dihindari adanya ketegangan baru sehingga bentrokan pun selalu akan terjadi. Ketidak-stabilan hidup terutama di daerah pedesaan yang agraris dan religius sebagai akibat langsung semakin meluasnya dan mendalamnya penetrasi sistem administrasi kolonial yang bersifat legal rasional. Sedangkan sistem administrasi tradisional yang sudah lama berjalan dan ditaati dirasakan semakin terdesak oleh administrasi kolonial, tiada terkecuali pula peranan para penguasanya. Birokrasi baru yang bercorak barat dan modern sedikit demi sedikit memaksa dan mendesak untuk menggantikan tata kehidupan birokrasi yang sudah lama dijalankan oleh para penguasa tradisional. Dan akhirnya mereka kemudian hanya menjadi seperangkat birokrasi yang taat menjalankan apa yang telah diatur oleh pemerintah kolonial. Pada saat itulah disadari atau tidak, mereka telah kehilangan peranan yang penting sebagai seorang administrator, bersamaan itu pula mereka telah kehilangan pula perannya sebagai seorang yang mempunyai inisiatif dan sekaligus lenyap pula peran inovatornya, yang sudah lama dipegangnya dan dijiwainya.

Terjalin dengan rapi adanya hubungan antara bidang politik dengan tata birokrasi baru luas dan mendalam, dalam hal ini terutama sekali idea baru tentang kehidupan sosial yang sedang ditrapkan. Akibat baru terjadi di dalam masyarakat benar-benar dirasakan, yaitu memperlemah ikatan susunan tradisional yang telah lama hidup. Desintegrasi kemudian tidak dapat lagi ditahan, melanda di antara mereka, di dalam situasi yang sangat meresahkan, tidak dapat disangkal mereka berusaha memperoleh *survival* dengan segala jalan akan ditempuh. Sasaran utama yang telah duduk di dalam staf pemerintahan paling dekat dengan rakyat atau mereka, yaitu orang-orang asing yang memiliki tanah-tanah luas di mana rakyat berada di wilayahnya. Karena secara realitas mereka itu yang selalu berhadapan secara langsung dan menurut anggapannya mereka itulah yang merampas semua bidang kehidupannya.

Selama periode abad ke-19, dan awal abad ke-20 sasaran gerakan sosial dengan segala bentuk perwujudannya dan perkembangannya memperoleh tempat yang pantas. Selama itu aksi-aksi gerakan yang dilancarkan meliputi gerakan melawan keadaan atau peraturan yang sangat dirasakan tidak adil. Sudah barang tentu dorongan utama dari aksi-aksi yang dilancarkan itu jelas adanya perasaan dendam terhadap penyebab kondisi sosial ekonomi mereka yang kurang sesuai dengan tuntutan hidup.

b. Jalan Perlawanan

Pada umumnya di daerah Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa, kaum petani sebagai lapisan masyarakat terbawah di dalam stratifikasi sosial masyarakat penajahan. Dengan demikian secara realitas mereka mempunyai jumlah terbesar dan menjadi tulang punggung

kehidupan di negara jajahan. Pada dasarnya kaum petani menempati tanah yang bukan menjadi miliknya sendiri, bahkan sebagian besar mereka mendiami tanah milik negara, dan sebagian lagi dalam jumlah yang tidak besar ada yang mendiami tanah-tanah partikelir atau *particuliere landerijen*. Di daerah yang terakhir itu acapkali terjadi agitasi yang sasarannya bukan hanya pemilik tanah, tetapi juga pemerintah.

Kerusuhan yang terjadi di daerah di mana tanah partikelir berada akibat adanya perasaan ketidak-adilan yang dipadukan dengan pemungutan pajak yang tinggi dan ketentuan-ketentuan pelayanan kerja yang berat terhadap kaum petani di pedesaan. Itulah sebabnya kerusuhan yang terjadi itu disebut kerusuhan *cuke*, sesuai dengan nama yang menjadikan sebab peristiwa itu, yaitu jenis pungutan pajak. Kenyataannya peristiwa terjadi di pelbagai tanah partikelir di Jawa Timur, kecuali memperlihatkan ciri-ciri umum sebagai pergerakan sosial juga mengandung ciri-ciri yang lain, yaitu gerakan keagamaan. Akan tetapi peristiwa yang terjadi di tanah-tanah partikelir kebanyakan menunjukkan pula sifat yang lebih keras lagi, sebab didukung perasaan dendam. ⁴⁰⁾

Ciri keagamaan dimiliki pada pergerakan itu, tampak tujuannya yang bersifat milenaristis atau mesianistis. ⁴¹⁾ Oleh sebab itu adanya harapan yang milenaristis itu, maka kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir dapat dianggap sebagai contoh pergolakan yang dijiwai oleh semangat keagamaan. ⁴²⁾

Tidak mengherankan sekali kalau aksi pemberontakannya itu senantiasa mengundang perasaan simpati dari mereka khususnya yang sealaran. Sedangkan adanya perasaan dendam frustrasi, hal itu sebenarnya sudah lama mereka tanggung, bahkan mengakar di dalam sanubari mereka, sejalan dengan

perkembangan tanah partikelir itu sendiri. Dengan demikian kerusakan yang terjadi di tanah tersebut tidak hanya bersifat sporadis, tetapi juga menunjukkan sebagai pemberontakan yang teratur. Walaupun tindakannya yang terakhir itu tergantung dari inisiatif pemimpinnya yang tidak jarang dianggap sebagai orang keramat, mempunyai kekuasaan *supernatural* seperti membuat pelbagai jimat.⁴³⁾

Anggapan serupa itu melanda hampir di seluruh daerah pedesaan yang tengah mengalami desintegrasi akibat penetrasi Barat.

Sehubungan dengan perkembangan tanah partikelir yang acapkali terjadi kerusakan-kerusakan itu, khususnya di daerah Jawa Timur, pada umumnya tiada jauh berbeda dengan tanah-tanah partikelir di daerah Jawa yang lain. Pada umumnya tanah-tanah partikelir terjadi akibat adanya praktek penjualan tanah oleh pemerintah kepada orang-orang lain. Kejadian semacam itu kelihatan semenjak jaman VOC berkuasa sampai abad ke-19. Selain praktek penjualan tanah, masih ada lain lagi, yaitu tanah itu diberikan atau dihadiahkan kepada orang-orang yang bertanggungjawab atas keamanan daerah, seperti yang terjadi di Batavia, ada juga yang diberikan kepada pribumi. Pemilik tanah biasa untuk orang asing disebut tuan tanah, biasanya memiliki tanah yang luas, mencakup pula di dalamnya semua penduduknya. Tujuan menguasai tanah tersebut bagi orang-orang asing untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi bagi pribumi selain mencari keuntungan, juga merupakan prestise di mata rakyat sekitarnya. Tentu saja untuk memperoleh keuntungan atas peilikan tanah itu ada bermacam-macam cara yang ditempuh oleh para tuan tanah, seperti menarik hasil secara langsung, mengumpulkan uang sewa dan bagian panen, ada juga yang memungut pajak beserta pengerahan tenaga kerja dari petani-

petani yang mendiami tanah tersebut. Untuk memperlancar eksploitasi kekayaannya itu para tuan tanah mengangkat pegawai administrasi pengawas dan pemungut pajak. Mereka itulah yang selalu berhadapan dengan para penggarap tanahnya dengan rajin, mereka menunaikan tugas yang dibebankan oleh pemilik tanah, seringkali karena terlalu taatnya kepada tugas tindakannya berlebihan, bahkan menjurus kekerasan. Selain padi para tuan tanah juga mengusahakan tanahnya untuk ditanami tanaman yang menghasilkan bahan ekspor seperti kopi, teh atau coklat. ⁴⁴⁾

Pada saat itu keuntungan tuan tanah dengan menggarap tanahnya kepada petani sudah tinggi, sedangkan beban kewajiban kepada Pemerintah tidak ditanggungnya, tetapi dilimpahkan kepada para penggarap. Biasanya para penggarap boleh dikata tidak tetap, merupakan sewaan dan segala tentang hidupnya tergantung pada tuan tanah. Mereka berkewajiban membayar cuke, pajak atau *contingent* kepada pemerintah. Mengenai jumlah besar atau kecilnya cuke atau pajak ditetapkan dalam suatu periode yang lamanya antara lima sampai sepuluh tahun. Untuk memberi kepastian tersebut, mereka mengadakan suatu perjanjian dengan tuan tanah dan kepala desanya. Sewaktu padi sedang menguning pada saat itulah yang baik untuk mengadakan penetapan jumlah besar kecilnya yang harus diserahkan oleh para petani, untuk memenuhi keharusan pembayaran *pajeg*. Kenyataannya bukan itu saja, yang lain masih ada lagi beban yang harus dilaksanakan, ialah menjalankan kerja paksa, atau *kompenian*. Kerja paksa itu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, lima hari lamanya dalam satu bulan dijalankan oleh para petani sebagai ganti kerja pada pemerintah. Pelayanan kerja lainnya yang harus dipikul, ialah *garol*, tiap tiga hari selama dalam satu bulan, *kroyo* keharusan kerja bagi

setiap orang laki-laki yang masih kuat dan tugas *kemit*, kewajiban yang harus dilaksanakan ronda pada malam hari.⁴⁵⁾

Semua itu merupakan bentuk kewajiban yang harus ditanggung tidak dengan jaminan tertentu, seandainya mengalami kegagalan panennya atau sedang tertimpa musibah, seperti terlanda bencana alam, dan lain-lainnya. Bahkan tidak dapat dihilangkan mereka selalu dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh tuan tanah. Tuntutan pengerahan tenaga kerja paksa dan diusirnya bilamana mereka tidak dapat membayar, atau memenuhi pekerjaan yang diminta. Dengan demikian besar sekali kekuasaan tuan tanah kepada para petani, boleh dikata tanpa ada batasnya. Kepala desa semestinya melindungi setiap bentuk penekanan, pada saat itu tidak dapat berbuat banyak, justru sebaliknya dia sendiri berdiri di pihak tuan tanah. Oleh karena pengangkatannya pun biasanya selalu memperoleh persetujuan dari tuan tanah, sehingga sudah pantas apabila penindasan dalam segala bentuk selalu ada.

Pergolakan selalu terjadi di tanah partikelir sebagai akibat langsung dan sangat kompleks tersebut. Bukan suatu kebetulan, jika suasana yang tegang sering kali mendapat pengaruh dari organisasi politik yang sedang bergerak mencari pengaruh seperti Serikat Islam. Akibatnya bentuk pergolakan dapat mengalami perubahan, kemungkinan terjadi adanya pemusatan kekuatan dan sasarannya menjadi tajam, yaitu pengusiran terhadap pemilik tanah. Namun juga tidak tertutup kemungkinan masuknya idea-idea keagamaan yang lain, seperti perang jihad menyusup ke dalamnya, kenyataan itu jelas telah mematangkan situasi dan menumbuhkan semangat perjuangan.

c. Kepemimpinan dan Akibat Perlawanan.

Pemberontakan yang terjadi di daerah lain di Jawa, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah telah memperlihatkan

tindakan semacam itu. Akan tetapi di daerah Surabaya, peristiwa yang telah terjadi menunjukkan perbedaan meskipun kenyataannya tiada terlepas dari ikatan penjajahan. Peristiwa yang terjadi di tanah-tanah partikelir di Surabaya sekitar tahun 1915, memperlihatkan ciri yang khas, menonjolkan sifat radikal atau bahkan revolusioner.⁴⁶⁾ Sifat diperagakan radikal revolusioner oleh orang-orang Surabaya, atau mereka yang tinggal di kota ini, terutama yang terkena peraturan terlalu berlebihan, bahkan menjurus ke sifat heroisme. Karena itu penghancuran total milik tuan tanah yang dianggap tidak kompromis, dan selalu mendorong segala tindakannya.

Agitasi Serikat Islam agaknya mempengaruhi juga peristiwa yang terjadi di Surabaya, indoktrinasi yang dihembuskan dapat termakan oleh rakyat, sehingga tampak radikal dalam segala tindakannya. Ide baru mengenai tanah milik petani dihembuskan pula kepada kaum petani, karena itu tidak perlu membayar pajak atau sewa untuk tanah yang mereka tanami, atau mereka diami dan tidak perlu melakukan pelayanan kerja.⁴⁷⁾

Salah seorang penghasut, bernama Sadikin dengan bersemangat, telah mempengaruhi kaum petani agar bangkit melawan tuan tanah. Ia menganjurkan agar rakyat menolak melakukan kompenian, membayar sewa atau cuke. Untuk memperkuat tuntutan para petani melakukan berbagai ancaman, intimidasi dan rintangan.⁴⁸⁾

Berkat adanya agitasi dari Sadikin itulah, kaum petani berani bertindak, karena mereka merasa benar dan mendapat dukungan. Penolakan kerja paksa yang mereka lancarkan, kemudian disertai tanpa minta ijin menunaikan padi, menebang kayu, mendirikan rumah atau mulai mengerjakan tanah. Benar-benar terjadi di daerah ini adanya keberanian untuk

mengabaikan sama sekali hak-hak yang dimiliki tuan tanah dan kewajibannya, sebagai penggarap tanah.

Akibat adanya agitasi dari Sadikin, membuahkan kerusuhan di berbagai tempat di Surabaya. Tempat-tempat itu terutama di tanah partikelir, seperti di Keputran Kidul, Keputran Lor, Sawahan, Bagong, Kedunganyar, Kembang Kuning, Grudo, dan sebagainya. Peristiwa itu menimbulkan kegoncangan dan gangguan ketentraman, serta dapat meluas ke berbagai daerah di Jawa Timur ini. Di Surabaya rakyat petani itu langsung berhadapan dengan masalah penguasaan tanah dan menjawabnya dengan menggabungkan diri ke dalam pergerakan serta merebut tanah dari tuan-tuan tanah mereka.⁴⁹⁾

Kerusuhan yang diangkittkannya mempunyai sasaran pasti, yaitu berusaha mengakhiri kehidupannya yang buruk. Karena itu dalam aksi-aksi tindakannya jauh dari tanda-tanda ide agama. Jadi faktor ekonomilah yang mereka jadikan alasan utama. Akan tetapi di daerah di luar Surabaya, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh ide keagamaan bahkan merupakan gerakan yang mesianistis lebih kuat.

2. Gerakan Ratu Adil

a. Latar Belakang

Di dalam menghadapi pengaruh penetrasi kebudayaan Barat, yang mempunyai sifat agresif dan destruktif, masyarakat pedesaan mempunyai cara-cara sendiri untuk mempertahankan diri dan kemudian mengadakan reaksi. Perasaan tidak puas dan tidak senang terhadap pemerintah jajahan memang tidak diberi wadah atau lembaga sendiri, sebagai tempat penyaluran keinginannya. Sehubungan dengan itu, jalan yang paling pendek untuk ditempuh oleh mereka, ialah membentuk gerakan sosial sebagai wujud dari tindakan protes

sosial. Acapkali bentuk perwujudan yang selalu diperagakan berupa aksi protes sosial dan senantiasa pula mendapat dukungan dari mereka yang merasa tertekan. Kecuali itu aksi serupa itu, selalu diperkuat oleh perasaan keagamaan, akhirnya gerakan itu berubah bentuk menjadi gerakan sosial politik.

Kekuatan baru yang timbul dari kepercayaan religius dari masyarakat yang sudah lama berakar di dalam tradisi rakyat, bangkit pula menentang bahaya ekspansi kolonial. Harapan baru muncul di masyarakat yang sedang mengalami situasi demikian itu akan datangnya mesias atau Ratu Adil. Dia itulah yang menjadi tempat tumpuan, dan diharapkan dapat memberi pertolongan mengatasi masa-masa yang sangat buruk itu. Konsepsi tentang dapat terwujudnya kembali suatu masyarakat lama yang murni, dan belum pernah sama sekali kena pengaruh Barat atau modern. Datangnya kembali jaman keemasan, tersedia apa yang menjadi keinginannya dan di mana Sang Ratu Adil sedang bertahta, senantiasa menjadi impiannya. Kenyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan gerakan protes yang bersifat radikal revolusioner. Tindakan yang selalu dilancarkan melalui protes sosial dengan disertai kekerasan, seperti pemberontakan, pasti mendapat dukungannya dan aksi-aksi itu selalu dibenarkan.

Sudah sepantasnya, apabila semua aksi yang diperbuat itu merupakan tindakan spontan, dan ditunjang oleh suatu organisasi yang sangat sederhana. Bentuk serupa itu dianggap sangat arkais sifatnya.⁵⁰⁾ Karena selain organisasinya juga programnya, strateginya dan taktik perjuangannya, masih sangat sederhana, tentu saja apabila dibandingkan dengan gerakan sosial yang modern. Kelanjutan dari perjuangannya yang dilancarkan tidak dapat bertahan lama, sewaktu meng-

hadapi kekuatan militer kolonial. Hal semacam itu dapat dimaklumi, selain adanya perbedaan yang jauh dalam bidang persenjataan juga dalam bidang organisasi. Akibatnya gerakan semacam itu sangat pendek umurnya, dan kebanyakan aksi yang dilancarkan berada di suatu tempat yang sangat jauh dari kota besar, tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan daerah lain.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda semua aksi gerakan sosial serupa itu, banyak dilancarkan bukan hanya di daerah Jawa Timur saja, melainkan di daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat pun juga ada. Dengan demikian aksi tindakannya pada umumnya termasuk dalam katagori gangguan keamanan, ketentraman, kerusuhan atau gerakan rokhani.⁵¹⁾

Bertolak dari kenyataan itu, menyebabkan aksi tindakannya tidak termasuk dalam perang besar, sehingga bila dibandingkan sangat jauh berbeda selain sifatnya yang masih tradisional, arah tujuannya pun masih menunjukkan ketidak-tentuan. Tidak tampak konsepsi apa yang akan dilaksanakan untuk membentuk tata kehidupan di dalam masyarakat seandainya dapat tercapai tujuannya. Dengan demikian terang adanya gambaran yang kabur lebih-lebih dari para pengikutnya, akibatnya hanya membawa kefatalan belaka. Pada masa itu di dalam lingkungan masyarakat yang masih dijiwai semangat yang bercorak sosio-kultural dan religius, sehingga loyalitas dan sentimen pokok, tidak lain kecuali sentimen agama. Oleh sebab itu timbulnya reaksi yang dilancarkan terhadap semakin meluasnya penetrasi Barat, yang hakekatnya adalah bersifat religius.

Di daerah Jawa Timur yang agraris, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hidup sebagai petani, mereka itulah yang secara langsung terkena modernisasi Barat. Ka-

rena itu kebangkitan yang mereka tegakkan mempunyai sasaran langsung, yaitu orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, terutama mereka yang langsung berhadapan dengan rakyat.

b. Jalan Perlawanan

Suatu gerakan sosial yang segera mendapat perhatian dari pemerintah, karena menimbulkan keribuan dan ketegangan di berbagai daerah di Jawa Timur, menampakkan bentuknya yang sangat mesianistis. Gerakan ini pun merupakan gerakan tradisional dan mempunyai tujuan, yang jelas untuk mendirikan suatu pemerintahan yang adil, bijaksana dan dalam situasi yang penuh ketentraman. Tidak seperti apa yang pernah dihayati pada masa itu, di mana ketidak-adilan, pemerintahan yang tidak memperhatikan kehidupan rakyat, dan semua keuntungan berada di pihak pemerintah. Pemerintah yang ada pada saat itu harus dilenyapkan, dan diganti oleh pemerintahan baru. Pemerintahan baru ini dipimpin oleh seorang Ratu Adil. Gerakan Ratu Adil dipimpin oleh seorang yang telah menerima wahyu, atau bersandar pada segi-segi gaib.⁵²⁾

Di Jawa Timur, gerakan Ratu Adil tumbuh di berbagai daerah seperti di Ponorogo, Gedangan-Sidoarjo, Bendungan Berbek Kediri, dan lain-lainnya. Gerakan itu timbul di sebuah desa dan kemudian diikuti oleh sejumlah pengikut yang setia. Tokohnya, seperti disebut di atas seseorang yang pernah memperoleh wahyu atau *pulung*, menamakan diri sebagai seorang pemimpin agama, nabi, dan juru selamat. Tidak mengherankan, apabila dalam waktu singkat diikuti sejumlah orang, yang umumnya mereka menginginkan adanya perubahan hidup yang lebih baik. Dalam segala hal gerakan mesianistis itu, selalu menunjukkan sifat revolusioner.

Perubahan tata kehidupan yang baik, merupakan tujuan utamanya, oleh karena itu gerakannya menghendaki munculnya suatu *milentum*, yaitu harapan terhadap datangnya jaman keemasan. Di dalam suatu itu masyarakat merasa penuh ketentraman, ketenangan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Harapan yang mesinaistis muncul di masyarakat yang sedang menghadapi peningkatan dan perluasan ekonomi Barat. Karena itu kehidupan kembali dari harapan yang mesianistis, acapkali disertai dengan kehidupan keagamaan, nativisme atau milenarianisme. Berbagai tindakan menunjukkan diri di berbagai tempat di Jawa Timur, dengan waktu munculnya yang berbeda-beda. Gerakan tradisional dengan aksi-aksi tindakannya itu selalu menimbulkan kegoncangan, sering sekali gerakannya itu sejalan dengan gerakan nasionalisme, yang sedang berkembang. Terutama dalam awal abad ke-20.

Adanya sifat keagamaan dari gerakan protes tradisional, karena pada hakekatnya di dalam masyarakat tradisional, terutama yang berada di pedalaman yang sangat religius hidupnya, mengadakan reaksi adanya perubahan sosial..

Tindakan itu timbul semata-mata karena adanya perubahan yang tidak membawa diferensiasi di antara berbagai segi kehidupan. Akibatnya gerakan-gerakan agama cenderung untuk menjadi revolusioner, bertujuan untuk mengadakan perubahan secara mutlak dan radikal. ⁵³⁾

Gerakan itu tidak mau menerima tata masyarakat yang ada dewasa itu, sehingga harus bertindak dengan kekerasan dan menjurus ke arah penghancuran. Dalam hal ini penyebab utama, adalah orang-orang Eropa yang dianggap kafir, kepada mereka itulah yang harus dihilangkan, demikian juga pemerintahnya. Peristiwa semacam itu telah ditonjolkan da-

lam peristiwa seperti di Patik Ponorogo pada tahun 1885, peristiwa di Gedangan-Sidoarjo pada tahun 1904, dan peristiwa di Dermajaya pada tahun 1907.

Unsur-unsur nativistis dalam gerakan sosial, ialah kehidupan kembali mitos-mitos lama atau kerinduan terwujudnya kembali jaman keemasan pada masa silam. Kerinduan terhadap kembalinya jaman keemasan yang mistis, sedang rakyat melahirkan rasa dendamnya, terhadap pemerintah asing. Kenyataan itu tidak dapat dipisahkan, bahkan menimbulkan ramalan mesianistis, dan harapan akan datangnya Ratu Adil.

Akan tetapi harapan-harapan senantiasa memuat suatu diagnosa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, yang telah rusak serta mencekik penduduk pedesaan. ⁵⁴⁾

Gerakan sosial itu mempunyai tujuan pokok, mengadakan perubahan kehidupan masyarakat secara mutlak dan radikal. Boleh dikatakan gerakan itu mempunyai tujuan yang praktis mengenai kehidupan masa itu, tanpa memberi gambaran pada masa akhir. Hanya sebagian besar gerakan mesianistis di Jawa Timur, tumbuh di tengah rakyat pedesaan telah bercampur dengan kepercayaan keagamaan. Oleh sebab itu tidak sedikit gerakan itu menyandarkan pada perkumpulan-perkumpulan agama seperti sofi. ⁵⁵⁾

Dengan demikian sering tampak tujuan akhir dari manusia, adanya ide perang jihad turut mewarnai pula, melalui janji-janji, bahwa meninggal di Jalan Allah akan mengalami kehidupan yang bahagia di kelak kemudian, apabila sudah sampai di alam baka.

Wadah baru mulai tampak dengan sifat agresif, setelah mendapat pengaruh dari agama Islam. Karena para penganut agama Islam mulai merasakan semakin kuatnya pengaruh pe-

netrasi Barat dalam segala bidang kehidupan. Anti pemerintah tidak berbeda pula dengan anti Belanda, yang dianggap kafir. Oleh sebab itu sikap permusuhan menempati prioritas utama. Sikap itu kadang-kadang sangat meluap-luap akhirnya dapat berbuah perlawanan menentang pemerintah yang ada. Kekuatan perlawanan yang terpadu dalam lingkungan masyarakat Islam berpusat dalam lembaga-lembaga seperti dalam pesantren, tarekat, dan tidak dapat dipisahkan adanya ide perang jihad atau perang sabil.⁵⁶⁾

Pimpinan agama sangat penting kedudukannya. Dialah yang memegang kepemimpinan. Lebih-lebih pimpinan agama yang kharismatis, yang telah lama mencari kesaktian dengan jalan menyepi. Dialah yang menjadi tempat tumpuan harapan bagi para pengikutnya.

Sementara itu agama Islam yang dianut oleh rakyat pedesaan, telah tercampur dengan unsur mistik, kekuatan magis dan adat kebiasaan lain. Meskipun terpengaruh bermacam-macam unsur tersebut, agama Islam tetap menunjukkan dominasinya. Fungsi pesantren yang banyak di Jawa Timur, selain sebagai lembaga pendidikan, juga wadah untuk mendidik kader-kader memimpin agama. Di Jawa Timur banyak lembaga pendidikan ini, seperti di Sidoarjo (Surabaya), Tambak Beras, Rejoso (Jombang), Gontor (Ponorogo), Termas (Pacitan), Jempes (Kediri), Bendo (Kediri), Pelangitan (Babat), Bangkalan (Bangkalan Madura), Siwalan Panji (Sidoarjo).⁵⁷⁾

Pimpinan agama merasa terpanggil sebagai pimpinan mesianistik, akibat terdesak pengaruhnya di lingkungan masyarakat oleh penetrasi Barat. Semakin mundur kedudukan elite agama semakin besar rasa bencinya terhadap pemerintah jajahan. Perlawanan-perlawanan mesianistik di Jawa Timur meletus di berbagai daerah, tujuannya untuk mem-

perbaiki tata kehidupan masyarakat. Tindakannya terjaln dalam bentuk harapannya akan kedatangan Ratu Adil dan Imam Mahdi. Ratu Adil merupakan mitos yang melekat di pikiran masyarakat pedesaan, yang juga dikenal dengan Erucakra.⁵⁸⁾ Menurut gambarannya tokoh itu akan bertah-ta pada tahun 1900 (tahun Caka), di Ketangga, dengan bala tentaranya berupa hantu dan binatang berbisa.⁵⁹⁾

Sedang tradisi Imam Mahdi, juga menyebutkan tentang akan terjadinya hari terakhir, atau hari kiamat yang dida-hului dengan kehancuran dunia ini. Penderitaan dan pe-nindasan akan diakhiri dengan datangnya Imam Mahdi. Impian itu tergambar dalam pikirannya tidak dapat dipisah-kan dengan situasi yang sedang berkembang pada saat itu, yaitu peningkatan penjajahan kolonial Belanda. Aksi-aksi protes sosial meletus di berbagai daerah dengan pemerintah jajahan yang menjadi sasarannya.

c. Kepemimpinan dan Akibat Perlawanan

Peristiwa yang terjadi di Ponorogo tidak terpisah dari rangkaian peristiwa itu. Kejadian itu meletus pada tahun 1885, kira-kira seratus orang petani di desa Patik Kawedanan Pulung, Kabupaten Ponorogo, berkumpul di Lurah Patik. Mereka membicarakan masalah kenaikan pajak, rapat dipim-pin seorang carik dan dua priyayi, bekas pegawai pemerintah. Dalam kebulatan kata mereka setuju mengangkat Carik Patik sebagai Ratu Adil, yang akan bertindak menghapuskan pajak. Jelas sekali mereka tidak mengakui lagi pemerintah, berarti mereka melawan pemerintah. Dengan dipimpin Ratu Adil dan dua priyayi, serombongan orang-orang mendatangi rumah Wedana Pulung untuk diajaknya bersama-sama dengan mereka itu, termasuk Bupati Ponorogo melawan pemerintah asing.

Gerakan tersebut tidak bermaksud mengganggu keselamatan para priyayi yang bekerja pada pemerintah Hindia Belanda. Gerakan hanya merencanakan membunuh semua orang Belanda setempat dan menghapuskan pajak. 60)

Akhirnya mereka yang hanya bersenjatakan keris, tom-bak, dan lain-lain senjata tajam, dapat dihancurkan oleh sepasukan pemerintah. Sudah barang tentu dalam peristiwa itu banyak membawa korban, terutama di pihak rakyat.

Peningkatan kekuatan terjadi pula di dalam tahun 1903, dilakukan oleh seorang Kyai dari desa Samentara, kabupaten Sidoarjo, bernama Kasan Mukmin dengan para pengikutnya. Setelah Kyai itu menerima wahyu, dia mengaku penjelmaan Imam Mahdi yang akan mendirikan kerajaan baru di Pulau Jawa. Dalam suatu khotbahnya Kyai Kasan Mukmin dari Samentara, Gedangan itu mengumumkan kalau perang jihad tidak lama lagi akan terjadi melawan pemerintah. Pada kesempatan lain, Kyai itu telah membagikan jimat kepada para pengikutnya, dikatakan bahwa jimat itu bertuah dapat menyembuhkan orang sakit, keselamatan dan kekebalan.

Kyai Kasan Mukmin yang mempunyai latar belakang pendidikan agama Islam, telah berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh agama di Jawa Timur. Pesantren yang dikunjungi antara lain Pesantren Tiren dan Plotegan, keduanya di Mojokerto, dan pesantren Sidoresmo, Surabaya.

Akhirnya berkat pendidikan itu namanya sejajar dengan Kyai Haji Idris (Mojokerto), Kyai Ngabduliusul (Krapyak) dan lain-lainnya. Dengan bertemunya para Kyai itu bersepakat, mereka mengharapkan kedatangan Imam Mahdi, semenjak itu Kyai Kasan Mukmin menobatkan dirinya sebagai Imam Mahdi, para pengikutnya pun dengan senang hati mengikutinya dan mendukung apa yang direncanakan, yaitu melawan pemerintah Belanda. Berkali-kali diadakan perte-

muhan di desa-desa Damarsi, Kurek, Wagir, dan Keboanpasar. Di desa yang terakhir itu dipilih sebagai tempat pemusatan kekuatan, dari tempat ini mulai mengadakan aksi-aksi, pertama-tama mengancam setiap orang yang menolak mengikuti ajakannya. Perlawanannya akan dimulai pada hari Minggu Legi, 29 Mei atau tanggal 14 Maulud, tetapi diajukan pada tanggal 27 tepat pada hari Grebeg Maulud hari Jum'at Wage.

Tokoh-tokoh yang ada di belakang perlawanan ini di antaranya Kyai Wagir, Haji Abdulgani dan Pak Rupiyah menantu Kyai Kasan Mukmin, disertai kira-kira sejumlah seratus orang menuju Keboanpasar.

Mendengar ada pemusatan kekuatan di desa tersebut, bupati Sidoarjo dengan dikawal oleh sepasukan polisi sebelum sampai di desa Keboanpasar, bertemu dengan seorang yang telah berhasil lolos dari penangkapan gerombolan. Dari keterangannya kalau wedana dan lurah Gedangan telah berhasil ditawan. Sewaktu rombongan bupati datang di tempat pemberontak, mereka disambut dengan acungan senjata, pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Akhirnya korban berjatuhan, termasuk Kyai Kasan Mukmin dan 40 orang, 20 luka-luka, serta 83 tertawan, sedang orang-orang yang dicuri-gai ditangkap juga.⁶¹⁾

Hanya dalam waktu sehari, pemberontakan itu dapat ditumpas. Walaupun demikian untuk sementara waktu lamanya peristiwa tersebut menghantui para pegawai pamongpraja dan orang-orang Belanda, yang menurut beritanya mereka itu menjadi sasarannya.

Peristiwa semacam itu terjadi pula di Karesidenan Kediri, yaitu di sebuah desa Bendungan, Kawedanan Berbek. Tokohnya bernama Dermojoyo, seorang petani kaya yang memiliki tanah seluas 30 bahu, ladang tujuh bahu, sejumlah

ternak, dua perangkat gamelan, seperangkat wayang, gerobag dan tempat pandai besi. ⁶²⁾

Dermojoyo berasal dari desa Gebog dekat Kudus, sewaktu kecil bernama Bagus Talban. Hidup dengan ibu dan ayah tirinya bernama Trunodiko. Banyak ceritera mengenai Bagus Talban ketika masih kecil, diceriterakan kalau ada seorang pekerja pabrik melihat sinar yang keluar dari tubuh anak itu, ibunya juga melihat kalau di biliknya terang pada suatu malam, walau tanpa memakai lampu. Pada waktu besar, Bagus Talban menjadi seorang santri dan mengunjungi berbagai pesantren, guru-gurunya yang mempengaruhinya antara lain Haji Sanap, Haji Dulkamid, Kyai Bardogi, Haji Dulwahab, Haji Sayang dan Haji Muhammad Umar, seorang guru di pesantren Sidoresmo, Surabaya. ⁶³⁾

Dari semua gurunya itu yang besar pengaruhnya terhadap pikiran Bagus Talban, ialah ajaran Kyai Kasan Besari. Dari dialah diperolehnya tentang mistik, ramalan Jayabaya, harapan kedatangan Ratu Adil dan memperoleh pusaka Rajamuka. Kemudian setelah besar berganti nama menjadi Dermajaya, dan mendiami di sebuah daerah yang dikenal namanya Bendungan dengan membuka tanah pertanian serta menjadi orang kaya.

Dermajaya selain seorang petani yang kaya, juga seorang dukun, seorang penasihat pertanian dan seorang guru ilmu (mistik). Kepandaiannya yang amat luas itu menyebabkan dia disegani dan dihormati, bukan hanya kaum tani di sekelilingnya, tetapi juga kaum priyayi.

Dalam tahun 1896 gagal mencalonkan menjadi kepala desa, karena kegagalannya berusaha menyuap Wedana Warujayeng agar diadakan ulang pemilihan lurah. Dia juga terlibat penjualan kayu jati gelap. ⁶⁴⁾

Sebagai seorang berpengaruh di masyarakat, sudah selayaknya apabila Dermajaya mempunyai empat orang isteri. Dari perkawinannya Dermajaya mempunyai sembilan belas anak. Peranannya dalam politik sewaktu mengalami kegagalan dalam pemilihan lurah atau kepala desa, kemudian mencita-citakan menjadi seorang RatuAdil. Cita-cita itu baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari 1907, atau tanggal 23 bulan Besar. Dengan segala kepandaiannya, dia selalu meyakinkan para pengikutnya akan keberhasilannya untuk memperbaiki keadaan. Usahnya dengan mengambil contoh Togog dan Semar, yang akan datang di dunia ini untuk membebaskan rakyat dari segala penderitaan. Dua tokoh Punakawan dari dunia pewayangan dengan membawa air suci, yang disebut *Tirta Wilayat* yang dapat menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Percaya akan kenyataan itu, Dermajaya beserta pengikutnya mulai mengadakan pemusatan kekuatan, kemudian menyerang pemerintah.

Pada tanggal 29 Januari 1907, Bupati Nganjuk dengan sepasukan polisi mengepung desa Bendungan. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan, banyak korban berjatuhan termasuk wedana Berbek, pada sore harinya pertempuran timbul lagi, setelah datangnya bala bantuan militer dari Surabaya. Akhirnya Dermajaya terbunuh bersama anak dan para pengikutnya, kesemuanya ada 18 orang. Sedangkan yang luka-luka ada sembilan orang, yang tertawan ada 49 orang. ⁶⁵⁾

Dari semua peristiwa yang terjadi tersebut di Jawa Timur, benar-benar kalau kebulatan keberanian didorong oleh kemiskinan, penderitaan dan rasa tidak puas, akibat penjajahan. Selain itu adanya ketaatan rakyat kepada seseorang yang dapat dianggap penyelamat dan memberi kesejahteraan. Karena itu orang yang mendapat wahyu, atau yang kemu-

dian menamakan diri sebagai Ratu Adil atau Imam Mahdi menjadi tempat tumpuannya, tertarik kepandaianya dan timbul ketaatannya apa pun akan mengikutinya demi tujuan tercapai, meskipun melawan pemerintah.

3. Gerakan Sekte Agama

a. Latar Belakang

Selain mesianisme yang berkembang selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, masih ada lagi suatu pertumbuhan yang lain sifatnya. Pertumbuhan itu membentuk sekte-sekte keagamaan dengan agama Islam menjadi landasannya, dan timbul sebagai jawaban terhadap peningkatan pengaruh penjajahan. Di dalamnya terdapat bermacam-macam kepercayaan dan pandangan, baik tingkat kepercayaan Islam yang ortodok, maupun yang telah mendapat kepercayaan mistik atau kepercayaan lain yang bertentangan dengan agama Islam. Kalau dalam gerakan mesianisme memperoleh kekuatan dengan mendasarkan basisnya di kalangan kaum tani, sektaris pun memperoleh kekuatannya dari kalangan petani juga. Kesemuanya berdiri di hadapan pemerintah dengan sikap menentang dan memberontak. Tindakannya mewujudkan suatu protes kekerasan dari situasi politik yang secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun semua kejadian yang timbul di Jawa Timur hanya berlangsung dalam masa yang cukup singkat, kenyataannya membuktikan kalau adanya suatu kebulatan tekad melawan penjajahan.

Lahirnya gerakan milenaristis atau pun sektaris tidak dapat dipisahkan dengan peranan pemimpin yang pada masa itu sebagai tali pengikat masanya. Di sini peranan pemimpin rakyat mempunyai arti penting, sebab kepadanya lah menjadi tumpuannya. Pimpinan-pimpinan kharismatis tidak terpisah

dari kedudukannya, seperti sering diperagakan oleh guru agama, haji, kyai dan ahli agama. Dengan demikian kelihatan adanya hubungan erat antara seorang guru atau pemimpin dengan murid atau yang dipimpin dan yang tidak dapat dipisahkan adanya ikatan keagamaan.

Sekte-sekte keagamaan pada saat pertumbuhannya menjadi wadah bagi mereka yang merasa tiada puas dengan kenyataan hidup. Di dalam situasi sosial ekonomi masyarakat yang rusak akibat penjajahan, pemusatan kekuatan menjadi wadahnya untuk menjawab terhadap tantangan yang ada.

Dilihat dari realitas kehidupan dalam masyarakat didapatkan adanya demoralisasi dan desorganisasi sebagai akibat langsung westernisasi. Itulah sebabnya sekte menjadi tempat yang mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga sangat besar pengaruhnya. Bagi rakyat yang sedang mengalami keresahan dan perasaan tidak puas terhadap kenyataan hidup, ajaran-ajaran yang serba bersifat rahasia hidup sangat menarik perhatiannya. Gerakan sekte telah memberikan suatu sistem kepercayaan yang bulat beserta kepemimpinannya terhadap mereka-mereka yang sedang tergoncang dari pegangan kehidupan tradisionalnya. ⁶⁶⁾

b. Kepemimpinan dan Strategi Perlawanan

Seperti gerakan mesianisme, gerakan sekte mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat, terutama lapisan bawah. Sedang pimpinan keagamaan yang menjadi tempat bertumpu mereka terdiri dari elite agama. Pimpinan agama semacam itu pada umumnya ada di luar pemerintah, merasa pengaruh Barat semakin mendalam sedikit demi sedikit mendesak peranan agama Islam. Pemimpin agama merupakan pemimpin tradisional dan mempunyai sifat kharisma yang

sangat kuat, seperti yang tertuang dalam pesantren dan tarekat. ⁶⁷⁾

Dapat dimengerti kalau sistem kepemimpinan serupa itu dapat bertahan selama bertahun-tahun, karena selain tokoh-tokohnya meyakinkan, dihormati juga karena sudah melembaga di dalam masyarakat. Ketahanan sistem ini, antara lain terletak pada daya tarik pribadi dari satu tokoh sentral yang selain mempunyai pengetahuan agama yang mendalam, juga memiliki sifat-sifat mulia, taqwa, soleh, luhur, bijaksana, bahkan dikramatkan oleh masyarakat. ⁶⁸⁾

Pemimpin yang memiliki sifat kharismatis sedemikian itu tidak selalu memencilkan diri dari masyarakat, tetapi justru mendekat kepada rakyat, dan mempunyai cita-cita yang sama dengan kaum petani. Kenyataan serupa itu tidak dapat ditutupi oleh apa pun, semakin dalam mendekat kepada rakyat, semakin banyak alat komunikasinya dengan rakyat pedesaan. Melalui pesantren dan juga acapkali melalui tarekatnya kyai dapat mengadakan kontrol pada masyarakat desa dengan demikian secara mudah dapat mengarahkan petani. ⁶⁹⁾

Lewat kenyataan itu telah memperlihatkan di berbagai tempat di Jawa Timur, di mana seorang kyai atau ulama mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat sebagai lawan elite yang birokrasi dari pemerintah kolonial.

Dalam hal ini menurut penilaian masyarakat, kedudukan Kyai atau Ulama mempunyai kadar tersendiri, disebabkan ketinggian ilmu agama dan akhlakunya. Otoritas kharismatisnya dapat menjangkau luas, diakui bukan hanya murid-muridnya tetapi juga oleh masyarakat luas. Otoritas kyai sebagai guru tarikat sangat tinggi, juga karena hubungan erat antara guru dan murid berdasarkan *baiyat*, bahkan tidak sedikit di antaranya yang dihormati sebagai seorang kramat atau wali Allah. ⁷⁰⁾

Adanya otoritas kharismatis yang dimiliki oleh pemimpin agama atau elite religius dipandang sebagai *counter elite*, secara potensial merupakan ancaman terhadap kekuasaan kolonial yang sedang dibangunnya. Karena itu tempat-tempat di mana lembaga tradisional berada selalu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. *Haji-phobi* atau *Islamphobi* pemerintah kolonial, bukan tidak beralasan mengingat sebagian huru-hara, gegeran, rusuh atau pemberontakan di daerah pedesaan dipimpin oleh elite religius itu. ⁷¹⁾

Maka dari itu segala bentuk pemusatan kekuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di daerah Jawa Timur semakin tampak. Aksi-aksi semacam itu terang menimbulkan kekhawatiran pemerintah, sehingga untuk jangan sampai bertindak lebih jauh dan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, maka selama abad ke-19 dan 20, perlu mengadakan pengawasan. ⁷²⁾

Walaupun ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah, perkembangan sekte dengan tarekat dan pesantren tetap menarik serta mendapat perhatian dari rakyat. Sebab bagi rakyat yang sedang mengalami penekanan dan penderitaan dari pemerintah, pimpinan keagamaan dianggap memperjuangkan hak-hak mereka. Di dalam keadaan sosial ekonomi yang rusak gerakan simpati dari kaum tani. Ajakan kembali melalui perbaikan serta kehidupan beragama dipandang satu-satunya jalan untuk menahan erosi kepercayaan.

Banyaknya sekte yang tumbuh berkembang di Jawa Timur hidupnya banyak berdampingan dengan lembaga pendidikan agama Islam, seperti pesantren dan perkembangannya pun bukan hanya disebabkan oleh kemunduran kehidupan sosial ekonomi, tetapi juga oleh pengaruh kebudayaan Jawa. Oleh sebab itu dalam perkembangan hidupnya sekte cenderung ke arah mistik.

Berpijak dari kenyataan itu sekte-sekte yang sedang berkembang di dalamnya, selalu mengandung unsur pertentangan yang bersifat ganda. Di satu pihak pertentangan antara sekte-sekte dengan elite agama, di pihak lain sekte-sekte juga harus bertentangan dengan pemerintah kolonial dan elite birokrasi.⁷³⁾

Pertentangan antara sekte dengan elite agama, sebenarnya kejadiannya tidak begitu tampak dengan jelas di tengah-tengah masyarakat. Pangkal pertentangan di antara keduanya, ialah usaha mereka saling mencari dan mendapatkan pengaruh dari rakyat, demikian pula antara para pengikutnya. Meskipun keduanya tumbuh menyandarkan pada agama Islam, sekte-sekte kenyataannya mempunyai pengaruh yang lebih luas dan memikat rakyatnya terutama lapisan bawah. Tidak mustahil kalau perkembangan sekte-sekte secara tidak langsung berusaha menyaingi dan mendesak pengaruh elite agama di masyarakat.

Perluasan pengaruh Barat dengan melalui lembaga-lembaga pemerintah kolonial, bukan membawa kemajuan bagi rakyat, tetapi justru sebaliknya. Pemerintah yang kafir dalam segala tindakannya selalu menghambat dan menekan agama Islam. Oleh karena itu sikap kebencian dan permusuhan yang dilancarkan gerakan sekta tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan kolonial, tetapi juga sikap seperti itu ditumpahkan pula kepada para pegawai yang duduk dalam birokrasi kolonial. Tidak terkecuali pula agama yang sedang dianut oleh orang-orang asing, khususnya orang-orang Belanda yang dicap kafir, dan perlu sekali disingkirkan dari muka bumi ini. Kebencian kepada pemerintah kolonial dan orang-orang Belanda, para priyayi sebagai agen pemerintah, serta elite agama mempunyai landasan tersendiri bagi kaum petani di pedesaan.

Dengan melalui penghimpunan kekuatan secara kongkrit dan agama Islam menjadi dasarnya untuk menahan perkembangan westernisasi. Melalui gerakan tarikat upacara keagamaan dihidupkan lagi, upacara-upacara yang mistik, dan menolak tata kehidupan yang baru terutama yang berbau Barat. Kebencian dan perasaan dendam terhadap penguasa dan agama bangsa lain, serta para agennya semakin besar dirasakan pada waktu itu mendapatkan tempatnya, yaitu di tarekat.

Seperti disebutkan di atas, bahwa gerakan tarekat yang merupakan protes sosial berkembangnya, berdampingan dengan lembaga pendidikan. Sebab lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, selain tempat untuk mendidik para santri, tentang agama Islam juga merupakan tempat penggemblengan kader-kader bangsa. Terutama sekali sewaktu Sarikat Islam melebarkan pengaruhnya, pesantren dan tarekat menjadi tempat yang baik untuk menanamkan idenya.

D. SARIKAT ISLAM

1. Latar Belakang

Selama abad ke-19 dan abad ke-20 di Indonesia terus menerus timbul pemberontakan, kerusuhan, kegaduhan, brandalan, dan lain sebagainya, yang semuanya itu cukup menggoncangkan masyarakat dan pemerintah kolonial Belanda. Pergolakan itu timbul sebagai suatu ledakan dari ketegangan, permusuhan, atau pertentangan yang terdapat di dalam masyarakat pedesaan.⁷⁴⁾

Dominasi ekonomi, politik dan kultur yang terjadi pada masa kolonial, telah mengakibatkan timbulnya deorganisasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya.

Dengan dimasukkannya sistem ekonomi keuangan, telah memungkinkan bagi pelaksanaan sistem pemajakan, peningkatan perdagangan hasil bumi, timbulnya buruh upahan, dan masalah pemilikan dan penggarapan tanah.

Lahirnya Sarikat Islam, memberikan semangat semacam sarana bagi para petani untuk menyalurkan potensi kekuatan mereka melalui ideologi, kepemimpinan, organisasi, dan lambang-lambang yang diciptakannya. Gerakan petani mengalami proses politikasi dengan tujuan ideologi, kepemimpinan, strategi mulai diarahkan kepada perubahan sosial ekonomis dalam masyarakat bukan lagi dalam bentuk tujuan mesianistik. Ideologi Sarikat Islam, dirumuskan atas faktor-faktor sosial ekonomi dan politik yang menyadarkan para petani, tentang situasi sosial yang melingkupinya.⁷⁵⁾

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam hal perhubungan antara penguasa dan yang dikuasai dilandasi oleh prinsip rasial. Pada masa-masa tersebut orang Cina menduduki peranan yang penting. Peranan orang Cina di Hindia Belanda dalam bidang perdagangan perantara semakin berkembang dan pemerintah kolonial Belanda, sangat memerlukan tenaganya untuk mempertahankan monopoli perdagangannya, maka dari itu pada permulaan abad ke-20, golongan Cina telah menduduki status sosial sebagai golongan menengah. Golongan Cina mendapatkan monopoli perdagangan dari pemerintah kolonial Belanda.

Dengan mendapatkan monopoli perdagangan, semakin kuatlah kedudukan golongan Cina, sedangkan pedagang Indonesia semakin terdesak. Keadaan sosial yang demikian akan dihancurkan oleh Sarikat Islam.⁷⁶⁾

Pergolakan masyarakat pedesaan selain ditujukan kepada orang-orang Cina, juga karena adanya sistem pemilikan tanah partikular. Pada umumnya hampir semua kerusakan

yang terjadi di tanah partikular merupakan akibat dari adanya pungutan pajak yang tinggi, dan tuntutan pelayanan kerja yang berat terhadap kaum petani. ⁷⁷⁾

Tanah partikular, timbul sebagai akibat dari praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda semenjak permulaan jaman VOC sampai perempatan pertama abad ke-19. Tuan tanah yang menguasai tanah partikular memiliki hak untuk menguasai penduduk yang hidup di atas tanah tersebut, dan menuntut penyerahan tenaga beserta hasil tanahnya, bahkan dapat meminta apa saja yang mereka kehendaki. Tindakan sewenang-wenang tuan tanah ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para petani, akhirnya meletus dalam bentuk kerusuhan.

Pergolakan semakin menjadi umum dan mendalam, dengan berkembangnya Sarikat Islam yang telah memperkuat rasa dendam penduduk di tanah partikular. Selain rasa dendam yang dibangkitkan oleh masalah penggunaan tanah masih terdapat rasa dendam lain yang tercermin dalam agitasinya yang tajam, seperti pemerintahan kafir telah membawa penderitaan dan kesengsaraan rakyat; air telah menjadi kotor, karena terkena air yang dipergunakan untuk mempermandikan orang-orang Kristen; tanah dan buruh telah diperas untuk kepentingan perusahaan asing; pegawai dikatakan telah melakukan pencemaran tempat-tempat suci dengan mengadakan pembongkaran makam-makam keramat; tindakan sewenang-wenang dari pegawai lokal. ⁷⁸⁾

Sarikat Islam bertujuan memajukan kehidupan agama Islam, sehingga peranan pesantren dan guru atau ulama sangat penting. Pesantren merupakan lembaga penting dalam pembentukan pola kehidupan sosial, budaya, dan agama bagi penduduk kaum muslimin. Tarekat mempunyai peranan yang kuat bagi gerakan kebangkitan kembali agama. Dengan

adanya penetrasi Barat yang semakin mendalam melalui perluasan penempatan pegawai Pangreh Praja, pemerintah kolonial dapat membuat jalan raya, untuk penetrasinya ke daerah pedesaan, maka para pemimpin agama mulai menggerakkan pesantren dan tarekat dalam gerakan pemberontakan untuk melawan Belanda atas dasar landasan politik dan agama.

Dalam bidang politik, Sarikat Islam memperjuangkan masalah bersarikat dan berkumpul, serta masalah perwakilan rakyat. Sarikat Islam bertujuan memperoleh hak sebagai manusia dan mendapat tempat untuk ikut campur, dalam soal-soal pemerintahan. Dengan dapat ikut campurnya dalam soal-soal pemerintahan Sarikat Islam dapat menyampaikan apa-apa keberatan yang dirasakan oleh rakyat, dan beberapa peraturan yang tidak baik oleh rakyat.

Gerakan kebangsaan terutama yang mengambil sikap kooperasi maupun non kooperasi semuanya memperjuangkan kebebasan, terutama dalam hal bersarikat dan berkumpul. Dalam hal perwakilan rakyat Sarikat Islam menuntut tersusunya suatu parlemen yang dipilih di antara dan oleh rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuhnya, dan dibangunkan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen tersebut.⁷⁹⁾

Dengan adanya perlawanan-perlawanan yang bersifat sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan ini, maka sedikit demi sedikit mengalami suatu perubahan, meskipun belum tercapai seperti yang diinginkan.

2. Proses perlawanan

Dengan adanya penjajahan Belanda di Indonesia, timbulah beberapa perubahan keadaan sosial ekonomi, politik, dan budaya. Di bidang sosial ekonomi berakibat semakin lemahnya kedudukan orang-orang Bumiputera. Kekuasaan

kepala-kepala Bumiputera, lama kelamaan lenyap dan dide-sak kedudukannya oleh orang-orang asing.

Keadaan demikian sedikit banyak menimbulkan kegon-cangan, kegaduhan dalam kehidupan masyarakat Bumiputera. Khususnya dalam bidang pertanian, baik yang menyangkut tanah maupun tenaga kerja diatur menurut sistem kolonial. Para petani diberi tugas mengolah sebagian tanahnya, untuk ditanami dengan tanaman ekspor dan harus menyumbang-kan tenaga kerjanya secara paksa kepada penguasa koloni-al.⁸⁰⁾

Di bidang perdagangan pada masa kolonial Belanda pe-ranan orang Cina semakin berkembang. Pemerintah kolo-nial Belanda sangat memerlukan tenaganya untuk memper-tahankan monopoli perdagangannya. Maka pada permulaan abad ke-20 golongan Cina telah dapat menduduki status so-sial sebagai golongan menengah. Dengan mendapatkan mo-nopoli perdagangan semakin kuatlah kedudukan orang Cina, sedangkan para pedagang Indonesia semakin terdesak.

Di bidang politik kekuasaan orang-orang Indonesia se-makin tidak berarti, kekuasaannya terdesak oleh kekuasaan asing, sehingga tidak dapat menentukan sendiri. Di bidang budaya dengan adanya hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dengan orang-orang Bumiputera secara perlahan-lahan pasti akan terpengaruh juga kebudayaannya. Pengaruh tata kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional.⁸¹⁾

Tantangan yang kuat terutama datang dari pemimpin-pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat ber-tentangan dengan norma-norma dalam ajaran agama Islam. Dominasi sosial ekonomi, politik dan kebudayaan yang ter-jadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah meng-akibatkan timbulnya desorganisasi di kalangan masyarakat

tradisional dan lembaganya. Sarikat Islam memberikan bermacam sarana untuk menyalurkan potensi-potensi kekuatan para petani, pedagang dan pemimpin agama.

a. Jalan Perlawanan

Sarikat Islam merupakan perkembangan lebih lanjut dari gerakan Sarikat Islam. Sarikat Dagang Islam di dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan agama dan ekonomi, sehingga tujuan organisasinya selain untuk memajukan agama Islam, juga memperkuat diri dari golongan pedagang-pedagang Indonesia terhadap pedagang-pedagang Cina, yang pada waktu itu di Solo memegang peranan leveransir bahan-bahan yang diperlukan oleh perusahaan batik, yaitu kain putih, malam, alat-alat untuk mencat. Kesemuanya itu didapatkan dengan perantaraan Cina.⁸²⁾

Beberapa kampung di kota Surabaya, pada bulan Maret 1912 telah banyak penduduk Bumiputera yang menjadi anggota Sarikat Islam. Di kota Surabaya terjadi ketegangan antara orang-orang Bumiputera dengan pedagang Cina, beberapa tindakan telah diambil terhadap toko-toko orang Cina.⁸³⁾

Sarikat Dagang Islam, ketika akan mengusulkan anggaran dasar, mencari bantuan seorang pelajar Indonesia yang bekerja pada perusahaan dagang di Surabaya bernama Umar Said Cokroaminoto. Umar Said Cokroaminoto mengusulkan anggotanya supaya jangan dibatasi hanya kepada golongan pedagang tetapi diperluas, maka Sarikat Dagang Islam diganti namanya menjadi Sarikat Islam.⁸⁴⁾

Dengan adanya pergolakan di mana-mana, maka oleh pemerintah kolonial Belanda disetujuinya usul perubahan nama dan anggaran dasar Sarikat Dagang Islam ke Sarikat Islam. Di dalam akte Notaris, pada tanggal 10 September 1912 di-

dalamnya memuat anggaran dasar Sarikat Islam dan ditetapkan tujuan dari perkumpulan itu, ialah :

- 1) Memajukan perdagangan
- 2) Memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang mengalami kesusahan
- 3) Memajukan kepentingan rokhani dan jasmani dari penduduk asli (Bumiputera)
- 4) Memajukan kehidupan agama Islam. ⁸⁵⁾

Dengan adanya perubahan nama dan anggaran dasarnya, maka Sarikat Islam berkembang di wilayah Jawa dan Madura. Di Surabaya muncul cabang Sarikat Islam yang diketuai oleh Umar Said Cokroaminoto sendiri (September 1912). Pengurusnya disusun dengan lengkap, semuanya bekerja dengan aktif, sehingga dalam tempo dua bulan saja sudah lebih dari 2.000 orang anggotanya. Propaganda di seluruh Jawa Timur berjalan dengan cepat, sehingga Sarikat Islam menjalar ke mana-mana. Nama- Umar Said Cokroaminoto pada waktu itu menjadi sebutan umum di mana-mana, terutama di dalam kota Surabaya. Penduduk Surabaya memuji-mujinya sebagai seorang pemimpin yang gagah berani dan sakti. ⁸⁶⁾

Sikap Umar Said Cokroaminoto, menganggap semua orang sama derajatnya termasuk orang-orang Belanda. Dengan adanya sikap dan kepemimpinan Umar Said Cokroaminoto yang gagah berani dan sakti oleh para pengikutnya dianggap sebagai seorang calon pemimpin seluruh bangsa. Popularitas dan kekuatannya, telah menimbulkan kepercayaan rakyat, bahwa ia memang dianugerahi kekuatan-kekuatan gaib. Malahan banyak dari pengikutnya menganggap Cokroaminoto, sebagai Ratu Adil yang akan membawa mereka ke arah jaman keemasan. Ada yang menganggapnya sebagai Raja Jawa. ⁸⁷⁾

Lahirnya Sarikat Islam, memberikan semacam sarana bagi para petani untuk menyalurkan potensi kekuatan mereka, melalui ideologi, kepemimpinan, organisasinya. Sarikat Islam dirumuskan atas faktor-faktor sosial ekonomi dan politik yang menyadarkan para petani tentang situasi sosial yang melingkupinya. Tidak mengherankan bahwa Sarikat Islam harus dihubungkan dengan sejumlah agitasi, dan kadang-kadang kekerasan yang dilancarkan terhadap orang-orang Cina sebagai pesaing asing yang menyaingi para pedagang pribumi di pasaran. Para pedagang Bumiputera protes ketika orang-orang Cina meluaskan daerah persaingannya, dan mengancam kepentingan perdagangannya.

Di Tuban, kerusuhan dimulai ketika kaum buruh menolak untuk bekerja pada orang Cina, dengan upah yang terlalu rendah. Kepala desa dipukuli karena tindakannya yang kasar dalam mengurus perselisihan itu. Karena itu Sarikat Islam setempat mengambil langkah untuk menguasai urusan itu.⁸⁸⁾

Tahun 1913 barangkali adalah tahun yang paling buruk dari masa kerusuhan anti Cina di seluruh sejarah Indonesia, laporan tentang perselisihan Cina — Jawa, cukup banyak dan menjadi berita yang hangat dalam surat kabar pada waktu itu, terutama yang terjadi di daerah-daerah Surabaya, Surakarta, Semarang, Cirebon, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain.⁸⁹⁾

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda timbul tanah partikular, sebagai akibat dari praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda semenjak permulaan jaman VOC. Tanah semacam itu terdapat di sekitar Batavia, Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Tanah partikular ini di bawah kekuasaan tuan tanah yang memiliki hak untuk menguasai penduduk yang hidup di atas tanah tersebut, dan menuntut penyerahan tenaga beserta hasil

tanahnya, bahkan dapat minta apa saja yang mereka kehendaki. Tindakan sewenang-wenang para tuan tanah menimbulkan rasa dendam terhadap kondisi sosial ekonomis yang kurang memberi tempat yang bebas bagi kehidupan para petani, akhirnya meletus dalam bentuk kerusuhan yang semakin menjadi umum dan mendalam dengan berkembangnya Sarikat Islam.

Peristiwa pergolakan tanah partikulir di Surabaya pada tahun 1916 mempunyai sifat yang khas, yaitu radikal atau bahkan revolusioner. Pergolakan ini bertujuan untuk menghancurkan institusi tanah partikulir, termasuk berbagai macam kewajiban yang dibebankan kepada penduduk. Nampaknya rakyat telah diindoktrinasi dengan ide yang mengatakan, bahwa tanah adalah milik petani dan karenanya mereka tidak perlu pelayanan kerja.

Yang menghasut para petani melakukan pemberontakan, adalah seorang yang bernama Sadikin. Sadikin menganjurkan agar rakyat tidak melakukan kompenian (kerja paksa) selama lima hari setiap bulannya, dan membayar sewa atau cukai (seperlima dari hasil panen). untuk memperkuat tuntutannya para petani melakukan ancaman, intimidasi dan rintangan yang semuanya itu adalah pengabdian sepenuhnya, hak-hak tuan tanah dan kewajiban-kewajiban penanaman. Secara keseluruhan latar belakang dari agitasi petani dalam hal ini sangat penting, karena menunjukkan, bahwa gerakan petani di tanah partikulir di daerah Surabaya itu mungkin telah dipengaruhi oleh radikalisme dari pergerakan Sarikat Islam. Pergolakan di tanah partikulir terjadi di Keputran Kidul, Keputran Lor, Sawahan, Bagong, Kedunganyar, Kembang Kuning, Grudo, dan lain sebagainya.⁹⁰⁾

Sarikat Islam dalam usaha memajukan kehidupan agama Islam peranan pesantren, guru, haji atau kyai sangat penting

untuk memberikan petunjuk kepada rakyat agar bersatu dalam ikatan agama/keagamaan. Dengan adanya penjajahan Belanda di Indonesia, maka timbul perubahan-perubahan sosial, kekacauan dan demoralisasi, sebagai akibat westernisasi. Agitasi Sarikat Islam sebagian memang ditujukan juga untuk memperkuat pelaksanaan keagamaan dan memperkuat semangat keagamaan. Para kyai dan haji membakar semangat rakyat untuk menggiatkan kembali kehidupan agama secara ketat dan memperkuat kembali susunan dan tatacara masyarakat tradisional untuk menghadapi tantangan pemerintah kolonial, bahkan bila mampu akan mengusirnya. Sikap semacam itu dalam beberapa hal diajarkan secara khusus oleh pemimpin-pemimpin agama.

Agitasi yang tajam, misalnya :

- 1) Pemerintahan kafir telah membawa penderitaan dan kesengsaraan rakyat ,
- 2) Air telah menjadi kotor atau beracun karena kena air yang dipergunakan untuk mempermandikan orang-orang Kristen ;
- 3) Tanah dan buruh telah diperas untuk kepentingan perusahaan asing ;
- 4) Pegawai dikatakan telah melakukan pencemaran tempat-tempat suci dengan mengadakan pembongkaran makam-makam keramat ;
- 5) Pengotoran garam oleh benda-benda tidak "murni", dan
- 6) Tindakan sewenang-wenang dari pegawai lokal. ⁹¹⁾

Pesantren di Surabaya yang terkenal pada waktu itu, ialah pesantren Sidoresmo dengan guru-gurunya, antara lain Haji Tuan Sanap, Haji Dulkamid, Kyai Bardogi, Haji Dulwahab, Haji Sajang, dan Haji Muhamad Umar. ⁹²⁾

Para kyai dan haji inilah yang membakar semangat rakyat untuk menggiatkan kembali kehidupan agama secara ketat dan memperkuat kembali susunan dan tatacara masyarakat tradisional untuk menghadapi pranata pemerintah kolonial Belanda.

Ajaran agama Islam yang sejati menaburkan benih-benih demokrasi, antara lain untuk memerintahkan memupuk persaudaraan menurut keadilan Tuhan. Maka dimanfaatkanlah gerakan Sarikat Islam untuk mengenal Islam, dan kebiasaan yang tidak baik itu dibuangnya, begitu juga dengan kebiasaan untuk memperhina diri dan membiarkan diri dihina orang.⁹³⁾

Berkat hikmah agama Islam yang sejati kita mendapatkan sifat-sifat demokrasi yang terbaik, baik lahir maupun batin, dan kita akan siap untuk mengikuti situasi politik di dalam dewan-dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dalam bidang politik Sarikat Islam berusaha mengubah situasi di dalam dewan-dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu sudah ada beberapa anggota Bumiputera dalam dewan-dewan tersebut, namun apakah artinya segelintir anggota itu dibandingkan dengan penduduk yang sedemikian besarnya. Anggota Bumiputera yang duduk di dalam dewan di antaranya adalah pegawai negeri, beberapa partikular yang kesemuanya diangkat oleh pemerintah, atas usul pegawai negeri.

Sarikat Islam tidak menolak tetapi ingin menunjukkan bahwa anggota yang demikian dalam dewan bukanlah wakil, dan bahkan nilai tertinggi atas suara mereka hanyalah sebagai pertimbangan, sehingga dalam segala hal sama sekali tidak berarti. Arah tujuan sarikat Islam memperoleh hak sebagai manusia dan mendapat tempat untuk ikut campur dalam

soal-soal pemerintahan. Sarikat Islam berharap terbentuknya suatu *zelfbestuur* bagi Hindia Belanda, atau paling sedikit suatu Dewan Pemerintahan Kolonial, sehingga dapat turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan. Sarikat Islam akan menunjukkan kepada pemerintah pelbagai keberatan yang dirasakan oleh rakyat, beberapa peraturan dianggap tidak baik bagi anak negeri, dan sedapat mungkin harus membantu menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki nasib dan keadaan Bumiputera, untuk mempertahankan kesejahteraan anak negeri, serta tanah tumpah darah kita ki nasib dan keadaan Bumiputera, untuk mempertahankan kesejahteraan anak negeri, serta tanah tumpah darah kita Hindia Belanda.⁹⁴⁾

Sarikat Islam berusaha menaburkan benih-benih demokrasi, yakni masalah hak berserikat dan berkumpul serta masalah perwakilan rakyat. Dalam hal berserikat dan berkumpul, Sarikat Islam pada mulanya menjauhkan diri dari pasal 111 *Regeerings Reglement* (Peraturan Pemerintah), yang melarang perhimpunan-perhimpunan yang mengandung maksud atau bersifat politik.

Maksud untuk membentuk Dewan Rakyat umpamanya, memberikan kelonggaran bagi hak tersebut. Pembatasan untuk berapat yang terkenal dengan nama *Beperkt Vergader Verbod* praktis melumpuhkan kegiatan gerakan kebangsaan, terutama dalam soal berserikat dan berkumpul.⁹⁵⁾

Di dalam anggaran dasar Sarikat Islam terdapat tujuan organisasi memajukan keperluan penduduk Bumiputera, tentang pengusahaan tanah, perdagangan, dan kerajinan, tentang kesehatan badan, pendidikan, dan pengajaran. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka Sarikat Islam boleh dikatakan menginjak-injak larangan, karena sesungguhnya tuntutan-tuntutannya lebih banyak bersifat politik.

Dalam masalah perwakilan rakyat, yakni *Volksraad* tidak dapat memenuhi keinginan para pejuang pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1918 segera setelah dewan dibentuk, suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi Cokroaminoto menuntut agar secepatnya disusun suatu parlemen yang dipilih di antara, dan oleh rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuh-penuhnya dan dibangun suatu pemerintahan yang bertanggungjawab kepadaparlamen tersebut.

Mosi tersebut mengandung pokok-pokok, sebagai berikut :

- 1) Bahwa hak pilih penuh harus diakui pada rakyat ;
- 2) Badan Perwakilan Rakyat mempunyai hak legislatif penuh dan ;
- 3) Bahwa Parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap siapa pemerintah harus bertanggungjawab. ⁹⁶⁾

Dengan pergerakan-pergerakan di atas Sarikat Islam ingin mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum di dalam anggaran dasarnya. Pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*), sebagai tujuan perjuangan terhadap pemerintah kolonial Belanda, dan menentang semua penghisapan oleh kapitalisme yang buruk dengan harapan rakyat Bumiputera dapat hidup di tanah airnya dengan aman dan sejahtera.

b. Pimpinan dan Pengikut

Sarikat Islam merupakan sarana bagi penduduk Bumiputera untuk menyalurkan potensi kekuatannya melalui ideologi, kepemimpinan, organisasi, dan lambang-lambanganya. Penduduk Bumiputera merasa dendam kepada pemerintah kolonial Belanda, karena adanya dominasi ekonomi, politik, dan kultur yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dengan adanya dominasi tersebut mengakibatkan

timbulnya desorganisasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya.

Dalam perkembangan gerakan Sarikat Islam di Jawa Timur pada khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya, peranan Umar Said Cokroaminoto sangat penting. Kalau kita lihat dari susunan keluarga Umar Said Cokroaminoto, adalah keturunan orang-orang alim dan priyayi ningrat, dalam dirinya mengalir darah ningrat bangsawan dari Surakarta. Namun demikian Umar Said Cokroaminoto dalam perjuangannya sangat dekat dengan penduduk pribumi. Hal ini terbukti setelah Cokroaminoto tamat dari O.S.V.I.A. menduduki jabatan di bidang pemerintahan, tetapi dia hanya bekerja lebih kurang tiga tahun, setelah itu pun dia meninggalkan pekerjaannya dan bekerja sebagai pegawai di sebuah firma, yaitu Firma Kooy & Co di Surabaya.

Selain itu ketika di Surabaya Sarikat Dagang Islam dikeuai oleh Cokroaminoto, dalam waktu dua bulan saja telah mempunyai anggota lebih kurang 2.000 orang. Pada kongres pertama Sarikat Islam di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913, Cokroaminoto menerangkan antara lain bahwa Sarikat Islam bukan partai politik dan tidak bereaksi melawan pemerintah Belanda. Walaupun begitu dengan agama Islam sebagai lambang persatuan, dan dengan penuh kemauan mempertinggi derajat rakyat.⁹⁷⁾

Nama Umar Said Cokroaminoto pada waktu itu menjadi sebutan umum terutama di dalam kota Surabaya. Penduduk memuji-mujinya sebagai seorang pemimpin yang gagah berani dan sakti.

Kongres di Surabaya mengambil tempat di Kebun Bina-tang, dihadiri oleh massa sekitar 10.000 orang. Cokroaminoto dalam kesempatan itu berpidato panjang lebar dan penuh

semangat. Antara lain ia menegaskan, bahwa Sarikat Islam ingin menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia dan memperkuat ekonominya. Agar dapat menghadapi bangsa asing dengan mendirikan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Ia mentamsilkan pergerakan Sarikat Islam sebagai air mengalir dengan deras, laksana banjir yang tidak bisa dihadap oleh siapa pun. Sebagai sambutan dari pidato dan gagasannya itu, maka anggota-anggota Sarikat Islam Jawa Timur banyak mendirikan toko koperasi, khususnya di kota Surabaya.⁹⁸⁾

Oleh para pengikutnya dengan tindakannya yang gagah berani tersebut ada yang mengkaitkan Cokroaminoto dengan gambaran tokoh pewayangan Gatutkaca dari Sarikat Islam. Sikap dan kepemimpinan Cokroaminoto yang demikian itu mempengaruhi para petani, pedagang dan para kyai serta haji di pesantren-pesantren.

Sarikat Islam telah mendorong ke arah proses mobili-sasi politik secara modern di kalangan penduduk pedesaan. Penduduk desa mulai sadar akan kedudukannya yang rendah, dan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap mereka. Di dalam peristiwa Surabaya pada tahun 1916, kemungkinan besar telah terpengaruh oleh gerakan Sarikat Islam. Sadikin menghasut para petani untuk melakukan pemberontakan dengan tujuan menghancurkan institusi tanah partikulir, termasuk kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada penduduk yang mendiami di atas tanah tersebut.

Rakyat petani telah sadar, bahwa tanah adalah milik petani dan karenanya mereka tidak perlu membayar sewa untuk tanah yang mereka tanami, dan juga tidak perlu melakukan kerja paksa. Dengan adanya agitasi-agitasi yang dilaksanakan oleh Sarikat Islam dan rasa dendam serta tidak puas-nya, maka timbullah pergolakan tersebut.

Pranata-pranata pada masa pemerintah kolonial Belanda dilandasi oleh prinsip rasial. Dalam pranata demikian ini orang-orang Cina menduduki status sosial golongan menengah. Keadaan sosial yang demikian ini akan dihancurkan oleh Sarikat Islam. Kebencian umum terhadap dominasi modal asing sangat meluas dan menuntut adanya kesempatan yang luas kepada penduduk pribumi.

Dalam hal ini Sarikat Islam berusaha menghancurkan persaingan dari pihak kapitalis non pribumi. Pedagang-pedagang kecil Jawa merasa terancam oleh persaingan orang Cina. Pada mulanya yang membentuk inti gerakan anti Cina, bukanlah golongan petani tetapi golongan kelas menengah bagian bawah. Kaum pedagang kecil menganggapnya, bahwa orang-orang Cina sebagai pesaing asing yang menyaingi di pasaran, hal ini menyebabkan timbulnya rasa dendam dan benci. Para pedagang protes ketika orang-orang Cina meluaskan daerah persaingan. Demikian juga halnya kejadian di Tuban, merupakan perwujudan rasa tidak puas, dendam dan benci kepada orang-orang Cina.

Dalam melaksanakan tujuan Sarikat Islam memajukan kehidupan agama Islam, peranan kyai atau haji dan pesantren sangat penting. Di dalam perlawanan terhadap Belanda golongan agama yang memegang pimpinan ini bertindak sebagai penasehat, pemberi landasan keyakinan untuk mempertebal semangat dan tekad perang. Kita ketahui bahwa Co-kroaminoto adalah seorang haji, gagah dan berani serta mahir dalam soal keagamaan yang demikian ini mengakibatkan bertambah kuat loyalitas pengikutnya kepada pemimpinnya.

Ikatan kepercayaan dan keyakinan sangat besar pengaruhnya pada golongan pengikutnya dalam menentukan sikap, waktu terjadi perlawanan. Perlawanan membela agama, adalah besar dan pengorbanan yang diberikan adalah pengorban-

an terpuji dan meninggal di dalam perlawanan berarti mati syahid. Keyakinan demikian ini ditanamkan kepada para santri-santri.

Pergolakan-pergolakan di atas merupakan suatu bukti, bahwa lahirnya Sarikat Islam memberikan semangat dan merupakan sarana untuk menyalurkan kekuatan mereka, serta sangat besar pengaruhnya di kalangan kaum tani, pedagang dan golongan agama.

c. Taktik dan Strategi Perlawanan

Sarikat Islam adalah suatu organisasi yang bertujuan memperkuat kedudukan ekonomis kaum muslimin, khususnya dalam persaingan dagang dengan orang-orang Cina dan merupakan front untuk melawan penghinaan terhadap rakyat Bumiputera, terhadap kecurangan dan penindasan, terhadap kesombongan rasial dan terhadap perlakuan yang berat sebelah dari pemerintah kolonial Belanda, serta memberi keleluasaan dalam penyebaran agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha pemimpin Sarikat Islam yang pertama, ialah menyadarkan rakyat Bumiputera dan menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Sarikat Islam menjelaskan, bahwa para penguasa asing yang menjalankan kolonialisme dan imperialisme mengakibatkan terdesaknya kedudukan rakyat pribumi. Tidak pada tempatnya menganggap Hindia Belanda sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya; tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan, dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi, bahwa penduduknya terutama anak negerinya sendiri tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka.

Sarikat Islam tetap setia kepada pemerintah tetapi yang dimaksud bukanlah kesetiaan yang membeo, dan

menerima begitu saja dari kehendak pemerintah kolonial Belanda. Di dalam gerak Sarikat Islam tetap setia kepada pemerintah hanya merupakan taktik perjuangan. Strategi yang diciptakan oleh Cokroaminoto, ialah bersabar dan berke-
mauan keras dalam usaha mencapai tujuan. Para anggota Sarikat Islam harus sabar oleh karena suatu bangsa yang dapat bersabar, dapat pula mempunyai keyakinan akan tercapainya suatu tujuan akhir.

Jelas, kesabaran adalah rahasia dari kemenangan, sedang-
kan ketidaksabaran adalah pengganti kelemahan. Para pemim-
pin pergerakan menyadari hal ini dan mudah-mudahan mere-
ka memahaminya benar-benar. Para pemimpin dan anggota
harus bekerja bersama-sama, untuk saling membantu sekuat-
kuatnya, agar manfaat dari tujuan perjuangan kita benar-
benar difahami oleh bangsa kita.¹⁰⁰⁾

Sarikat Islam yang bertujuan agar rakyat timbul kesa-
darannya, tentang situasi sosial yang melingkupinya. Arah
tujuan Sarikat Islam, adalah memperoleh hak sebagai manu-
sia suku bangsa kita untuk mencapai hak-hak yang layak se-
bagai rakyat Bumiputera.

Pada umumnya hak dan kebebasan politik hanya diberi-
kan kepada suatu bangsa, bila bangsa itu sendiri memintanya
dengan paksaan; jarang terjadi, bahwa hak dan kebebasan
politik itu diberikan kepadanya sebagai suatu anugerah dari
pemerintah. Oleh karena itu rakyat sendiri harus bekerja ke-
ras, untuk menentukan nasibnya. Menolong diri sendiri,
itulah kunci untuk membuka pintu ke arah tercapainya
cita-cita suatu bangsa. Sarikat Islam menyadarkan rakyat
agar berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat dan kebiasaan
rendah, misalnya kebiasaan untuk memperhina diri dan mem-
biasakan diri dihina orang.

Sarikat Islam di dalam mencapai tujuan selain dengan jalan menyadarkan rakyat dan mengkaitkan semangat patriotisme/nasionalisme, juga berusaha ikut sertanya di dalam *volksraad*. Tujuan ikut sertanya Sarikat Islam di dalam *Volksraad*, antara lain akan menunjukkan kepada pemerintah pelbagai keberatan yang dirasakan oleh rakyat, beberapa peraturan yang dianggap tidak baik oleh anak negeri, dan sedapat mungkin membantu menunjukkan jalan yang harus ditempuh, untuk memperbaiki nasib dan keadaan Bumiputera, untuk mempertahankan kesejahteraan anak negeri serta tumpah darah Hindia Belanda.¹⁰¹⁾ Dengan jalan mencintai bangsa dan kekuatan ajaran agama Islam berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian besar bangsa.

Para haji dan kyai di pesantren-pesantren juga berusaha menyadarkan para santri dan membakar semangat untuk melaksanakan ajaran agama yang ketat. Taktik yang dipakai oleh para kyai dan haji berbeda dengan yang ditujukan kepada para petani dan pedagang. Para ulama dalam usaha memajukan kehidupan agama dan menanamkan semangat patriotismen nasionalisme, memberi nasehat landasan keyakinan untuk mempertebal tekad berperang.

Perlawanan membela agama adalah benar dan pengorbanan yang diberikan adalah pengorbanan terpuji dan meninggal di dalam perang berarti mati syahid. Pemerintah kolonial Belanda adalah pemerintah kafir yang telah mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat, keadaan demikian haruslah kita hancurkan. Para ulama ini pun hanya memberikan nasehat, menyadarkan para pengikutnya, keadaan sosial yang melingkupinya.

3. Akibat Perlawanan.

Perlawanan yang terjadi atas pengaruh Sarikat Islam,

adalah menghendaki adanya perubahan sikap dan tindakan, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari orang asing lainnya. Dengan adanya pergolakan, kericuhan, dan kerusuhan di mana-mana lama-kelamaan baik di Nederland maupun di Hindia Belanda merasakan, bahwa tidak pantas lagi Hindia Belanda diperintahkan oleh Negeri Belanda bagaikan seorang tuantanah yang menguasai tanahnya.

Maka timbullah suatu perubahan, yakni adanya perubahan pasal 111 *Regeerings reglement* yang melarang orang-orang mengadakan rapat-rapat politik, sekarang telah tiada lagi, meskipun belum ada peraturan yang menggantinya, namun pasal ini tidak diperlakukan lagi, terbukti dengan adanya Kongres Sarikat Islam beberapa kali. Secara berangsur-angsur telah terjadi suatu perubahan antara penguasa dan yang dikuasai, tanda-tandanya telah terlihat dan memberikan keyakinan kepada kita, bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak lagi ingin menghalang-halangi suara kritik yang baik, maupun lahirnya kehendak umum, bahkan sebaliknya sekarang telah dengan nyata terlihat, bahwa pemerintah pun mengingini dan menganggap suatu keharusan untuk mendengarkan kritik yang baik, serta pendapat umum itu. Oleh karena kesemuanya itu adalah untuk kepentingan pemerintah itu sendiri dalam usaha, untuk mendapatkan jalan yang benar ke arah tercapainya tujuan yang dikehendakinya.

Dengan sukarela pemerintah telah mulai meninggalkan politiknya yang dahulu, yakni politik yang mengadakan perbedaan antara penguasa dan yang dikuasainya dan mulai merubah haluannya, yakni ke arah politik etik, politik persekutuan. Jadi perjuangan Sarikat Islam tidak sia-sia meskipun belum berhasil secara keseluruhan apa yang dicita-citakan.

E. INDONESIAN STUDIE CLUB

1. Latar Belakang

Pemerintah kolonial Belanda dalam usaha menguasai Hindia Belanda mendominasi kegiatan di semua bidang, yakni sosial ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya penjajahan Belanda di Indonesia timbullah beberapa perubahan keadaan sosial ekonomi, politik dan kebudayaan. Dalam bidang sosial ekonomi timbullah bermacam-macam tingkatan masyarakat yang tiap-tiap tingkatan mempunyai kewajiban dan hak sendiri-sendiri. Hak kewajiban selain berbeda, juga terdapat tujuan agar tidak dapat bersatu, sehingga mudah dalam melaksanakan politik *divide et impera*.

Perbedaan hak dan kewajiban mengakibatkan kurang se-rasinya dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Oleh karena itu Dr. Soetomo pada tanggal 12 Juli 1924 di Surabaya, mendirikan organisasi yang bernama *Indonesische Studie Club*.

Timbulnya organisasi ini sebagai akibat pengaruh propaganda yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland. Dibentuk dalam organisasi *studie club*, karena pada waktu itu pengawasan terhadap politik masih keras, sehingga untuk menghindarkan pengawasan polisi terhadap gerak-gerik *studie club* itu.

Tujuan didirikannya perkumpulan ini, ialah untuk mengumpulkan kaum intelek muda dan tua dari segala pahan, aliran politik dan kepercayaan agama, berkomunikasi serta berdiskusi secara ilmiah, tentang hubungan persoalan kepentingan Nusa dan Bangsa. Dengan adanya perkumpulan, berkomunikasi dan berdiskusi, tentang kepentingan nasional ini diharapkan timbul rasa persatuan dan sikap harga menghargai, di antara pemimpin-pemimpin kita.¹⁰²⁾

Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia bertindak dengan tangan besi, menindas gerakan rakyat dan mengadu domba.

Jiwa dari *Indonesische Studie Club*, tidak dapat dilepaskan dari jiwa yang dimiliki oleh pendirinya di mana Dr. Soetomo sejak tahun 1908 berkeinginan meningkatkan derajat rakyat Indonesia. Menentang kebobrokan susunan masyarakat kolonial, mengusahakan penduduk pribumi jangan sampai ketinggalan, menghapuskan sistem feodalisme yang kolot, ingin mendekatkan bahan menghapuskan jurang pemisah antara priyayi tinggi dan priyayi rendah, dan antara priyayi dengan rakyat biasa. Bahkan masih ada pemikiran yang sifatnya kedaerahan, sehingga hal demikian ini mudah untuk diadu domba oleh pemerintah kolonial Belanda.

Jiwa nasionalisme Dr. Soetomo lebih matang, ketika beliau meneruskan sekolah lagi ke negeri Belanda, karena mendapat pengaruh dari perhimpunan Indonesia yang anggotanya terdiri dari para mahasiswa Indonesia yang bertempat tinggal di negeri Belanda. Setelah pulang ke Indonesia berusaha mengatasi segala persoalan ekonomi anak negeri, mengajar dan mengesampingkan segala perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dan mematahkan kekuasaan kolonial Belanda. Dr. Soetomo ingin meningkatkan derajat rakyat dan kebangsaannya yang diinjak-injak oleh kolonialisme asing dan dikhianati oleh semantara pendukung feodalisme pribumi sendiri.¹⁰³⁾

2. Proses Perlawanan

a. Jalan Perlawanan

Mengingat latar belakang asas sosialnya serta cita-cita perjuangannya sewaktu muda, maka tidak tertarik kepada

organisasi yang bergerak pada saat itu. Gerakan Budi Utomo, yang didirikan pada saat dahulu masih tetap terlalu priyayi-sentris, hal ini tidak berarti anti kepada gerakan-gerakan tersebut. Dr. Soetomo ingin menyumbangkan tenaganya, demi kemajuan bangsanya, lepas dari adanya perbedaan sosial. Beliau mengetahui bahwa para generasi muda memerlukan tempat di luar gerakan yang telah ada, untuk mengeluarkan rasa nasionalismenya. Oleh karena itulah Dr. Soetomo timbul rasa berkewajiban untuk mendirikan suatu wadah, untuk menentang kebobrokan susunan masyarakat kolonial pada waktu itu.

Atas dorongan-dorongan tersebut Dr. Soetomo pada tanggal 12 Juli 1924 di Surabaya, mendirikan *Indonesische Studie Club*. Pendirian organisasi tersebut menurut berita dalam surat kabar Melayu Tionghoa "*Sin Jit Po*" tanggal: 14 Juli 1981, diberitakan bahwa rapat pendirian diadakan di rumah R.M. Hario Soejono di *Palmenlaan*, dengan mendapat kunjungan 25 orang pelajar-pelajar tinggi. Disebutkan juga yang hadir, antara lain : Dr. Soetomo, Sunyoto, Mr. Koesnoen, Dr. Saleh, dan lain-lain orang Indonesia, selain itu masih ada orang Belanda, yakni Koch, dan Tillema. Koch terkenal seorang Belanda yang progresif dan Tillema sebagai pembela perbaikan keadaan kampung.¹⁰⁴⁾

Indonesische Studie Club berusaha membangun kaum tepelajar, supaya mempunyai keinsyafan kewajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik; mengajak mereka supaya melakukan pekerjaan yang berfaedah bagi masyarakat dalam memperbincangkan dulu setenang-tenangnya, tentang soal-soal nasional dan sosial. Gerakan untuk menyadarkan rakyat oleh *Indonesische Studie Club*, selain secara langsung juga dilaksanakan melalui majalahnya sendiri yang bernama *Suluh Indonesia*.

Sejak berdirinya *Indonesische Studie Club* tahun 1924 Dr. Soetomo duduk dalam *Gemeenteraad Surabaya*, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Surabaya, sehingga *Indonesische Studie Club* penolak politik *non cooperation*, malahan sebaliknya Dr. Soetomo bersedia duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat daerah Surabaya, sehingga termasuk *cooperator* Dr. Soetomo dalam *Gemeenteraad Surabaya*, selalu memperjuangkan kepentingan rakyat terutama dalam bidang perbaikan kampung dan kesehatan rakyat. Kehidupan rakyat sangat terdesak, sehingga ia ingin meningkatkan derajat rakyatnya yang diinjak-injak oleh kolonialisme asing. Sebaliknya golongan dari orang-orang Belanda selalu membe- la kepentingan penjajahan Belanda, sambil mengorbankan ke- pentingan rakyat Bumiputera. Boleh dikatakan hampir semua kehendak Dr. Soetomo beserta kawan-kawannya untuk mem- perjuangkan nasib rakyatnya ditentang oleh anggota yang la- in.

Keadaan yang demikian ini mengakibatkan tidak puas- nya Dr. Soetomo beserta teman-temannya, sehingga timbul kehendak untuk keluar dari *Gemeenteraad Surabaya*. Kehen- dak tersebut terlaksana ketika pada sidang Dewan pada tang- gal 14 Maret 1925 usul yang sama ditolak oleh sidang.¹⁰⁵⁾

Usaha Dr. Soetomo melalui *Gemeenteraad Surabaya*, tidak berhasil tetapi di lain usaha berhasil, antara lain mendi- rikan sarana-sarana untuk para pelajar di Surabaya, mendirikan rumah untuk menampung wanita-wanita yang tersesat hidupnya, dan diberi beberapa kepandaian yang dapat di- pergunakan untuk mencari penghidupannya dengan cara halal, mendirikan sekolah untuk belajar menenun, yang ke- semuanya itu untuk meningkatkan derajat rakyat, agar ja- ngan terlalu jauh ketinggalan. Selain itu juga didirikan suatu

Bank Bumiputera, buat menolong perniagaan Indonesia dan melenyapkan adanya pedagang perantara. ¹⁰⁶⁾

Kesemuanya itu suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan rakyat dan untuk meringankan beban akibat penindasan kolonial Belanda.

Dr. Soetomo dengan *Indonesische Studie Club*, bertujuan menanamkan rasa tanggung jawab sosial, dan politik di kalangan anggota-anggotanya dan melalui organisasi ini pula bermaksud, agar problem nasional di bidang sosial ekonomi dapat dibahas, sehingga menghasilkan buah pikiran yang bermanfaat bagi pembangunan. Di bidang sosial ekonomi ini *studie club* dan organisasi-organisasi penerusnya, yaitu Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), dan Partai Indonesia Raya (PARINDRA), mengembangkan dan memajukan kegiatan yang luar biasa. Biro-biro penasehat didirikan untuk membe-rantas lintah darat, dan untuk memperkuat dan mempergiat organisasi perdagangan dan perkumpulan koperasi.

Indonesische Studie Club menjalankan pimpinan dan pengawasan terhadap sembilan bank desa, yang diubah menjadi perkumpulan *Crediet Cooperatie* dalam kota Surabaya.

Selain itu ia mempropagandakan cara bekerja bersama-sama kepada rakyat, sehingga dapat meluaskan usaha-usaha dengan menggunakan ini. *Rechtspersoon* yang ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam *staatsblad* tahun 1927 nomor 91. Kegiatan-ekgiatan itu kemudian mendorong ke arah berdirinya *Cooperatie Crediet Centrale Tumapel* di Malang pada bulan Pebruari 1932.

b. Taktik Perlawanan

Indonesische Studie Club pada mulanya dalam menca-pai tujuannya bekerja sama dengan pemerintah kolonial Be-

landa. Menolak kerja sama menurut Dr. Soetomo tidak merupakan perinsip. Dr. Soetomo sebelum duduk di *Gemeenteraad* Surabaya, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pengikutnya. Tujuannya mau duduk di *Gemeenteraad*, ingin memperjuangkan nasib bangsanya melalui dewan. Usaha *Studie club* di luar *Gemeenteraad*, ialah mendorong kaum pelajar dari rakyat Bumiputera ke arah keinsyafan persatuan dan ketahanan politik; mengajak para pelajar membahas persoalan-persoalan nasional dan sosial secara konstruktif.

Usaha melalui *Gemeenteraad* mendapat tantangan dari anggota dari orang-orang Belanda, sehingga Dr. Soetomo ke luar dan berubahlah taktik perjuangannya menjadi *non cooperatie*, dengan pihak pemerintah kolonial Belanda. *Non cooperatie*-nya Dr. Soetomo lain dengan taktik *non cooperati*enya gerakan lain.

Dalam hal ini Dr. Soetomo membedakan dirinya sebagai dokter di rumah sakit pemerintah kolonial dengan sebagai pemimpin *Indonesische Studie Club*. Profesinya Dr. Soetomo tidak memilih tempat tetapi ideal politiknya, sosial ekonominya memilih tempat di tengah-tengah rakyat. Dalam bidang profesinya Dr. Soetomo tidak memisahkan lawan dan kawan, sebab dalam menjalankan profesinya sebagai dokter dan guru besar, sebagai aparaturnya kolonial, dia berkontak dan bermanfaat bagi rakyat dan bangsanya sendiri.

Tetapi dalam bidang pelaksanaan cita-citanya dia menarik garis yang tajam antara penjajah dan yang dijajah, dan dia memihak di lingkungan rakyat yang dijajah.

Dari perjuangan Dr. Soetomo dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa :

- 1) Semula percaya kepada politik *cooperation* dalam dewan-dewan kolonial, tetapi kemudian berdasarkan pe-

ngalamannya yang pahit merintis politik *non co-operation*.

- 2) Mengutamakan persatuan bangsa.
- 3) Meningkatkan derajat rakyat dan bangsanya yang diinjak-injak oleh kolonialisme asing dan dikhianati oleh sementara feodalisme pribumi sendiri.¹⁰⁸⁾

3. Akibat Perlawanan

Perjuangan Dr. Soetomo dengan kawan-kawannya dalam gerakan *Indonessische Studie Club*, ialah timbulnya jiwa persatuan dan kesatuan bangsa yang pada waktu sebelumnya, telah terpecah-pecah, akibat sistem pemerintahan kolonial Belanda. Jiwa persatuan ini pula yang mendorong Dr. Soetomo aktif dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia), yaitu federasi dari perkumpulan-perkumpulan politik sosial, yang pada waktu itu ada di Indonesia. Dengan keluarnya Dr. Soetomo dari *Gemeenteraad* mulai timbul taktik perjuangan non kooperasi, dan mempengaruhi taktik perjuangan gerakan nasional kemudian hari.

4. Hubungan dengan Daerah Lain

Berdirinya *Indonesische Studie Club* di Surabaya mempengaruhi kaum intelek di daerah-daerah lain. Dalam waktu yang singkat di daerah-daerah timbul organisasi *studie club*, antara lain di Bandung di bawah pimpinan Ir. Soekarno yang diberi nama *Algemeene Studie Club*. Anggota *Algemeene Studie Club* kebanyakan kaum pelajar, dan bekas anggota Perhimpunan Indonesia.

Jadi pergerakannya pun berjiwa nasionalis, jangkauan politik perjuangannya bukan saja di wilayah Indonesia, tetapi seluruh Asia, taktik perjuangannya non kooperasi.

Surat kabar sebagai alat komunikasi dengan anggotanya, bernama *Indonesia Muda*.

Selanjutnya juga berdiri *studie club* di Yogya, Jakarta, Semarang dan Solo. *Studie Club* di Solo didirikan pada tahun 1925 oleh beberapa kaum pelajar di bawah pimpinan Dr. Radjiman dan Mr. Singgih. *Studie Club* di Solo dalam usahanya menyadarkan dan menanamkan jiwa nasionalisme melalui majalahnya yang bernama *Timbul*.

Kaum intelek Indonesia pertengahan tahun 1925-an kini memperoleh satu tempat yang dianggap paling cocok pada waktu itu, untuk dapat mengasah otaknya dan mengeluarkan suaranya, sebagai pengabdian bangsa dan tanah air, yakni melalui pergerakan *studie club*. siapa yang membaca ketiga majalah itu akan merasakan getaran jiwa rakyat kita yang hidup pada waktu itu dan yang dijurubicarakan oleh pemuka-pemuka pelajarannya. Jiwa nasionalisme dari *studie club* berkembang dan mempengaruhi para pemuda Indonesia untuk bersatu, terbukti dengan adanya kongres pada tahun 1928, yang menelorkan ikrarnya, yakni Sumpah Pemuda.

F. PEMBERONTAKAN PETA DI BLITAR

1. Latar Belakang

Dengan diawali peristiwa bombardemen terhadap kota pelabuhan Pearl Harbour di Hawaii, yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan Pasifik, pecalah Perang Asia Timur Raya (*Dai Toa Syenso*) yang juga terkenal dengan sebutan Perang Pasifik, pada tanggal 8 Desember 1941. Lima jam setelah penyerangan atas Pearl Harbour itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.I. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, menyatakan perang terhadap Jepang. ¹⁰⁹⁾

Walaupun pihak pemerintah Hindia Belanda beserta sekutunya dengan segala usaha ingin mempertahankan Pulau Jawa, namun pada tanggal 1 Maret 1942, bala tentara Jepang keenam belas di bawah Letnan Jenderal Imamura, dengan mudah dapat mendarat di pantai utara Pulau Jawa. Divisi kedua di bawah komando Mayor Jenderal Maruyama Massao, mendarat di teluk Banten. Divisi ke-48 di bawah komando Mayor Jenderal Tauchihashi Yuetsu, mendarat di Kragan (antara Rembang dan Tuban, Jawa Tengah), dan selanjutnya menduduki Jawa Timur.

Demikianlah pada tanggal 5 Maret 1942, kota-kota Batavia (Jakarta), Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya jatuh ke tangan balatentara Jepang (*Dai Nippon Taikoku*). Akhirnya setelah kota Bandung terkepung, maka pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Poorten sebagai Panglima Angkatan Darat Sekutu di Jawa menyerah, dengan tidak bersyarat (*unconditional surrender*) kepada Letnan Jenderal Imamura di Kalijati (Jawa Barat) ¹¹⁰

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia tersebut, maka sejak tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, dan Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pemerintahan pendudukan Militer Jepang. Sejak saat itu Indonesia dikuasai oleh dua Angkatan Perang Jepang, yaitu : Angkatan Darat (*Rikugun*) dan Angkatan Laut (*Kaigun*), dengan wilayahnya sendiri-sendiri. *Rikugun* (Tentara ke-16) berkuasa di Jawa—Madura dengan pusatnya di Jakarta, dan di Sumatera (Tentara ke-25) dengan pusatnya di Bukittinggi, sedangkan *Kaigun* (Armada Selatan ke-2) berkuasa di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya di Makasar.

Meskipun demikian di wilayah Angkatan Laut, sering terdapat kesatuan atau badan penghubung Angkatan Darat dan dengan demikian juga sebaliknya. Misalnya sebagian Armada Selatan ke-2 yang dipimpin oleh Laksamana Madya Shibata, pangkalan dan markasnya berada di Surabaya, begitu pula di Jakarta terdapat kantor penghubung Angkatan Laut (*Kaigun Bukanfu*) yang dipimpin oleh Laksamana Muda Maeda Tadashi.¹¹¹⁾ Semua bagian wilayah tersebut berada di bawah Komando Panglima Besar tentara selatan (*Nanpoo Gun*), yang pusatnya berada di Saigon.¹¹²⁾

Dengan demikian jelaslah, bahwa sejak saat itu Panglima Tentara ke-16 Jepang mulai mengurus pemerintahan di Pulau Jawa-Madura. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintahan militer di Jawa diatur oleh Panglima Tentara ke-16 (Letnan Jenderal Hitosyi Immamura) yang dikenal sebagai *Gunshireikan* (Panglima tentara), atau *Saiko Shikikan* (Panglima tertinggi; perubahan istilah berlaku sejak 1943). Tetapi pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh superintendan pemerintahan militer yang disebut *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Militer).

Untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, dibentuklah koordinator pemerintahan militer daerah yang disebut *Gunseibu* (Pemerintahan Propinsi). Di Jawa terbentuk tiga *Gunseibu*, yaitu di Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, di Jawa Tengah berpusat di Semarang, dan di Jawa Timur pusatnya Surabaya.

Di samping itu terdapat pola dua kerajaan (*kooci*): Surakarta dan Yogyakarta. Sejak tanggal 5 Agustus 1942, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 27 dan 28, sistem *Gunseibu* dihapus dan diganti dengan sistem *syu* (Pemerintahan Karesidenan). Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi atas *Syu* (residen), *Syi* (*stadsgemeente* = kotapraja), *Ken*

(*regenschap* = kabupaten), *Gun* (*district* = kawedanan) *Son* (*onderdistrict* = kecamatan) *Ku* (*desa* = kelurahan)¹¹³⁾

Pada permulaan usaha membentuk pemerintahan setempat, ternyata tidak dapat berjalan dengan lancar. Pemerintahan militer Jepang mengalami kekurangan staf pegawainya, yang sebenarnya telah dikirim tetapi kapalnya terkena torpedo Sekutu. Akibatnya pemerintah militer Jepang terpaksa mengangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Demikianlah di beberapa tempat jabatan wakil *Gunsei* (Gubernur), kepala pemerintahan daerah dan kepala polisi di tangan bangsa Indonesia.¹¹⁴⁾

Tetapi setelah bantuan tenaga ahli pemerintahan sipil dari Jepang banyak yang datang, maka para pegawai bangsa Indonesia mulai disingkirkan dari posisi-posisi yang penting.

Demikianlah kenyataannya bahwa tindakan yang simpatik terhadap para pegawai bangsa Indonesia, hanyalah sebagai taktik untuk mempercepat konsolidasi kekuasaannya. Jepang datang di Jawa tidak untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi untuk menjadikan pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya di daerah selatan, maka dari itu sudah selayaknya, apabila aparat-aparat pemerintahan harus berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang.¹¹⁵⁾

Selain dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah militer Jepang memerlukan simpati dari penduduk Jawa pada umumnya, dan Jawa Timur pada khususnya. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari penduduk tersebut, pihak pemerintah militer Jepang tidak segan-segan mengadakan kerja sama dengan para tokoh pergerakan nasional, yang berpengaruh dalam masyarakat, baik yang berasal dari golongan nasionalis, golongan Islam (nasionalis Islam), maupun dari golongan pemuda.

Para tokoh Pergerakan Nasional tersebut oleh pemerintah militer Jepang dipergunakan sebagai lambang untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti kolonialisme Barat, serta mempertajam perasaan anti bangsa kulit putih. Kesemuanya itu merupakan sarana untuk menegakkan hegemoni Jepang dalam bidang politik dan ekonomi di Asia Timur, memenangkan Perang Asia Timur Raya dan untuk mewujudkan suatu "lingkungan kemakmuran bersama" di Hindia Timur (*To Indo* = Indonesia). ¹¹⁶⁾

Untuk mempropagandakan tujuan Perang Asia Timur Raya itulah tokoh-tokoh nasionalis diajak kerja sama dalam berbagai gerakan.

Sehubungan dengan kedatangan tentara Jepang di Pulau Jawa, semula banyak penduduk pulau Jawa yang percaya, bahwa kedatangan mereka akan membebaskannya dari penjajahan bangsa Barat dan memberikan kemerdekaan yang sudah lama didambakannya. Setelah mendengar radio Tokyo menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan setelah pesawat-pesawat Jepang menjatuhkan pamflet yang menyatakan tentang berlakunya ramalan "Joyoboyo", dan menjatuhkan bendera-bendera Merah Putih berukuran kecil serta sikap tentara Jepang yang semula ramah tamah dan penuh suasana persaudaraan, penduduk Pulau Jawa yakin, bahwa orang Jepang tulus hati ketika menyatakan dirinya sebagai "saudara tua" yang telah datang untuk membebaskan "saudara mudanya".

Di kalangan rakyat biasa *Jongko Joyoboyo* merupakan ungkapan aspirasi kemerdekaan yang laten. ¹¹⁹⁾ Maka dari itu sudah sewajarnya apabila kedatangan pasukan Jepang oleh rakyat disambut dengan pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera Jepang *Hinomaru*, dan diiringi nyanyian lagu Indonesia Raya. Banyak orang mengira, bahwa tidak

lama setelah Jepang menaklukkan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia akan dimerdekakannya.

Maka dari itu di Jakarta lalu ada yang merencanakan suatu susunan badan Pemerintahan Indonesia, yang terdiri dari Abikusno Tjokrosujoso sebagai *premier* (perdana menteri), Ir. Soekarno sebagai *vice premier* (wakil perdana menteri), dan beberapa pemimpin Pergerakan Nasional lainnya, sebagai *minister* (menteri).¹²⁰⁾

Tetapi soal tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak militer Jepang. Bahkan pada tanggal 20 Maret 1942 pemerintah militer Jepang mengumumkan Undang-Undang Nomor 3, yang melarang segala macam perbincangan, gerakan saran-saran atau propaganda mengenai pemerintahan atau struktur negeri, persamaan dengan ini dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 4, yang menetapkan bahwa hanya bendera Jepang pada waktu hari besar yang boleh berkibar. Juga lagu Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan. Hanya lagu *Kimigayo* yang boleh diperdengarkan.¹²¹⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa semua kegiatan Pergerakan Nasional Indonesia dilarang. Bulan madu antara nasionalisme Indonesia dengan pendudukan Jepang berakhir, karena pasukan-pasukan pendudukan Jepang telah membuka kedoknya dan memperlihatkan wajah yang sesungguhnya.

Dalam menghadapi kenyataan tersebut di atas, strategi perjuangan kaum nasionalis menempuh dua jalan. Sebagian menempuh jalan *legal*, yang mengadakan kerja sama dengan pihak Jepang dengan menggunakan semboyan Jepang "Nippon — Indonesia sama-sama", sebagian menempuh jalan *illegal* dengan mengadakan gerakan di bawah tanah. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengobarkan sema-

ngat nasional Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang menempuh jalan legal antara lain : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta. Sedangkan yang menempuh jalan ilegal antara lain : Amir Syarifuddin, St. Syahrir, dan Sukarni. ¹²²⁾

Demikianlah, ketika organisasi buatan pemerintah militer Jepang *Putera* terbentuk (1-3-1943) tampuk pimpinan dipegang oleh Empat Serangkai tokoh Pergerakan Nasional kawakan (Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur), banyak tokoh Pergerakan Nasional yang menggabungkan diri. Akibatnya tugas *Putera* untuk mengerahkan tenaga rakyat Indonesia, dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ide-ide kaum nasionalis di antara rakyat (kota), dan mendapatkan konsesi-konsesi yang menuju ke arah pemerintahan sendiri dari pihak Jepang. Dengan demikian *Putera* berhasil untuk mempersiapkan rakyat (kota) secara mental bagi kemerdekaan. ¹²³⁾

Begitu pula organisasi pemuda *Gempar*, bagian dari *Putera*, dapat dimanfaatkan sebagai tempat penggemblengan kader nasionalis.

Karena pihak Jepang menyadari, bahwa *Putera* lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia, maka pada tahun 1944 dibubarkan dan diganti organisasi baru dengan nama *Jawa Hokokai* (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa).

Berbeda dengan *Putera*, yang merupakan gerakan nasionalisme, *Jawa Hokokai* dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah yang dipimpinnya langsung di bawah *Gunseikan*. *Jawa Hokokai* adalah suatu aparat pemerintah militer Jepang untuk mengendalikan gerakan kaum elite nasionalis, maka dari itu banyak kaum nasionalis (intelektual) yang kurang bergairah untuk kerja sama dalam organisasi yang tidak praktis tersebut. ¹²⁴⁾

Meskipun demikian mereka tetap berjuang dengan jalan mengusulkan berdirinya korps pemuda "Barisan Pelopor" (*Syuisintai*) dalam sidang Dewan Penasehat/Pertimbangan Pusat (*Chuo Sangi In*), (Mei 1944). Usul tersebut ternyata diterima oleh pemerintah militer Jepang (pada akhir bulan September 1944), Ir. Sukarno diangkat sebagai pemimpin umum Barisan Pelopor Pusat dan Sudiro menjadi pemimpin harian atau Kepala Sekretaris. Korps Pemuda ini pada mulanya adalah organisasi politik, yang tujuan utamanya menjadi ujung tombak propaganda *Jawa Hokokai*, tetapi kemudian berkembang menjadi badan semi militer yang lebih bersifat nasionalis. Barisan Pelopor ini merupakan senjata organisatoris yang penting bagi kaum elite nasionalis untuk menyebar-luaskan idenya ke desa-desa Indonesia. Akibatnya, walaupun secara tidak langsung, propaganda nasionalis tersebut rupanya sampai pula pada kader-kader Tentara Peta. ¹²⁵⁾

Infiltrasi ke dalam tubuh organisasi Peta dan organisasi Pemuda buatan Jepang, merupakan tujuan utama bagi keempat gerakan di bawah tanah tersebut di atas. Tujuan infiltrasi tersebut antara lain mengusahakan orang-orang yang telah dapat dipercayai untuk menempati posisi-posisi yang menentukan dalam organisasi tersebut dan mempengaruhi para anggota untuk bersikap anti Jepang dan pro Sekutu, dalam rangka persiapan pemberontakan terhadap Jepang apabila pasukan Sekutu datang menyerang Pulau Jawa. Dengan demikian jelaslah, bahwa sebagian besar pemimpin gerakan di bawah tanah setuju dengan pendapat St. Syahrir, bahwa posisi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan semakin kuat, apabila perlawanan senjata terhadap Jepang dilakukan bersamaan dengan pendaratan tentara Sekutu. ¹²⁶⁾

Usaha infiltrasi dan indoktrinasi anti-Jepang oleh kelompok-kelompok gerakan di bawah tanah terhadap unit-

unit Peta dapat dikatakan berhasil. Kelompok Sukarni telah berhasil mempengaruhi unit-unit Peta di sekitar Jakarta, kelompok Amir Syarifuddin pengaruhnya telah berhasil menyusup di daerah Jawa Tengah bagian timur. Bahkan menurut dugaan G. Mc. Turnan Kahin, bahwa peristiwa Pemberontakan Peta di Blitar pada tahun 1944 itu, merupakan hasil aktivitas dari kelompok Amir Syarifuddin. Sedangkan infiltrasi dan indoktrinasi anti Jepang terhadap *Gakutotai* (Barisan Pelajar) dan *Seinendan* (Barisan Pemuda) telah dilaksanakan oleh seluruh kelompok gerakan di bawah tanah.¹²⁷⁾

Dalam rangka melukiskan kehidupan politik pada jaman pendudukan Jepang, perlu diberikan perhatian kepada golongan Islam. Menurut pemikiran orang Jepang pada waktu itu, unsur Muslimin di dalam pergerakan nasional Indonesia, merupakan unsur yang secara politik paling dapat dipercaya oleh pihak Jepang, karena mereka dinilai yang paling anti-Barat dan karenanya lebih mudah diajak kerjasama oleh pihak Jepang. Suatu indikasi adanya keinginan Jepang untuk menempatkan Islam di garis depan masalah politik di Jawa nampak dengan diangkatnya Kyai Mas Mansur, bekas Ketua Muhammadiyah kelahiran kota Surabaya yang sangat disegani, sebagai anggota pimpinan organisasi nasionalis Putera. Selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 1943, tiga tokoh Pergerakan Nasional Indonesia, Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo telah diterbangkan ke Tokyo di mana mereka diberi bintang jasa oleh Kaisar Jepang. Sedangkan pada tahun 1944 Ketua Mas-yumi K.H. Hasyim Asy'ari, tokoh Islam tradisional yang besar pengaruhnya di Jawa Timur, dan Ir. Soekarno diangkat sebagai penasehat Indonesia Utama (*Komon*), bagi *Gunseikan* dalam organisasi *Jawa Hokokai*, kesemuanya itu merupakan simbol perpaduan antara golongan Islam dan Na-

sionalis, di dalam rangka usaha pemerintah pendudukan Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. ¹²⁸⁾

Yang jauh lebih penting bagi masa depan perkembangan politik Indonesia adalah munculnya organisasi kekuatan militer bangsa Indonesia yang terkenal dengan sebutan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), di mana tokoh-tokoh Islam sejak mulanya telah memegang peranan penting. Elite militer Indonesia yang baru muncul tersebut dalam kenyataannya menarik kekuatannya terutama dari kalangan pemimpin Islam dan anggota aristokrasi/priyayi, sedangkan kaum inteligensia yang memperoleh pendidikan Barat, tidaklah secara menyolok menjadi anggota utamanya. ¹²⁹⁾

Memang demikianlah menurut kenyataannya, bahwa sejak tahap perencanaan pembentukan Peta dua tokoh ahli Islam Jepang, Muhammad Abdul Muniam Inada dan Abdul Hamid Ono telah menekankan, bahwa satuan Indonesia yang akan dibentuk haruslah berdasarkan Islam, dan karenanya harus dipimpin oleh pemimpin Indonesia Islam. Akibatnya setelah Pasukan Sukarela Peta terbentuk (3-10-1943), bendera Peta (*Daidan-ki*) berwarna hijau dengan lukisan Bulan Sabit (lambang Islam) di tengah, yang ditempatkan di atas Matahari Terbit *Dai Nippon* (Jepang yang besar). Simbol ini merupakan identifikasi yang diinginkan Perang Jepang dengan Perang Suci bagi pembelaan Islam Indonesia terhadap imperialisme Barat yang Kristen. Perang Matahari Terbit melawan Barat, dengan demikian menjadi Perang Sabil melawan kaum kafir. Dengan demikian simbol tersebut merupakan himbauan pemerintah pendudukan Jepang terhadap dukungan Islam untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. ¹³⁰⁾

Menurut pendapat Nugroho Notosusanto, latar belakang pembentukan Tentara Peta tersebut oleh karena adanya pertemuan antara hasrat pihak Indonesia, untuk mempersiapkan pembentukan sebuah tentara Nasional pada saat datangnya kemerdekaan dengan keinginan pihak Jepang mengisi kekurangan tenaga manusia untuk perang dengan pasukan-pasukan pribumi, sehingga prakarsa pembentukan Tentara Sukarela Peta yang berasal dari pihak penguasa Jepang, kemudian direalisasikan oleh Gatot Mangkupraja dalam bentuk usul kepada *Saiko Syikikan* pada tanggal 7 September 1943. Dan dalam waktu tidak ada sebulan setelah permohonan Gatot Mangkupraja, dikeluarkanlah *Osamu Seirei* No. 44, pada tanggal 3 Oktober 1943 mengenai "Pembentukan Pasukan Sukarela untuk membela Jawa".¹³¹⁾

Pengerahan calon-calon perwira dilakukan segera di seluruh daerah pulau Jawa, setelah Undang-Undang pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau Tentara Peta (*=Boei Giyugun*) diumumkan. Ternyata perhatian dari seluruh lapisan masyarakat untuk memasuki Peta ini besar sekali. Hal ini terbukti dari pendaftaran di kota Blitar (Jawa Timur), para pemuda, petani, pedagang, guru, pelajar, pegawai dan polisi, mereka bersama-sama mengadu untung dengan menggunakan kesempatan ini. Namun pada umumnya yang diterima menjadi calon perwira hanyalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam suatu daerah. Di antara mereka ada yang berasal dari golongan priyayi, ada pula yang berasal dari golongan bangsawan.

Misalnya para calon dari Kabupaten dan Kotapraja Kediri, terdiri dari :

- (1) Sudiro, Assisten Wedana ;
- (2) Suyoto, Guru Sekolah Menengah ;

- (3) Haji Mahfut, Partikular ;
- (4) Surachmad, Wedana ;
- (5) Suhud, Wakil Walikota ;
- (6) Suyatmo, Jaksa ;
- (7) Cipto Marsono, Sekretaris Kotapraja ;
- (8) Hasannawawi, Guru Sekolah Guru.¹³²⁾

Demikianlah pada akhir bulan Oktober 1943, calon-calon perwira yang pertama dari seluruh pulau Jawa mulai dilatih di *Jawa Boei Giyugun Kanbu Renseitai* Bogor. Sedangkan para calon Bintara mendapat latihan di Cimahi. Latihan-latihan terhadap angkatan selanjutnya dilaksanakan dalam *Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai* di Bogor, yang berlangsung antara bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1944.¹³³⁾

Pada bulan Desember 1943 latihan terhadap angkatan pertama calon perwira Peta diakhiri. Pada tanggal 8 Desember para *daidanco* (Komandan Batalyon), dan *cudanco* (Komandan Kompi) dilantik di lapangan Gambir (kini Medan Merdeka Jakarta) dan diberi pedang, sejenis pedang perwira Jepang. Yang kemudian disusul dengan pelantikan para *syodanco* (Komandan Peleton) pada tanggal 21 Desember. Kemudian mereka dikembalikan ke kota asal atau daerah asal masing-masing untuk ikut serta di dalam pembentukan *daidan* (Batalyon).

Demikianlah di setiap Karesidenan (syu) di Jawa muncul paling sedikit dua *daidan* pasukan Peta. Begitu pula di Karesidenan Kediri (Kediri Syu) telah terbentuk tiga *daidan*, yaitu: *daidan* Kediri, Blitar dan Tulungagung. Setelah *daidan* terbentuk, secara taktis ditempatkan di bawah pengendalian batalyon-batalyon Jepang (*daitai*) di dalam lingkungan masing-masing brigade (*boeitai*). Di Jawa Timur yang menjabat sebagai komandan brigade (*boeitaico*) adalah Mayor Jenderal

Iwabe Shigio. Pengendalian antara *daidan* satu dengan yang lain sedemikian ketatnya, sehingga hubungan mereka hampir tidak ada.

Adapun struktur tiap *daidan* adalah sebagai berikut: setiap *daidan* mempunyai empat *cudan* (kompi) yang masing-masing terdiri atas tiga *syodan* (peleton), sedangkan tiap *syodan* terdiri dari empat *bundan* (regu). Terdapat pula sebuah kelompok staf yang terdiri dari seorang dokter (*eisei*), seorang perwira peralatan (*heiki*), seorang perwira keuangan (*keiri*) dan seorang ajudan (*fukukan*). Sebuah *bundan* biasanya mempunyai 10 anggota dengan seorang komandan, sehingga sebuah *syodan* mempunyai kurang lebih 44 anggota, sebuah *cudan* mempunyai 132 dan sebuah *daidan* (termasuk anggota staf) mempunyai kurang lebih 535 anggota.

Selain itu pada tiap *daidan* ditempatkan beberapa perwira Jepang, calon perwira (*minaraisyikan*) dan bentara (*kasyikan*). Seorang perwira menjadi *sennin syidokan* (pengawas senior) yang mengawasi *daidanco* (komandan batalyon), sedangkan setiap *cudanco* (komandan kompi) didampingi oleh seorang (*syidokan*). Selanjutnya tugas para bentara adalah membantu para *syidokan* di dalam melatih prajurit Peta (*giyuhei*).¹³⁴⁾

Demikianlah setelah *Dai II Daidan* Blitar pada tanggal 25 Desember 1943, terbentuk dan bermarkas (*honbu*) di ksatrian bekas gedung MOSVIA (kini ST) di jalan Garum (kampung Bendogerit) Blitar telah mempunyai struktur, sebagai berikut :

Honbu (Markas)

Daidanco	(Komandan Bn.)	Surachmad	Daidanco.
Fukukan	(Ajudan)	Sukandar	Syodanco.
Heiki	(Persenjataan)	Suhadi	Syodanco.
Keiri	(Keuangan)	Sumardi	Syodanco.
Daidanki-Syodanco		Wahono	Syodanco.
Syidokan	(Pelatih)	Mitshutani	Cu-ii.

Cudan I (Ki Trailleurs)

Cudanco	(Kmd. Ki.)	Suhudi	Cudanco.
Syodanco I	(Kmd. Pel. I)	Kusdi	Syodanco.
Syodanco II	(Kmd. Pel. II)	Mulyoharjono	Shodanco.
Syodanco III	(Kmd. Pel. III)	S. Jono	Syodanco.

Cudan II (Ki Trailleurs)

Cudanco	(Kmd. Ki)	Hasannawawi	Cudanco.
Syodanco I	(Kmd. Pel. I)	Munjiat	Shodanco.
Syodanco II	(Kmd. Pel. II)	Sunyoto	Syodanco.
Syodanco III	(Kmd. Pel. III)	Suparyono	Syodanco.
Syidokan Cudan I dan II		Kimura	Syo-ii.

Cudan III (Ki bantuan dan senjata berat)

Cudanco	(Kmd. Ki.)	Ciptoharsono	Cudanco.
Syodanco I	(Kmd. Pel. I)	Supriyadi	Shodanco.
Syodanco II	(Kmd. Pel. II)	Muradi	Shodanco.
Syodanco III	(Kmd. Pel. III)	Sukemi	Syodanco.

Cudan IV (Ki Trailleurs)

Cudanco	(Kmd. Ki.)	Suyatmo	Cudanco.
Syodanco I	(Kmd. Pel. I)	Akhiyat	Syodanco.
Syodanco II	(Kmd. Pel. II)	Sukiyat	Syodanco.
Syodanco III	(Kmd. Pel. III)	Suwarna	Syodanco.
Syidokan Cudan III dan IV		Iwabuci	Syi-ii. ¹³⁵⁾

Hidup prajurit Peta di dalam lingkungan *daidan* dipusatkan pada masalah kewajiban dan kesejahteraan pribadinya. Sedangkan kewajibannya terdiri atas dua kegiatan, pertama latihan, dan kedua membuat kubu-kubu (*jinci*). Dalam melaksanakan kewajibannya para *cudanco* dibantu oleh seorang *syidokan* (Perwira), serta *syido-kasyikan* (bentara). Pada umumnya hubungan antara perwira Peta dengan para *syidokan*-nya dapat berjalan dengan baik, bahkan sering menjadi akrab. Tetapi hubungan dengan para *syido-kasyikan*-nya pada umumnya menjadi tegang. Hal ini rupanya disebabkan, oleh karena adanya diskriminasi antara tentara Peta dengan militer Jepang.

Di kalangan masyarakat, kedudukan dalam Peta dianggap kedudukan yang tinggi, bahkan status mereka seringkali dipandang lebih tinggi dari seorang kepala daerah. Tetapi di kalangan militer Jepang sendiri mereka, terutama para perwiranya, dipandang lebih rendah. Hal ini tampak dengan adanya kenyataan, bahwa tamtama Jepang yang paling rendah pangkatnya sekali pun menghendaki supaya perwira-perwira Indoneesia juga memberi hormat terlebih dahulu kepada mereka. Hal ini tentunya dapat menyinggung harga diri perwira Peta Indonesia, yang merasa telah mempunyai lambang status perwira berupa pedang yang diberikan pada waktu pelantikan, sehingga timbullah suasana saling membenci antara perwira-perwira Indonesia dengan bentara serta tamtama Jepang. Kebencian perwira Indonesia makin mendalam, apabila ia telah mengalami pengaruh nasionalisme yang mendambakan kemerdekaan Indonesia.

Kebencian terhadap Jepang makin memuncak ketika anggota *daidan* Peta mengalami kekecewaan, karena mereka telah menyaksikan sendiri kemelaratan dan kesengsaraan rakyat, sebagai akibat perlakuan fasisme Jepang. Kebencian

dan kekecewaan kemudian tumbuh menjadi frustrasi, dan frustrasi tumbuh menjadi semangat berontak di kalangan Peta.¹³⁶⁾

Kasus yang demikian ini telah terjadi di kalangan Peta *Dai II Daidan* Blitar.

Dalam triwulan pertama tahun 1944, yakni periode terawal dari pada eksistensinya, para anggota *daidan* Peta di Blitar sedang melaksanakan kegiatan latihan dasar dan latihan tempur (*sentō kyōren*). Secara sistematis mereka diisolasi dari masyarakat luas, karena mereka tidak mendapat libur dan tidak mempunyai kesempatan untuk meninggalkan kompleks kesatrian. Baru sejak triwulan kedua 1944, setelah periode latihan tempur selesai, *Cudan I* dan *Cudan II* ditempatkan di luar kota Blitar untuk menjalankan latihan pertahanan dan persiapan perang gerilya. Selain itu anggota *daidan* Blitar mendapat kesempatan cuti untuk mengunjungi sanak keluarganya. Pada waktu itu prajurit Peta Blitar mulai melihat kondisi sosial ekonomi rakyatnya yang makin memburuk dan kehidupan rakyat yang penuh penderitaan, akibat tindakan pemerintah Jepang. Di situ mereka mulai melihat bahwa banyak rakyat jelata berpakaian bagor. Pada waktu itu mereka mulai mendengar cerita tentang bagaimana para petani dipaksa menjual padinya ke *kumiai* (organisasi pembelian padi) dengan harga murah dan lebih banyak dari kuota yang telah ditentukan. Akibatnya para petani tidak mempunyai cukup beras untuk dimakan dan untuk digunakan sebagai benih. Pada waktu itu pula mereka mendengar cerita tentang pembelian telur besar-besaran dengan harga murah, dengan alasan untuk Peta, padahal prajurit Peta tidak pernah diberi makan telur. Mereka juga mendengar bahwa di antara penduduk yang kehilangan dan menyerahkan anak-anak gadisnya dengan terpaksa kepada Jepang, yang

dengan bujukan akan disekolahkan ke Tokyo, akhirnya terdapat di kota Surabaya menjadi pemuas hawa nafsu serdadu-serdadu Jepang.¹³⁷⁾ Sebagai prajurit yang telah mendapat gemblengan mental kesatria dan sebagai pejuang yang mempunyai kesadaran Nasional, segala apa yang telah mereka dengar dengan mereka lihat tersebut tentunya merupakan bahan pemikiran dan bahan renungan yang sangat berharga.

Dalam periode triwulan ketiga seluruh *daidan* Blitar mendapat perintah untuk membuat kubu-kubu (*jinci*) di sepanjang pantai selatan kabupaten Blitar. Pelaksanaan pembuatan kubu-kubu tersebut dilakukan oleh *romusya* dengan pengawasan prajurit Peta. *Romusya* yang pada hakekatnya pekerja paksa itu berasal dari penduduk desa. Tanpa dibayar *romusya* harus membuat kubu-kubu dan mereka mendapat perlakuan di luar batas perikemanusiaan. Mereka harus bekerja keras, akan tetapi makanan mereka tidak teratur dan mereka tidur di alam bebas karena tidak dibuatkan kemah. Dalam keadaan lemah lunglai mereka terhuyung-huyung mengangkat kayu, atau batu dan pasir, tanpa mendapat kesempatan istirahat. Jika beristirahat sebentar pengawasan *romusya* bangsa Jepang telah memakinya atau memukulnya. Kesehatan mereka juga tidak terurus, sehingga sebagian besar di antara mereka banyak yang mati karena menderita sakit disentri, malaria, beri-beri, atau karena perlakuan yang buruk. Kekurangan tenaga tersebut kemudian diisi dengan *romusya* baru, yang dikerahkan dengan paksa dari desa-desa sekitarnya.

Nasib dari *romusya* yang baru ini pun tidak berbeda dengan *romusya* angkatan terdahulu. Rasa marah dan benci makin berkembang di kalangan prajurit Peta setelah menyaksikan para *romusya* yang mati seperti lalat di sekitar mereka. Sering kali timbul pertengkaran antara Perwira dan bawah-

an Peta dengan pengawas *romusya* bangsa Jepang, yang sering pula memuncak menjadi perkelahian. Tetapi setiap kali prajurit Peta harus menahan diri, karena ancaman pengadilan militer Tentara Kamaharajaan Jepang.

Kebencian prajurit Peta Blitar terhadap bangsa Jepang makin memuncak ketika pada triwulan terakhir tahun 1944, daidan Blitar ditugaskan lagi untuk membuat kubu-kubu di Lembang Ngantang antara Gunung Kelud, Kawi, dan Anjasmara. Sekali lagi mereka harus menyaksikan penderitaan, kesengsaraan dan kedatangan *romusya* yang kemudian mati. Penderitaan *romusya* kali ini lebih memilukan lagi, karena lelaki dari desa-desa sekitarnya sudah menipis, *romusya* wanita mulai dikaryakan. Dengan fisiknya yang lemah, lebih banyak korban yang jatuh. Di samping itu mereka mendingar kematian anak-anak yang terpaksa ditinggalkan ibunya karena menjadi *romusya*. Tidaklah mengherankan bahwa amarah dan kebencian di kalangan anggota-anggota *daidan* Blitar mencapai puncaknya.¹³⁸⁾

Kemarahan, kebencian dan frustrasi selama berbulan-bulan inilah yang rupanya mengobarkan semangat berontak. Semangat berontak tersebut kemudian mendapatkan sasaran setelah janji September 1944 Koiso untuk memberikan kepada Indonesia di kelak kemudian hari diumumkan. Mulailah terdengar desas-desus yang makin lama semakin santer, bahwa Peta merencanakan pemberontakan terhadap Jepang dan merebut kemerdekaan dengan kekuatan senjata.¹³⁹⁾

2. Proses Perlawanan

a. Masa Persiapan

Pada masa triwulan ketiga tahun 1944, ketika para anggota Peta *Dai II Daidan* Blitar sedang menjalankan tugas membuat kubu-kubu (*Jinci*) di pantai Blitar Selatan, tidak

sedikit di antara anggota Peta yang jatuh sakit, di antaranya *Dai III Cudan Sennin Syodanco* (*Syodanco* tertua dalam *Cudan*) Supriyadi. Penyakitnya sedemikian parah sehingga memerlukan perawatan di *Daidan Imuzitsu* (Kamar Sakit Kesatrian/Asrama) di Blitar, di bawah perawatan *Eisi Cudaco* (Perwira Kesehatan) dr. Ismangil. Selama dalam perawatan *Syodanco* Supriyadi selalu mendengar ucapan-ucapan dan melihat sikap para *Syidokan* (pelatih Jepang) yang sangat tidak senonoh terhadap dokter yang merawatnya. Hal yang demikian itu rupanya terkesan pula dalam hati sanubari *Syodanco* Supriyadi.¹⁴⁰⁾

Tentang bagaimana hubungan *Syodanco* Supriyadi dengan *cudanco* dr. Ismangil, tidak ada data penjelasannya. Namun dalam perkembangan selanjutnya *cudanco* dr. Ismangil oleh para pemimpin pemberontakan Peta *Dai II Daidan* diangkat sebagai penasehat utama. Sedangkan menurut pendapat Nugroho Notosusanto, *Cudanco* dr. Ismangil adalah tokoh peletak dasar ide-ide (*man of ideas*) pemberontakan Peta di Blitar.¹⁴¹⁾

Selain itu masih ada lagi seorang tokoh aliran kebatinan yang juga berpengaruh dalam tahap perencanaan pemberontakan Peta di Blitar, yaitu tokoh Mbah Bendo, yang oleh para pemimpin pemberontakan Peta di Blitar dianggap sebagai guru kebatinan mereka.¹⁴²⁾

Apabila kedua tokoh tersebut diduga sebagai peletak dasar idea pemberontakan, maka kenyataan telah menunjukkan bahwa pelaku (*man of action*) dan pemrakarsa pemberontakan adalah *Syodanco* Supriyadi dan Muradi, yang dalam tahap perencanaan dibantu oleh *Budanco* Halir Mangkudijaya dan *Budanco* Sunanto, dengan melalui rapat-rapat rahasia.¹⁴³⁾

Pada saat *Syodanco* Supriyadi agak sembuh dari sakitnya, ia sering berkunjung ke rumah teman-teman *syodanco Honbu* (Perwira Staf). Di situ mereka berdiskusi tentang kemelaratan dan kesengsaraan rakyat Blitar. Di situ pula ia mendengar dari *Keiri Syodanco* (Perwira Keuangan) Sumardi, yang sering pergi dinas ke *bo-eitai* (Batalyon tentara Jepang) Katagiri di Malang dan selalu bertemu dengan rekan-rekan Peta dari *daidan* lainnya, bahwa perlakuan para *Syidokan* terhadap para anggota Peta di *daidan* lain ternyata lebih baik apabila dibandingkan dengan apa yang telah berlaku di *Dai II Daidan* Blitar. Hal ini tentunya menambah rasa kecewa dan rasa benci terhadap Jepang, yang kemudian menimbulkan usaha dari para Perwira Peta *Dai II Daidan* Blitar (misalnya: *Cudanco* Ciptoharsono, *Cudanco* Hasannawati, *Cudanco* Suyatmo, *Syodanco* Wahono dan *Syodanco* Supriyadi) untuk menentang tindakan-tindakan dan tingkah laku para *Syidokan* yang merendahkan diri mereka, dalam batas kemampuan mereka.

Pertengkaran sering terjadi antara para perwira Peta dengan para *Syidokan*, terutama dengan para *Syido Kansyikan-nya* (bentara pelatih), yang kemudian memuncak menjadi perkelahian. Akan tetapi sering kali para perwira Peta harus menahan diri, karena ancaman pengadilan militer oleh tentara Kemaharajaan Jepang selalu menghantui diri mereka.

Demikianlah pada suatu ketika (jam 21.00) *Syodanco* Wahono dan *Syodanco* Supriyadi menentang pengikut *Syidokan Dai II Cudan Hozino Gunco*, mereka berdua mendapat hukuman berdiri dengan sikap tegap sampai jam 02.00 malam.¹⁴⁴⁾

Jiwa yang tertekan karena kekecewaan terhadap keadaan, kebencian terhadap tatanan asing dan frustrasi yang ber-

bulan-bulan adalah salah satu faktor pendorong yang kuat untuk mengadakan gerakan perlawanan/protes. ¹⁴⁵⁾

Syodanco Supriyadi dan kawan-kawan memastikan diri untuk melakukan perlawanan. Namun demikian kekuatan fisik militer Jepang sangat unggul, sehingga tidak mungkin teratasi oleh mereka. Untuk melawan kekuatan fisik militer Jepang itu, akhirnya *Syodanco* Supriyadi dan kawan-kawannya mencari kekuatan batin dengan jalan berguru kepada seorang aliran kebatinan yang terkenal dengan sebutan "Mbah Bendo", karena bertempat tinggal di desa Bendo, kira-kira 2 Km. di sebelah utara kota Blitar. Di situ *Syodanco* Supriyadi seteman mendapat petunjuk, petunjuk, gemblengan mental dan mungkin mendapat *ngelmu* (ajaran tentang mistik /kesaktian) dari mbah Bendo, yang kiranya sangat diperlukan sebagai landasan keyakinan dalam mengadakan pemberontakan. ¹⁴⁷⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, apabila tokoh-tokoh dr. Ismanggil dan mBah Bendo diduga sebagai peletak dasar idea pemberontakan, maka kenyataan telah menunjukkan bahwa pelaku (*man of action*) dan pemrakarsa pemberontakan adalah *Syodanco* Supriyadi dan *Syodanco* Muradi, yang dalam tahap perencanaannya dibantu oleh *Bundanco* Halir Mangkudijaya dan *Bundanco* Sunanto, dengan melalui rapat-rapat rahasia. ¹⁴⁸⁾

Demikianlah pada waktu malam (jam 23.00) pertengahan bulan September 1944, atas prakarsa *Syodanco* Supriyadi yang disokong oleh *Syodanco* Muradi, dimulailah rapat rahasia yang pertama kali di kamar tidur *Soeiji Bundanco* (bentara urusan dapur) Halir Mangkudijaya, yang terletak ± 100 meter dari kantor *Kempeitai* Blitar. Rapat tersebut dihadiri

oleh enam orang *Syodanco* dan enam orang *Bundanco*, yang namanya sebagai berikut :

1. *Syodanco* Supriyadi (dari *Dai III Cudan*)
2. *Syodanco* Muradi (dari *Honbu*)
3. *Syodanco* Suhadi (dari *Honbu*)
4. *Syodanco* Sumardi (dari)
5. *Syodanco* Sukiyat (dari *Dai IV Cudan*)
6. *Syodanco* Tarmuji (dari *Honbu*)
7. *Bundanco* Sunanto (dari *Dai III Cudan*)
8. *Bundanco* Suyono (dari *Honbu*)
9. *Bundanco* Halir Mangkudijaya (dari *Honbu*)
10. *Bundanco* Sukaeni (dari *Dai I Cudan*)
11. *Bundanco* Tarmuji (dari *Honbu*)
12. *Bundanco* Sofkan (dari :
ada data lain yang me-
nyebut *Bundanco* Su-
darmo dari *Dai III Cu-
dan*).¹⁴⁹⁾

Oleh karena sempitnya tempat, maka hanya *Syodanco* Supriyadi dan *Syodanco* Muradi sajalah yang duduk di kursi menghadap sebuah meja kecil, sedangkan para hadirin lainnya berdiri. Dalam berdiskusi para hadirin menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Dalam rapat tersebut *Syodanco* Supriyadi mengusulkan agar para hadirin menanggalkan tanda pangkatnya, sehingga dengan demikian mereka mempunyai status yang sama tanpa ada perbedaan pangkat. Selanjutnya ia menekankan perlunya ada pemberontakan, berhubung makin menghebatnya kesengsaraan dan penderitaan rakyat biasa di bawah telapak kaki orang Jepang. Ternyata prakarsa *Syodanco* Supriyadi untuk meng-

adakan pemberontakan disetujui oleh para hadirin, dan kemudian secara samar-samar ditentukan tujuan pemberontakan sebagai pengorbanan untuk sedikitnya memperingatkan kepada orang Jepang, dan selanjutnya diharapkan adanya perbaikan keadaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh salah seorang hadirin dikatakan, bahwa mereka yang telah setuju ini semua berarti menanda tangani surat mati, karena putusan setuju ini, berarti pula menantang mau, oleh karenanya jangan mengharapkan akan dapat hidup, sebab musuhnya sudah terang diketahui bukan tandingnya sama sekali. Semuanya telah bertekad bulat biarpun mereka semua (seluruh *Daidan*) akan hancur lebur, akan tetapi mereka percaya, bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia, sedikitnya akan dapat memperingatkan kepada Jepang, dan selanjutnya perbaikan keadaan untuk seluruh Indonesia tentu ada.¹⁵⁰⁾

Sebelum dapat dibubarkan mereka telah mengadakan pembagian tugas untuk memberitahukan anggota-anggota *daidan*, menghubungi orang-orang tertentu di kota Blitar di luar *daidan* maupun orang-orang dari *daidan-daidan* Peta lain untuk diikutsertakan di dalam pemberontakan.

Dua bulan lamanya mereka menjalankan tugas tersebut, untuk pertama kalinya. Dalam pada itu para anggota *Cudan* sibuk membangun kubu-kubu di lembah Ngantang, yang pada akhirnya *Cudan* yang bersangkutan dibebani tugas mempertahankan masing-masing kubu yang dibangunnya. Di lembah Ngantang itulah rasanya kecewa dan benci terhadap orang Jepang dari para anggota Peta *Dai II Daidan* Blitar makin berkobar, akibat tindakan orang-orang Jepang di luar batas kemanusiaan terhadap para *romusya* wanita yang tak berdaya.

Sementara itu posisi pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya/Perang Pasifik makin terdesak. Dalam bulan Juli 1944 Armada Sekutu (USA) di bawah komando Mac Arthur dapat merebut Pulau Saipan dan Guam yang termasuk Kepulauan Marianas di Lautan Pasifik. Jatuhnya pulau Saipan sebagai mata rantai penghubung antara Indonesia dengan negeri Jepang, bagi pihak Jepang merupakan suatu pertanda, bahwa perhubungan antara negeri induk (Jepang) dengan daerah pendudukannya akan terputus. Akibatnya Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniako Koiso memandang perlu mengambil suatu tindakan untuk mempertahankan pengaruh Jepang di antara penduduk negeri-negeri yang didudukinya. Demikianlah pada tanggal 7 September 1944 P.M. Koiso mengumumkan " Janji Kemerdekaan Hindia Timur (*To Indo* = Indonesia), di kemudian hari", dengan syarat apabila kemenangan berada di pihak Jepang. Pernyataan tersebut jelas merupakan suatu siasat Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia, agar lebih giat membantu Jepang dalam mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Meskipun demikian banyak rakyat Indonesia yang menyambutnya dengan gembira. Untuk menyatakan kegembiraan tersebut di mana-mana dikibarkan bendera Merah-Putih di samping bendera Jepang *Hinomaru* dan diperdengarkan pula lagu Indonesia Raya. Kejadian ini sebenarnya melanggar Undang-Undang No. 4, yang telah diumumkan pada tanggal 20 Maret 1942, tetapi anehnya rakyat Indonesia yang melanggar aturan hukum tersebut tidak ditindak, bahkan pada tanggal 8 September 1944, *Seiko Sikikan* di Jawa mengeluarkan Maklumat No. 6 yang isinya memperkenankan pemakaian bendera Kebangsaan Indonesia Merah-Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.¹⁵¹⁾

Peristiwa "Janji Tokyo" atau "Janji September"

oleh perdana Menteri Koiso tersebut rupanya menarik perhatian pula bagi kelompok *Syodanco* Supriyadi. Namun demikian oleh karena pada waktu itu (triwulan ke IV tahun 1944) *Cudan-Cudan Dai II Daidan* Blitar, sedang dalam keadaan terpecah di luar kota Blitar, sehingga rapat-rapat rahasia hanya dapat diadakan, apabila mereka sedang pergi ke kota Blitar (*Daidan*) untuk suatu keperluan yang bersamaan waktunya, maka rapat rahasia kedua baru dapat berlangsung pada bulan Nopember 1944.

Demikianlah setelah dua bulan melaksanakan tugasnya, maka pada malam hari bulan Nopember tahun 1944, kelompok *Syodanco* Supriyadi mengadakan rapat rahasia kedua di tempat yang sama, dan dihadiri oleh orang-orang yang sama pada rapat rahasia pertama. Di situ setiap petugas rapat pertama melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing. Usaha-usaha untuk menarik orang dari kalangan *daidan* Blitar sendiri cukup memuaskan. Demikian pula, hubungan dengan *daidan-daidan* di Jawa Timur (Tulungagung, Kediri, Malang, Lumajang, Madiun dan Surabaya), Jawa Tengah (Yogyakarta) dan bahkan Jawa Barat (Jakarta, Tangerang dan Bandung) telah disampaikan. Sedangkan hubungan dengan tokoh-tokoh di dalam kota Blitar sendiri belum berhasil. Selanjutnya *Syodanco* Supriyadi menerangkan tentang berita yang telah didengarkan, bahwa setelah pihak Jepang menyatakan akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia, di kota Malang berdirilah suatu organisasi gelap di bawah tanah, dengan nama "Anti Indonesia Merdeka", yang terdiri dari orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia mendapat kemerdekaan. Adapun tujuan organisasi ini, akan menghalangi dan menyabot apabila kemerdekaan benar-benar diberikan kepada bangsa Indonesia oleh Jepang. Maka dari itu dipesankan kepada semua hadirin, apabila nanti pemberon-

takan telah dicetuskan, gerakan AIM tersebut harus ditumpas habis-habisan. Malam itu rapat ditutup dengan saran agar para petugas lebih giat melanjutkan usaha masing-masing, sambil menunggu berita dari *daidan-daidan* lain yang telah dihubungi, sampai di mana usaha mereka. ¹⁵²⁾

Dari uraian tersebut di atas, nampaklah bahwa berita mengenai "Janji Tokyo" atau "Janji Kemerdekaan Indonesia Di Kemudian Hari" oleh Perdana Menteri Koiso, telah tersiar di kalangan Tentara Peta *Daidan* Blitar. Dalam suasana jiwa tertekan oleh karena rasa kecewa dan benci sebagai akibat menyaksikan kehinaan, kesengsaraan dan penderitaan rakyat, serta suasana terhimpit oleh kekuasaan mutlak orang asing yang tak dapat dielakkan. Dalam suasana mental yang demikian ini rupanya dalam kelompok *Syodanco* Supriyadi timbul aspirasi usaha pembebasan dan perbaikan nasib rakyat dari kesengsaraan dan penderitaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pembebasan tersebut kemudian dihubungkan dengan cita-cita Kemerdekaan Nasional. Kemerdekaan berarti kebebasan untuk mengatur hidup sendiri. Kemerdekaan juga berarti mempunyai harga diri yang sederajat dengan bangsa lain (asing). ¹⁵³⁾

Hal itu tercermin dalam pembicaraan kelompok *Syodanco* Supriyadi dalam rapat rahasianya yang kedua. Selanjutnya, semangat mereka untuk memberontak makin berkobar setelah mendengar desas-desus yang mula-mula lembut, tetapi makin lama makin santer, bahwa Tentara Peta hendak melawan Jepang dan merebut Kemerdekaan dengan kekuatan senjata. "Bersiaplah" demikian sembyoan yang dibisikkan dari *cudan* ke *cudan*, dari *syodan* ke *syodan*, dan dari *bundan* ke *bundan*. ¹⁵⁴⁾ Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila ada kesempatan pemberontakan Peta *Daidan* Blitar mudah meletus.

Menjelang bulan Januari 1945, semua *Cudan Dai II Daidan* Blitar ditarik ke kota Blitar (ke *Daidan*) dari *Cuton* masing-masing untuk selanjutnya dipersiapkan ikut serta dalam latihan perang-perangan secara besar-besaran bersama-sama dengan 10 *Daidan* dari seluruh Jawa Timur, yang akan diadakan di daerah Tuban (Karesidenan Bojonegoro). Kesempatan yang baik itu rupanya tidak dilewatkan begitu saja oleh kelompok *Syodanco* Supriyadi, sehingga pada pertengahan bulan Januari 1945, mereka mengadakan rapat rahasia ketiga, di tempat biasanya dan dihadiri oleh kedua belas tokoh yang semula. Dalam rapat tersebut *Syodanco* Muradi membakar semangat pemberontak para hadirin dengan menyampaikan berita yang didengarnya, bahwa dengan maksud agar seluruh penduduk Indonesia menjadi Indo-Jepang, maka Pemerintah Pendudukan Jepang telah merencanakan pembunuhan massal terhadap semua orang laki-laki bangsa Indonesia yang berpendidikan menengah ke atas sedikit demi sedikit. Setelah mendengar keterangan ini semua hadirin sangat marah, sehingga kemudian diputuskan apabila ada kesempatan yang baik suatu pemberontakan umum akan dicetuskan di Tuban, dengan mengikut-sertakan *daidan-daidan* yang lain. Seorang anggota pemberontak akan ditugaskan untuk mengangkut amunisi dari Blitar ke Madiun, yang merupakan daerah yang dituju oleh *Daidan* Blitar setelah pemberontakan meletus. ¹⁵⁵⁾

Demikianlan persiapan pemberontakan mulai dilakukan. Dalam pada itu rupanya *Syodanco* Supriyadi telah mengadakan hubungan dengan mBah Bendo, sehingga ia diberi beberapa bilah keris kecil terbuat dari bambu Ampel, dengan kerangka (sarung) dari batang jarak, untuk dibagikan kepada rekan-rekannya yang dapat dipercaya. Ada yang menafsirkan bahwa benda tersebut merupakan petuah mBah Bendo

yang berupa lambang agar supaya para anggota pemberontak walaupun penuh keberanian hendaklah selalu waspada atau beriman.¹⁵⁶⁾

Selain itu secara kebetulan *Dai III Cudanco* Ciptoharsono pada waktu itu sedang sakit (kaki), dan pimpinan *Cudan* diserahkan kepada *Syodanco Supriyadi*. Dengan demikian maka *Syodanco* Supriyadi mempunyai kesempatan secara langsung untuk menyampaikan niat-niat pemberontakan kepada anak buah *Dai III Cudan* seluruhnya.¹⁵⁷⁾

Pada tanggal 19 Januari 1945 para anggota pasukan *Dai II Daidan* Blitar berangkat dengan kereta api menuju Tuban, dengan melewati Surabaya. Oleh karena senjata yang dibawa pasukan pada waktu itu tanpa peluru, maka atas inisiatifnya sendiri *Heiki Bundanco* Suyono secara diam-diam membagikan peluru kepada para pengikut rapat rahasia, dan orang-orang yang mengerti akan rencana pemberontakan, dengan maksud siap siaga. Setelah berada di Tuban, sekali lagi tentara Peta *Daidan* Blitar menyaksikan kesengsaraan dan penderitaan rakyat, yang menambah keyakinan, bahwa pemberontakan harus dimulai, tinggal menunggu kesempatan yang baik. Namun kesempatan yang ditunggu tak kunjung tiba, oleh karena latihan bersama dibatalkan dan semua pasukan harus kembali ke *Daidannya* masing-masing. Pasukan *Dai II Daidan* Blitar tiba kembali di kota Blitar pada tanggal 29 Januari 1945. Dengan demikian rencana pemberontakan umum yang akan mengikut sertakan 10 *Daidan* seluruh Jawa timur mengalami kegagalan.¹⁵⁸⁾

Dua hari kemudian, dalam rapat rahasia yang keempat yang diadakan pada tanggal 1 Pebruari 1945 tengah malam ($\pm$ jam 23.30), *Syodanco* Supriyadi mengusulkan agar supaya pemberontakan segera dicetuskan, karena ia beranggapan

bahwa rencananya sudah diketahui oleh Jepang. Namun usul tersebut ditolak oleh rapat, dengan alasan bahwa para prajurit masih lelah setelah perjalanan yang panjang.

Sementara itu keadaan di *Daidan* Blitar bertambah tegang dan suasana kehidupan sehari-hari bertambah suram, karena air sulit dan lampu pun mati. Selain itu telah tersiar kabar bahwa pada waktu malam hari ada *Syidokan* yang secara diam-diam mengelilingi *Daidan* dengan tujuan yang mencurigakan. Dalam situasi yang demikian itu rapat rahasia ke V diadakan pada tanggal 9 Pebruari 1945 tengah malam ($\pm$ 23.30). Di situ *Syodanco* Supriyadi sekali lagi mendesak teman-temannya untuk segera memulai pemberontakan. Usul tersebut juga ditolak oleh rapat dengan alasan, bahwa sampai saat itu mereka belum menerima jawaban definitif dari *daidan-daidan* lain mengenai kesediaan mereka untuk ikut serta di dalam pemberontakan. Selain itu mereka mengingatkan petuah Mbah Bendo, bahwa saat pencetus pemberontakan masih tiga atau empat bulan lagi dan harus dimulai dari Yogyakarta.¹⁵⁹⁾

Sementara itu di Ksatrian *Dai II Daidan* Blitar terjadi tiga peristiwa yang memperkuat dugaan *Syodanco* Supriyadi dan memaksa para perencana pemberontakan untuk pada akhirnya memutuskan akan segera melancarkan pemberontakan.

Pada tanggal 11 Pebruari 1945 (sore hari), seorang kopral Jepang (*Syido-Kasikan Hozino Gunzo*) berkeliling sekitar *daidan* dalam keadaan mabuk sambil berseru berulang-ulang: "*Syodanco* mau berontak ya !" Pecahlah perkelahian antara kopral Jepang yang mabuk itu dengan seorang *Syodanco*, yang kemudian dipisah oleh *Daidanco* dan *Sennin Syidokan*. Kopral itu lalu pergi berlari, tetapi kemudian kembali lagi dengan membawa pedang (*Samurai*), terhu-

nus. ¹⁶⁰⁾ ke sana ke mari mencari *Syodanco* Supriyadi. Pada waktu itu *Syodanco* Supriyadi sedang memimpin latihan di lapangan Kepanjen Lor Blitar. Demi keselamatan temannya, *Syodanco* Muradi segera menghubungi dan menyarankan *Syodanco* Surpiyadi sebaiknya sore hari itu ia tidak kembali ke asrama dulu, sebelum keadaan menjadi tenang. ¹⁶¹⁾ Sedangkan Kopral yang mabuk itu kemudian ditantang oleh salah seorang *Syodanco* lain yang juga mencahut pedangnya. Tetapi mereka dapat dipisah oleh *Sennin Syidokan*. ¹⁶²⁾

Dengan demikian situasi Kesatrian *Daidan* Blitar menjadi panas. Situasi tersebut makin panas setelah terdengar desas-desus, bahwa amunisi (persediaan untuk satu kali perang) *daidan* akan dikirim ke Surabaya pada tanggal 14 Pebruari 1945, kecuali beberapa butir peluru untuk keperluan latihan. ¹⁶³⁾

Apabila hal itu sampai terjadi, sejak semula pemberontakan akan gagal karena tiadanya amunisi. Selain itu ada pula perintah, bahwa semua *Cudan* pada tanggal 20 Pebruari 1945 harus kembali ke tempat *Cuton* masing-masing di lembah Ngantang. Apabila hal itu sampai terjadi, maka kekuatan pemberontak akan terpecah. ¹⁶⁴⁾

Dalam suasana tegang dan eksplosif itu, mka pada tanggal 13 Pebruari 1945 malam hari ($\pm$ jam 23.00) datanglah *Syodanco* Supriyadi ke Kesatrian *Daidan* Blitar untuk mengadakan rapat rahasia ke VI dan yang terakhir. Sekali lagi ia mendesak kawan-kawannya untuk memulai pemberontakan seketika itu juga. Ia memperingatkan kawan-kawannya, bahwa mereka sendiri telah melihat berbagai indikasi, bahwa orang Jepang telah menjadi curiga. Mereka dapat ditangkap setiap saat dan menghadapi siksaan atau bahkan mau di tangan *Kempeitai*, yang terkenal kejam itu. Ia menganggap lebih

baik mati dalam pertempuran daripada mati secara tidak berdaya. Usul tersebut ternyata dapat diterima oleh rapat dan selanjutnya rapat menyepakati pula suatu rencana, bahwa pasukan-pasukan pemberontak akan meninggalkan kota Blitar dalam empat koloni. Satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan dan satu ke timur. Rupa-rupanya mereka telah memikirkan penggunaan taktik perang gerilya dengan mengadakan pertahanan di lereng-lereng gunung Kelud (di sebelah utara kota Blitar) yang penuh hutan jati itu, sambil berusaha menggerakkan *daidan-daidan* di sekitarnya untuk ikut berontak. Pada rapat terakhir itu *Syodanco* Muradi menegaskan perlunya semua orang Jepang dibunuh, semakin sedikit orang Jepang yang tinggal semakin baik. Hal ini dilakukan oleh karena mereka telah membayangkan, bahwa pasukan Jepang akan menghadapi mereka dengan perlawanan yang gigih. ¹⁶⁵⁾

Setelah rapat berakhir dan setelah selesai mengatur siasat, *Syodanco* Supriyadi pergi ke kantor telpon untuk menelpon Bupati, Walikota dan Kepala Polisi, bahwa pasukan Peta mulai malam hari itu akan mengadakan latihan perang-perangan dengan menggunakan peluru kosong. Tindakan ini rupanya dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan pertempuran antara bangsa Indonesia sendiri. Selesai telpun *Syodanco* Supriyadi kembali ke asrama untuk melanjutkan persiapan-persiapan. ¹⁶⁶⁾

b. Jalan Perlawanan

Setelah persiapan selesai, semua pasukan pemberontak telah menerima bagian peluru dari *Heiki Bundanco* Suyono yang telah berhasil membuka gudang amunisi *Daidan* dan semua pasukan pemberontak telah dipesan oleh para pemimpinnya supaya jangan sekali-kali membunuh bangsa sendiri,

sebaliknya bunuhlah orang Jepang sebanyak-banyaknya, maka pemberontakan dimulai. ¹⁶⁷⁾

Demikianlah pada hari Rabu Wage, tanggal 14 Pebruari 1945 dini hari ($\pm$ jam 03.30), dalam suasana gelap gulita yang merupakan peralihan antara malam dan dini hari terdengarlah komando "*Hajimeet!*" (Mulai !), kemudian disusul dengan suara tembakan dua buah mortir yang masing-masing memuntahkan empat peluru yang ditujukan ke Hotel Sakura (sekarang Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar) di mana banyak orang Jepang Sipil (*Sakura*) bermalam. Selanjutnya terdengar suara salvo dari 12 karabijn dengan sasaran rumah *Syidokan*, serta suara tembakan dari tiga buah *Jukihandyu* (Mitraliur water-mantel) yang ditujukan ke rumah dan kantor *Kempeitai* (Polisi Militer Jepang). Ternyata kedua gedung itu kosong, hal ini membuktikan bahwa pihak Jepang memang sudah mengetahui akan adanya pemberontakan dan telah menyingkir. ¹⁶⁸⁾

Setelah tembakan-tembakan permulaan selesai, rombongan-rombongan pasukan Peta Blitar mulai meninggalkan *Daidan* untuk bergerak ke luar kota. Rombongan ke barat dipimpin oleh tiga orang *Syodanco* pasukan, yakni: Muradi, Suparyono, dan S. Jono. Sebelum pasukan ini meninggalkan kota Blitar, terlebih dahulu mengadakan pembunuhan terhadap orang-orang Jepang yang dijumpainya, membuka rumah penjara dan kemudian bergerak ke arah barat laut menuju ke arah yang ditentukan (Madiun). Setelah sampai di hutan Ngancar, pasukan ini beristirahat dan membuat pertahanan di situ. Sedangkan rombongan pasukan yang dipimpin oleh *Syodanco* Sunaryo bergerak ke utara menuju Paree dengan melalui perkebunan-perkebunan di utara Blitar. Di salah satu perkebunan mereka telah membunuh Jepang yang ada di sana. Ketika mereka menemukan bendera Jepang

(*Hinomaru*), bendera tersebut dikoyak begitu rupa sehingga merupakan bendera Merah-Putih. Sesudah itu bendera tersebut dikibarkan pada tiang semula sambil memberi hormat. Sesudah itu mereka meneriakkan kata-kata "Indonesia Merdeka!".¹⁶⁹⁾ Selanjutnya pasukan yang bergerak ke selatan kota Blitar (Lodoyo) sesungguhnya terdiri atas dua rombongan, yakni: rombongan terbesar di bawah pimpinan *Syodanco* Dasrip dan *Bundanco* Imam Bakri, dan rombongan yang lain di bawah *Bundanco* Tarmuji.¹⁷⁰⁾

Rombongan terakhir yang meninggalkan *Daidan* Blitar sebenarnya adalah pasukan di bawah pimpinan *Syodanco* Supriyadi dengan rencana bergerak ke arah timur. Namun untuk sementara pimpinan pasukan diserahkan kepada *Bundanco* Sunanto, karena *Syodanco* Supriyadi akan mendahului dan berjanji bertemu di desa Gandusari.¹⁷¹⁾ Sebelum pasukan ini bergerak meninggalkan *Daidan*, muncullah *Syodanco* Partoharjo dengan membawa bendera Merah-Putih yang sudah lama disimpannya, berjalan menuju ke lapangan depan (seberang) *Daidan* untuk mengibarkan bendera tersebut pada tiang bendera yang biasanya untuk mengibarkan bendera Jepang (*Hinomaru*). Setelah Sang Merah-Putih berkibar, ia mundur dua langkah, memberi hormat dengan khidmat, kemudian ia pergi menggabungkan diri dengan rekan-rekannya.¹⁷²⁾ Pasukan *Bundanco* Sunanto yang bergerak ke arah timur ini ketika sampai di desa Bence (antara Garum dan Talun) telah membunuh seorang Jepang pengurus perkebunan. Sesudah itu mereka bergerak menuju ke daerah Ngantan Pujon (Malang) dengan melalui desa Gandusari.¹⁷³⁾

Menurut rencana semula, pasukan-pasukan pemberontak tersebut meninggalkan Blitar dengan tujuan mengadakan gerilya di lereng gunung Kelud, sambil berusaha menggerak-

kan *daidan-daidan* di sekitarnya, untuk ikut berontak. Akan tetapi karena kondisi-kondisi untuk melaksanakan rencana tersebut belum matang, maka keempat rombongan itu tidak berhasil menyusun pangkalan-pangkalan gerilya dan tidak berhasil mengadakan konsolidasi. Akibatnya satu demi satu mereka dapat dibujuk untuk menghentikan gerakan mereka dan kembali ke *Daidan* Blitar.¹⁷⁴⁾

Dalam usaha menindas pemberontakan, orang Jepang menggunakan taktik adu domba, bujuk-rayu dan sejauh mungkin menghindari benturan senjata. Taktik adu domba dilaksanakan dengan menggunakan pasukan-pasukan pribumi untuk menghadapi bangsanya sendiri. Dua golongan Indonesia yang digunakan orang Jepang untuk membantu mereka menindas pemberontakan adalah: pertama kali *daidanco* dan para *cudanco* dari *daidan* Blitar sendiri (yang tidak diikuti sertakan dalam pemberontakan). Kelompok lainnya adalah satuan-satuan Peta maupun *Heiho* dari tempat-tempat lain, yang bersama-sama batalyon *Katagiri* dari Malang bergerak mengepung kaum pemberontak. Dalam mendekati para pemberontak, pihak Jepang menggunakan taktik "tinju besi dalam sarung tangan beludru". Artinya para pemberontak dihadapi dengan bujukan, rayuan lembut dan janji-janji, tetapi pada waktu yang sama mereka mengepung seluruh daerah pemberontakan dengan pasukan-pasukan yang dibantu dengan satuan berlapis baja dan artileri. Sedangkan taktik untuk menjauhkan diri dari benturan senjata dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya pemberontakan umum di seluruh Jawa. Pada waktu itu tentara keenambelas Jepang yang menduduki pulau Jawa dan Madura pasukan-pasukannya banyak yang diberangkatkan ke medan perang, sehingga pihak Jepang hanya mempunyai dua brigade di pulau itu. Kekosongan dalam barisannya diisi dengan pasukan-pasukan

Heiho yang dalam menghadapi bangsanya sendiri terang tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Tentara Peta sendiri terang lebih tidak dapat dipercaya lagi, terutama sekali karena berada di bawah pimpinan perwira-perwiranya sendiri yang paling sedikit banyaknya telah mempunyai kesadaran nasional. Di samping itu dalam setiap *daidan* Peta rupanya telah tumbuh bibit permusuhan dan kebencian antara perwira Peta dengan orang-orang Jepang, sebagai akibat tindakan para *Syidokan* yang merendahkan perwira Indonesia. Hanya karena siasat Jepang yang tidak mengadakan integrasi antara *daidan* yang satu dengan yang lain, maka pemberontakan Peta di Blitar itu dapat diisolasi. *Daidan-daidan* di luar Blitar dapat digerakkan untuk mengepung pemberontak, karena dikelabui dengan pemberitahuan, bahwa pasukan payung Sekutu telah mendarat di sekitar Blitar dengan menggunakan pakaian yang serupa dengan pakaian Peta. Sesungguhnya *daidan-daidan* lain pada waktu itu tidak mengetahui adanya peristiwa pemberontakan Peta di Blitar itu. Andaikata timbul pembenturan bersenjata antara pasukan-pasukan pemberontak dengan pasukan Jepang, pastilah beritanya akan tersebar dengan cepat ke segenap pelosok. Hal itu mungkin dapat merangsang *daidan-daidan* lainnya untuk mengangkat senjata melawan Jepang. Oleh karena itu Jepang akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membujuk para pemberontak agar supaya suka kembali tanpa mengadakan perlawanan.¹⁷⁵⁾

Demikianlah ketika pasukan *Bundanco* Sunanto sedang melepaskan lelah di perkebunan Kruwuk, dengan maksud akan bergerak ke desa Gandusari, pada tanggal 14 Pebruari 1945 itu juga tersusul oleh pasukan-pasukan Peta dari *daidan* lain yang disertai oleh komandan-komandan dari *daidan* Blitar sendiri. Para komandan itu telah diberi jaminan oleh

pihak Jepang, bahwa sebaiknya mereka berusaha menginsafkan anak buahnya yang berontak itu, supaya menyerahkan diri. Jika mereka menyerahkan diri tanpa mengadakan perlawanan, mereka tidak akan dituntut di depan pengadilan. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, mereka akan ditumpas habis. Jaminan tersebut berasal dari orang Jepang yang terkenal dengan semangat *busyido*-nya, maka dari itu para perwira *daidan* Blitar mempercayainya.

Setelah berhadapan dengan pasukan-pasukan Peta bangsanya sendiri, maka pasukan *Bundanco* Sunanto menjadi bimbang. Apalagi setelah para komandan *daidan* Blitar sendiri tampil ke muka dari tengah-tengah pasukan pengejar dan menganjurkan mereka dengan lemah lembut serta dengan sikap kebapaan, supaya mereka meletakkan senjata dan ikut pulang dengan mereka. Akhirnya mereka dapat dibujuk untuk menghentikan pemberontakannya. Senjata mereka serahkan dan mereka diangkut ke Blitar. Sesampai di Blitar, mereka dimasukkan ke dalam sel. ¹⁷⁶⁾

Pada hari yang kedua (tanggal 15 Pebruari 1945) pasukan pemberontak yang bergerak ke selatan bertemu dengan pasukan-pasukan Peta dari *daidan* Kediri yang dipimpin oleh seorang *Syidokan* bangsa Jepang. Karena melihat orang Jepang itu, mereka menjadi penasaran dan melepaskan tembakan ke arah orang Jepang itu, tetapi pelurunya tidak mengenai sasarannya, melainkan melukai seorang anggota Tentara Peta. Setelah timbul tembak-menembak, pasukan-pasukan *daidan* Blitar mengundurkan diri dan pasukan dari *daidan* Kediri melanjutkan perjalanan menuju ke Blitar. Sedangkan pasukan-pasukan pemberontak yang menuju ke selatan ini pada akhirnya dapat dibujuk oleh komandan-komandan dari *daidan* Blitar sendiri untuk diajak pulang ke Blitar. Sesampai di Blitar mereka juga segera dimasukkan sel. ¹⁷⁷⁾

Selanjutnya rombongan pasukan pemberontak yang bergerak ke utara, ketika berada di suatu desa di dekat Candi Penataran telah terkepung rapat oleh pasukan-pasukan Tenta-ra Peta dan Polisi bangsa Indonesia. Karena ingat akan pesan pemimpin mereka supaya jangan sekali-kali membunuh bangsa sendiri, mereka menjadi bimbang. Akhirnya *Syodanco* Sunarjo terpaksa mengambil keputusan menembus kepungan itu dengan berganti pakaian preman. Tetapi malang bagi mereka, karena sebagian besar tertangkap dan lainnya menyusul satu demi satu. ¹⁷⁸⁾

Apabila rombongan lain dengan mudah dapat dibujuk untuk kembali ke *daidan* Blitar, lain halnya dengan rombongan pasukan pemberontak yang bergerak ke barat laut. Kecuali rombongan ini jumlahnya jauh lebih besar, paling banyak memakan korban di pihak lawan, paling lama bertahan, juga mereka menghentikan pemberontakan dengan melalui jalan perundingan yang menghasilkan syarat-syarat tertentu.

Demikianlah ketika sedang berada di hutan Ngancar (hutan jati di lereng gunung Kelud) pasukan *Syodanco* Muradi dapat disusul oleh pasukan pengejar yang antara lain terdiri dari pasukan tank yang dilayani oleh para *Heiho*. Untuk membujuk pasukan *Syodanco* Muradi ini, pihak Jepang juga mengirimkan seorang *Cudanco* sebagai utusan. Tetapi usaha tersebut tidak mempan, bahkan *Syodanco* Muradi dapat memaksa *Cudanco* tersebut untuk menyertai mereka di dalam pertahanan mereka di hutan jati lereng gunung Kelud itu. Tokoh-tokoh lain kemudian dikirimkan oleh pihak Jepang kepada pasukan *Syodanco* Muradi itu, baik tokoh-tokoh Indonesia, maupun tokoh-tokoh Jepang yang mempunyai hubungan sangat baik dengan orang-orang Indonesia. Namun usaha inipun sia-sia belaka. ¹⁷⁹⁾

Pandangan Jepang kemudian tertuju kepada tokoh

mBah Bendo, guru *Syodanco* Muradi dalam bidang kebatinan, untuk dimintai bantuan memanggil pulang muridnya. Setelah berulang kali pihak Jepang (H. Shimitshu) mendesaknya, akhirnya mBah Bendo bersedia memanggilnya, asal pihak Jepang mau memenuhi permintaannya, yakni: Pertama, mereka tidak akan disiksa, kedua mereka tidak akan dibunuh dan ketiga mereka tidak akan dituntut di muka Hakim. Ketiga syarat ini ternyata disanggupi untuk dipenuhi oleh pihak Jepang, sehingga mBah Bendo terpaksa menemui *Syodanco* Muradi di hutan Ngancar.

Setelah mBah Bendo menjelaskan syarat-syarat yang telah diterima oleh pihak Jepang dan menerangkan, bahwa yang dihadapi oleh *Syodanco* Muradi bukanlah pasukan Jepang, tetapi pasukan bangsa Indonesia sendiri, maka *Syodanco* Muradi mau menghentikan pemberontakan, tetapi masih ada lagi syarat yang harus disetujui oleh pihak Jepang.¹⁸⁰⁾

Maka terjadilah perundingan antara *Syodanco* Muradi dengan Kolonel Katagiri, komandan Batalyon Jepang di Malang di sebuah rumah yang terletak antara pertahanan pasukan Peta Blitar dan pasukan pengepung.

Sebagai hasil perundingan itu, *Syodanco* Muradi dan kawan-kawannya bersedia kembali ke Blitar, apabila pihak Jepang menyetujui syarat-syarat, sebagai berikut :

- 1) Mereka tidak dilucuti dan kembali sendiri tanpa dikawal oleh pihak pengejar.
- 2) Setelah sampai Blitar mereka tidak dituntut di muka pengadilan.
- 3) Pihak Jepang harus mengambil tindakan dan jika perlu menghukum petugas-petugas yang berbuat kekejaman terhadap rakyat.

- 4) Martabat prajurit Tentara Peta serta perwira-perwiranya harus ditingkatkan sederajat dengan prajurit dan opsir-opsir Jepang.

Sebagai tanda bahwa ia akan menepati kesanggupannya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Kolonel Kata-giri menanggalkan pedangnya dan menyerahkannya kepada *Syodanco* Muradi. Hal ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa, sebab bagi seorang opsir Jepang penyerahan pedang samurai itu adalah perlambang penyerahan diri. ¹⁸¹⁾

Setelah perundingan selesai, *Syodanco* Muradi menemui teman-temannya. Ia menjelaskan kebijaksanaannya kepada mereka dengan dalih sebagai berikut :

- 1) Setelah beberapa malam bertahan di hutan-hutan, ternyata tidak timbul pemberontakan umum di kalangan *daidan-daidan* lain.
- 2) Bagaimanapun, mereka terpaksa akan berhadapan dan membunuh bangsa sendiri, jika memutuskan untuk mengadakan perlawanan, karena kesatuan-kesatuan Indonesia lainnya dapat ditipu oleh Jepang.
- 3) Mereka terkepung di dalam suatu hutan yang tidak ada bahan makanannya dan tidak ada penduduknya. Memang pada permulaannya mereka diberi makan oleh rakyat desa yang terdekat dari pertahanan mereka, tetapi hal itu dengan mudah dihentikan oleh pasukan pengepung.
- 4) Pemberontakan mereka itu kiranya telah mengenai sasarannya selaku demonstrasi senjata. ¹⁸²⁾

Dengan demikian pasukan-pasukan di bawah pimpinan *Sydanco* Muradi cs. turun dari pertahanannya untuk kembali ke Blitar. Pada tanggal 21 Pebruari 1945 ($\pm$ jam 18.00)

masuklah pasukan *Syodanco* Muradi cs. ke daidan Bitar dengan senjata di tangan. Sebelum pasukan ini turun dari pertahannya, *Syodanco* Muradi telah memberi kesempatan kepada mereka yang tidak mau ikut kembali ke kota untuk meninggalkan rombongannya. Banyak pula yang mempergunakan kesempatan itu, tetapi mereka kemudian tertangkap juga. ¹⁸³⁾

Dengan kembalinya pasukan *Syodanco* Muradi cs. ke *daidan* Blitar, berakhirilah pemberontakan Peta *Dai II Daidan* Blitar yang membawa akibat fatal bagi para pelakunya.

Selain para pemberontak yang dipimpin oleh para *Syodanco* dan *bundanco* Peta Blitar, masih ada lagi anak buah *Cudanco* Suyatmo yang meninggalkan *daidan* dan kemudian bergerak di dalam kota Blitar. Sebagaimana *Cudanco* pasukan lainnya, *Cudanco* Suyatmo tidak diikutsertakan di dalam pimpinan pemberontakan. Ia sebenarnya berkehen-
dak ikut serta memberontak, tetapi ia tidak mau di bawah komando *Syudanco*. Akhirnya ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyebar di dalam kota Blitar, sedang ia sendiri beserta stafnya bersembunyi di rumah salah seorang pemimpin setempat, sambil mencari kontak dengan para pemimpin pemberontak. ¹⁸⁴⁾

Untuk memanggil kembali sisa-sisa para pemberontak yang secara perseorangan meninggalkan induk pasukannya, terutama yang berada di hutan rombongan *Kempeitai* Jepang dengan mengendari kendaraan yang telah diperlengkapi dengan pengeras suara menuju ke tepi hutan-hutan dengan meneriakkan panggilan yang antara lain berbunyi, sebagai berikut: "Indonesia sudah Merdeka, para prajurit Peta Blitar supaya pulang kembali ke asrama *Daidan* Blitar, semua tidak akan diapa-apakan. ¹⁸⁵⁾ Seruan tersebut rupa-

nya menarik perhatian para prajurit Peta yang bersembunyi di hutan, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian menyerah kepada pihak Jepang. Dengan demikian berakhir lah proses perlawanan Peta Blitar yang nantinya disusul dengan masa pemeriksaan.

c. Kepemimpinan

Dalam uraian tersebut di muka telah dikemukakan suatu dugaan, bahwa peletak dasar ide pemberontakan Peta di Blitar, adalah dr. Ismail dan mBah Bendo, sedang pemrakarsa Pemberontakan adalah *Syodanco* Supriyadi dan *Syodanco* Muradi.

Kelompok dokter pribumi dalam jaman penjajahan merupakan lapisan intelektual yang tidak memisahkan dirinya dari keadaan sekitarnya. Mereka dengan sadar merasakan nasib bangsanya, dan mereka merasakan pula sebagai kewajibannya untuk menghilangkan segala duka derita yang menyelimuti rakyatnya. Kesengsaraan rakyat yang merajalela, baik dalam hidup ekonomi maupun di dalam keadaan fisik yang diliputi kelemahan, penyakit dan hantu buta huruf, menggetarkan jantung para dokter Bumiputra. Perikemanusiaananya terpukul oleh keadaan yang sangat menyedihkan, yang dapat mereka saksikan di sekitarnya. Maka dari itu tidaklah mengherankan, apabila dalam sejarah Asia, khususnya Asia Tenggara, terdapat gejala yang unik, bahwa tokoh-tokoh dokter menjadi pelopor Pergerakan Nasional. Begitu pula pada jaman pendudukan Jepang para mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran (*Ika Dai Gaku*) di Jakarta pernah melancarkan protes dan demonstrasi untuk menolak pengundulan kepala (1942).¹⁸⁶⁾ Sehingga bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila ada pendapat, bahwa para dokter di lingkungan daidan Peta merupakan pusat kepemimpinan

rokhani. Para perwira *Eisei* (kesehatan) rupanya menjadi sumber pengembangan rasa patriotik Indonesia di lingkungan daidan Peta, atau paling tidak menjadi penyebar rasa anti Jepang di antara perwira muda Peta. Mereka sering menimbulkan sanksi dalam kalbu para perwira yang muda itu mengenai isi propaganda Jepang.¹⁸⁷⁾ Rupanya *Cudanco* dr. Ismangil juga menjalankan peranan seperti itu sehingga oleh para pemimpin pemberontakan Peta *Dai II Daidan* Blitar dianggap sebagai penasehat utama. Akibatnya setelah pemberontakan Peta Blitar mengalami kegagalan, *Cudanco* dr. Ismangil dipidana mati, walaupun secara pribadi ia tidak pernah ikut memberontak dan tidak pernah membunuh Jepang.

Selain itu masih ada lagi seorang tokoh aliran kebatinan yang juga berpengaruh dalam tahap perencanaan pemberontakan Peta di Blitar, yaitu tokoh mBah Bendo. Menurut ceritera rakyat, mBah Bendo adalah seorang ahli kebatinan, yang berasal dari prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nama kecilnya adalah Alip, sedangkan nama tuanya Amat Kasan. Karena ia oleh rakyat dianggap sebagai orang yang pertama kali mendirikan desa Bendo ($\pm$ 2 Km di sebelah utara Blitar), kemudian ia diberi gelar: mBah Bendo. Setelah meninggal dunia ia terkenal dengan sebutan mBah Boto Putih, karena jiratnya ditandai dengan *Boto Putih*. Para pemimpin pemberontakan Peta di Blitar menganggap mBah Bendo sebagai Guru Kebatinan mereka. Dari mBah Bendo inilah *Syodanco* Supriyadi dan kawan-kawannya sering mendapat petunjuk, petuah dan gembengan mental yang sangat berguna bagi kepemimpinannya. Atas pengaruh dari mBah Bendo, *Syodanco* Supriyadi makin yakin bahwa cepat atau lambat Jepang harus dinyahkan dari bumi Indonesia.¹⁸⁸⁾

Data tersebut di atas memberi petunjuk, bahwa mBah

Bendo seorang tokoh aliran kebatinan yang besar pengaruhnya terhadap rakyat sekitar Blitar, sehingga *Syodanco* Supriyadi dan kawan-kawannya memandang perlu ikut sertanya dalam pemberontakan melawan militer Jepang yang kuat persenjataannya. Dalam menghadapi militer Jepang yang kuat persenjataannya itu, rupanya *Syodanco* Supriyadi memerlukan landasan kerokhaniaan yang berpengaruh besar dalam mempertebal semangat berperang, dan berpengaruh besar dalam memperkuat loyalitas anak buahnya, sebagai prajurit Peta yang menurut disiplin militer harus tunduk kepada atasannya. Ikatan kepercayaan dan keyakinan sangat besar pengaruhnya pada golonganpengikut dalam menentukan sikap waktu terjadi perlawanan.¹⁸⁹⁾ Betapa besar kepercayaan pengikut Supriyadi, bahwa ia adalah seorang yang sakti, sehingga mereka percaya, bahwa Supriyadi dapat mengalahkan.

Adapun tokoh Supriyadi sendiri sebenarnya seorang intelektual keturunan bangsawan. Ayahnya keturunan bangsawan Makasar (~~Karaeng Nobo~~) dan ibunya keturunan bangsawan Mataram. Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila Surpiyadi sangat tertarik kepada soal-soal kebatinan. Pendidikannya dimulai dari *HIS, MULO, MOSVIA* dan dalam jaman Jepang menjadi murid Sekolah Menengah Tinggi di Surabaya.¹⁹⁰⁾

Sebagai intelektual banyak sedikitnya ia mengetahui perkembangan dan tujuan Pergerakan Nasional Indonesia. Maka dari itu ada kemungkinannya apabila ia kemudian membakar semangat teman-temannya dengan semboyan "Indonesia Merdeka". Semboyan adalah salah satu unsur yang penting dalam perlawanan. Di dalam setiap perlawanan semboyan yang berbentuk saruan, ajakan ataupun pemberian identitas perlawanan dapat memberi pegangan men-

tal di kalangan para pengikutnya.¹⁹¹⁾ Demikian juga rupanya Supriyadi dalam rapat rahasianya yang kedua (Nopember (1944), telah melontarkan semboyan "Indonesia Merdeka", sehingga setelah pemberontakan Peta di Blitar meletus kata-kata "Indonesia Merdeka" selalu diteriakkan oleh para pemberontak.¹⁹²⁾

Suatu hal yang menarik, ialah bahwa pemberontakan Peta *Dai II Daidan* Blitar tidak dipimpin oleh para *Cudanco* tetapi dipimpin oleh para *Syodanco*. Untuk menjelaskan kenyataan ini tentunya memerlukan penelitian yang lebih mendalam, namun untuk sementara waktu dapatlah diemukakan dugaan, bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh karena dalam kehidupan *bebrayan daidan* para prajurit tamtama (*giyuhei*) lebih dekat kepada para *syodanco* daripada dengan para *ducanco*. Hal itu dikarenakan, di samping para *syodanco* bertempat tinggal bersama dengan para prajurit tamtama di asrama (kesatrian) *daidan*, juga para *syodanco* yang secara langsung memberikan latihan kepada para tamtama; sehingga segala gagasan para *syodanco* dengan mudah disebarluaskan kepada para prajurit tamtama. Akibatnya loyalitas para prajurit tamtama kepada para *syodanco* lebih besar daripada kepada para *cudanco*. Jika dugaan itu benar maka status para *syodanco* yang demikian itu, ditambah dengan adanya keberanian, kecakapan, kesalehan dan kekeramatannya akan berpengaruh besar pada derajat loyalitas pengikut terhadapnya. Pemimpin, pengikut dan loyalitas yang demikian inilah yang merupakan unsur-unsur pokok dalam pembentukan pasukan yang mengadakan pemberontakan.¹⁹³⁾

d. Jumlah Pengikut

Menurut keterangan Soejono, jumlah seluruh prajurit Peta di *Dai II Daidan* Blitar ada 550 orang dan sebagian besar berasal dari kabupaten Blitar dan Nganjuk. Sedangkan para

prajurit Peta Blitar yang ikut serta dalam pemberontakan ada 421 orang. Setelah diadakan pemeriksaan di Blitar, 78 orang dikirim ke Jakarta. Setelah diadakan pemeriksaan di Jakarta 52 orang diadili, sedangkan 26 orang lainnya dikirim pulang kembali ke Blitar. ¹⁹⁴⁾

Sedangkan *Syodanco* Supriyadi sendiri sebagai tokoh yang mengambil inisiatif dan memimpin pencetusan pemberontakan tersebut hilang tak tentu rimbanya. Semula banyak yang mengirakan, bahwa tokoh Supriyadi ini masih hidup dan pada suatu ketika akan muncul kembali, sehingga ketika nama-nama menteri yang duduk dalam Kabinet RI pertama (Kabinet Presidentiil 5 September 1945) diumumkan, nama Supriyadi tercantum sebagai Menteri Keamanan Rakyat; tetapi orangnya tidak pernah muncul (hingga sekarang). Maka dari itu timbullah pendapat yang menyatakan, bahwa sebenarnya tokoh Supriyadi sudah meninggal dunia, hanya di mana makamnya dan dengan cara bagaimana ia meninggal, hingga kini belum ada data penjelasannya.

3. Akibat Perlawanan

Janji Kolonel Katagiri di hutan Ngancar, ternyata kosong belaka. Para pemberontak Peta Blitar yang telah pulang kembali ke asrama *Daidan* Blitar tidak terlepas dari siksaan *Kempeitai* Jepang, dan satu persatu mereka dipanggil ke kantor *Kempeitai* untuk diperiksa; begitu pula *Syodanco* Muradi tidak luput dari pemeriksaan *Kempeitai* Jepang.

Setelah pemeriksaan di Blitar selesai, maka pada tanggal 12 Maret 1945, 78 orang prajurit Peta yang dianggap bersalah dikirim ke Jakarta untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di Jakarta mereka dimasukkan dalam rumah tahanan *Kempeitai* di Gambir Barat (sekarang Merdeka Barat). Setelah pemeriksaan tahap penyisihan selesai,

maka 26 orang prajurit Peta Blitar dikirim kembali ke Blitar karena kesalahannya dianggap ringan, sedangkan 52 orang prajurit Peta lainnya akan dituntut di muka Pengadilan Tentara Jepang di Indonesia.

Demikianlah pada tanggal 16 April 1945 di kantor Kempeitai Jakarta (sekarang di Merdeka Barat) diadakan sidang Pengadilan Tentara Jepang di Indonesia untuk menjatuhkan hukuman kepada 52 orang pemberontak Peta di Blitar. Sebelum putusan hukuman dijatuhkan, dibacakan dahulu kisah singkat dari pemberontakan Peta di Blitar. Setelah pembacaan selesai kemudian dibacakan putusan hukuman yang berupa :

Delapan orang mendapat hukuman mati, yaitu :

- 1) *Syodanco* Muradi
- 2) *Bundanco* Sunanto
- 3) *Syodanco* Suparjono
- 4) *Syodanco* Sudarmo
- 5) *Bundanco* Halir
- 6) *Cudanco* dr. Ismangil
- 7) *Bundanco* Amin
- 8) *Bundanco* Puji

Satu orang dihukum seumur hidup, yaitu :

Bundanco Sukardi

43 orang dihukum penjara dari 2 sampai 15 tahun, yaitu:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) <i>Syodanco</i> Partodiharjo | dihukum 15 tahun |
| 2) <i>Syodanco</i> Sumardi | dihukum 15 tahun |
| 3) <i>Syodanco</i> Sunarjo | dihukum 15 tahun |
| 4) <i>Syodanco</i> S. Jono | dihukum 15 tahun |
| 5) <i>Cudanco</i> Sukandar | dihukum 15 tahun |
| 6) <i>Bundanco</i> Adiwidayat | dihukum 15 tahun |

7)	<i>Bundanco</i> Suyono	dihukum	10 tahun
8)	<i>Bundanco</i> Sukarman	dihukum	10 tahun
9)	<i>Bundanco</i> Mulyono	dihukum	10 tahun
10)	<i>Bundanco</i> Surat	dihukum	10 tahun
11)	<i>Giyuhei</i> Mujali	dihukum	10 tahun
12)	<i>Syodanco</i> Suhadi	dihukum	7 tahun
13)	<i>Bundanco</i> Sofchan	dihukum	7 tahun
14)	<i>Bundanco</i> Imam Bakri	dihukum	7 tahun
15)	<i>Giyuhei</i> Saiman	dihukum	3 tahun
16)	<i>Bundanco</i> Suhariya	dihukum	7 tahun
17)	<i>Bundanco</i> Tarmuji	dihukum	7 tahun
18)	<i>Bundanco</i> Iswarin	dihukum	7 tahun
19)	<i>Bundanco</i> Kusni	dihukum	10 tahun
20)	<i>Bundanco</i> Suyono	dihukum	10 tahun
21)	<i>Bundanco</i> Dasrip	dihukum	7 tahun
22)	<i>Bundanco</i> Beni	dihukum	7 tahun
23)	<i>Bundanco</i> Suwadi	dihukum	7 tahun
24)	<i>Bundanco</i> Harsono	dihukum	7 tahun
25)	<i>Bundanco</i> Tunus	dihukum	7 tahun
26)	<i>Bundanco</i> Rabisun	dihukum	7 tahun
27)	<i>Bundanco</i> Atmaja	dihukum	7 tahun
28)	<i>Bundanco</i> Sukaeni	dihukum	10 tahun
29)	<i>Bundanco</i> Suparyono	dihukum	7 tahun
30)	<i>Giyuhei</i> Lasiman	dihukum	4 tahun
31)	<i>Bundanco</i> Suradi	dihukum	4 tahun
32)	<i>Bundanco</i> Pracoyo	dihukum	4 tahun
33)	<i>Bundanco</i> Sungkono	dihukum	4 tahun
34)	<i>Bundanco</i> Jarwadi	dihukum	4 tahun
35)	<i>Bundanco</i> Juki Sutrisno	dihukum	4 tahun
36)	<i>Bundanco</i> Imam Raoyan	dihukum	4 tahun
37)	<i>Giyuhei</i> Suparman	dihukum	3 tahun
38)	<i>Giyuhei</i> Badri	dihukum	2 tahun
39)	<i>Giyuhei</i> Miskan	dihukum	2 tahun

- 40) *Giyuhei Sumani* dihukum 2 tahun
- 41) *Giyuhei Baiji* dihukum 2 tahun
- 42) *Giyuhei Mulyono* dihukum 2 tahun
- 43) *Giyuhei Paidi A.* dihukum 2 tahun. ¹⁹⁵⁾

Setelah hukuman dijatuhkan, maka pada tanggal 17 April 1945 mereka yang mendapat hukuman penjara dimasukkan ke penjara Cipinang Jakarta, sedang mereka yang dihukum mati masih ditahan di Kempeitai. Mereka yang mendapat pidana mati (sebanyak enam orang) kemudian dibunuh di Ancol, dan dimakamkan di tempat itu juga, yang kini menjadi Taman Makam Pahlawan Belanda. Setelah Indonesia Merdeka, jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. ¹⁹⁶⁾

Dalam bulan Juni 1945 dua orang yang dijatuhi hukuman mati, yaitu: *Bundanco Amin* dan *Bundanco Puji*, hukumannya dirubah menjadi hukuman seumur hidup, dan mereka yang dihukum penjara, pada tanggal 29 April 1945 sebanyak 22 orang dipindahkan dari Cipinang ke penjara Sukamiskin Bandung. Empat orang di antara mereka yang dipenjara, meninggal dunia, yaitu : *Syodanco Sumardi*, *Syodanco Sunaryo*, *Bundanco Atmaja* dan *Bundanco Sukaeni*, dan selebihnya dibebaskan ketika Indonesia merdeka (tanggal 29 September 1945). ¹⁹⁷⁾

4. Hubungan dengan Daerah Lain

Pemberontakan Peta di Blitar, bukanlah satu-satunya perlawanan terhadap Jepang. Gejala frustrasi, kemarahan, kebencian dan cita-cita kemerdekaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan prajurit *daidan-daidan* Peta, menimbulkan semangat pemberontakan terhadap Jepang. Akibatnya, pada akhir tahun 1944, sebelum pemberontakan Peta Blitar meletus, di *Cudan Pengalengan* (termasuk *Daidan Bandung*) telah terjadi pembunuhan terhadap seorang perwira

Jepang (*Syidokan*) oleh lima orang *Bundanco*.¹⁹⁸⁾ Begitu pula para prajurit Peta di Gumilir dari *Daidan* Susalit yang berkedudukan di Sumpiuh Cilacap, pada tanggal 30 Juni 1945 di bawah pimpinan *Bundanco* Kusaeri telah mengepung markas Jepang yang ada di gumilir. Hanya karena campur tangan atasan Indonesia yang mempunyai pertimbangan lain, aksi bersenjata di Gumilir tidak dilanjutkan dan dapat ditindas oleh Jepang.¹⁹⁹⁾

Selanjutnya, pada bulan Desember 1944 para perwira bawahan yang terdiri dari tiga *Syodanco* dan sebagian besar *bundanco* Kesatrian (*Cudan*) Rengasdengklok ($\pm$ 20 Km. sebelah Utara Karawang) telah menyatakan tekad "untuk pemberontak terhadap Jepang dan menggabungkan diri dalam organisasi perlawanan Sapu Mas".²⁰⁰⁾ Bahkan dalam perkembangan selanjutnya mereka merencanakan pemberontakan Peta *Cudan* Rengasdengklok sebagai pemberontakan Peta Blitar ke II. Akhirnya mereka melancarkan pemberontakan terhadap Jepang dan berhasil menguasai Rengasdengklok selama lima hari (dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Agustus 1945).²⁰¹⁾

Dengan demikian, jelaslah bahwa meskipun pemberontakan Peta Blitar mengalami kegagalan dan cetusan api di Gumilir sudah padam sebelum mulai berkembang, namun pemerintah Militer Jepang tidak dapat memungkiri arti historis peristiwa Pemberontakan Peta Blitar, bahwa pemuda dan rakyat Indonesia tidak pernah mundur dalam perjuangannya, mencapai Indonesia Merdeka.

B A B IV

AKIBAT PERLAWANAN

Sejak abad ke 17 di Indonesia pada umumnya dan di daerah Jawa Timur pada khususnya, terus menerus timbul pemberontakan, pembunuhan, kerusuhan, kegaduhan dan sebagainya yang kesemuanya itu cukup menggoncangkan masyarakat dan pemerintah kolonial Belanda. Pergolakan itu timbul sebagai suatu ledakan dari pada ketegangan, permusuhan, atau pertentangan yang terjadi di masyarakat. Dominasi ekonomi, politik dan kultur yang terjadi pada masa kolonial, telah mengakibatkan timbulnya deorganisasi di kalangan masyarakat tradisional.

Dengan dimasukkannya sistem ekonomi keuangan, telah memungkinkan bagi pelaksanaan sistem pemajakan, peningkatan perdagangan hasil bumi, timbulnya buruh upahan dan masalah pemilikan/penggarapan tanah.

Demikianlah, menurut kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat timbul peristiwa yang merupakan rangkaian usaha terus menerus, dari golongan terjajah secara jasmaniah dan rokhaniah untuk membebaskan dirinya menuju tercapainya kemerdekaan dan kesempurnaan martabat manusia. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadilan.

Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Jawa Timur misalnya perlawanan Trunajaya, Untung Surapati, gerakan sosial dan politik. Perlawanan Trunajaya mula pertamanya merupakan perlawanan terhadap Amangkurat I (raja Mataram), yang dipandang kurang adil dalam pemerintahannya. Raja Amangkurat I, dalam melawan Truna-

jaya minta bantuan kepada Kompeni VOC, dengan syarat sebagai pengganti biaya perang pihak Kompeni VOC, tiap-tiap tahun diberi hak untuk menarik penghasilan di semua bandar pantai, antara Karawang sampai ujung Jawa Timur. Dengan diterimanya syarat yang diajukan tersebut, Kompeni VOC mengerahkan seluruh kekuatannya, agar secara cepat dapat memadamkan perlawanan Trunajaya sehingga dapat menerima hasil semua bandar di pantai dari Karawang hingga ujung Jawa Timur.

Persenjataan Kompeni lebih modern, bila dibandingkan dengan yang dipergunakan oleh pihak Trunajaya sehingga perlawanan Trunajaya pada tahun 1679 dapat dipadamkan. Sebagai akibat kekalahan Trunajaya, Kompeni VOC mempunyai hak untuk menarik pajak penghasilan bandar di Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur semakin sengsara hidupnya, dan semakin meningkat kebenciannya terhadap imperialis-kolonialisme Belanda. Hal ini terlihat, dengan adanya perlawanan Untung Surapati terhadap imperialisme-kolonialisme Belanda di Jawa Timur mendapat bantuan masyarakat, sehingga perlawanan Untung Surapati semakin kuat.

Belanda mengetahui tentang hal ini, maka pada tahun 1706 mulai diadakan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan Untung Surapati, dan pada tahun 1906 Untung Surapati gugur. Sehingga Pasuruan diduduki oleh Kompeni, sedangkan putera-putera Untung Surapati tidak mau menyerah, dan terus melanjutkan perlawanan melawan kolonialisme Belanda.

Perjuangan Trunajaya dan Untung Surapati, belum berhasil secara keseluruhan dan mengakibatkan Kompeni VOC secara bebas melaksanakan hak-haknya, dan dalam rangka mengembangkan imperialisme-kolonialismenya mendirikan loji-loji atau benteng-benteng di bandar-bandar yang

dianggap penting di Jawa Timur. Rakyat Jawa Timur harus membayar bea-cukai pelabuhan kepada VOC dan perdagangan rakyat yang bebas dibatasi, sehingga semakin beratlah hidup rakyat Jawa Timur.

Pada tahun 1799/1800, kongsi dagang Hindia Timur (VOC) dibubarkan dan kemudian diganti oleh Pemerintahan Republik Bataaf di bawah pimpinan H.W. Daendels, dengan mendapat tugas mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada tahun 1816 di Indonesia terdapat bentuk pemerintahan baru, yang dikenal dengan sebutan *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda hingga tahun 1942. Meskipun berganti nama dan yang berkuasa di Indonesia dengan peraturan dan sistem pemerintahannya, nasib rakyat tetap sebagai rakyat terjajah yang semakin berat derita yang dipikulnya.

Tanam Paksa merupakan suatu sistem yang membawa kesengsaraan dan kemelaratan rakyat, mengakibatkan rakyat Jawa Timur pada tahun 1833 mengadakan perlawanan dan huru hara di perkebunan tebu Pasuruan, dengan tujuan menghapuskan sistem Tanam Paksa. Perjuangan rakyat ini dibantu oleh kaum komunis, liberalis, dan kapitalis dengan tujuannya sendiri-sendiri.

Akhirnya, pada tahun 1870 sistem Tanam paksa dihapuskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 (*Agrarische Wet*) dan kemudian disusul keluarnya *Agrarische Besluit* tahun 1870. Pada tahun-tahun berikutnya timbul politik kolonial liberal dan politik pintu terbuka, sehingga Indonesia terbuka bagi masuknya modal asing.

Nasib rakyat dengan munculnya sistem baru ini tidak semakin baik, bahkan semakin sengsara hidupnya. Kaum kapitalis yang telah menanamkan modalnya di Indonesia di bidang perdagangan berusaha agar barang industrinya

dapat laku. Usaha yang dilakukan, ialah meningkatkan taraf hidup kaum pribumi, sehingga mampu untuk membelinya. Hal ini didukung oleh kaum agama, sosialis, dan etnis yang sebagai juru bicaranya Mr. Conrad Th. van Deventer, dengan trilogi : irigasi, emigrasi, dan edukasinya. Pada tahun 1901 dikeluarkan oleh Raja Belanda bahwa politik kolonial baru ialah politik etis.

Idea trilogi Van Deventer, yang berdasarkan kewajiban moral pemerintah kolonial Belanda terhadap perbaikan nasib rakyat bumi putera, namun di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan idenya. Idea tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan. Keadaan ini akan lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya Politik Pintu Terbuka. Sebagai akibat dilaksanakannya politik tersebut, menimbulkan kegelisahan sosial di masyarakat pedesaan. Kegelisahan sosial tersebut, disebabkan adanya perubahan tatanan dan kultur tradisional, sehingga timbullah gerakan protes tradisional kaum tani terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Benturan tatanan kultur tradisional dengan tatanan kultur asing, mengakibatkan desorganisasi masyarakat tradisional yang mulai kehilangan orientasi hidupnya. Dalam keadaan kegelisahan ini para petani menantikan seorang pemimpin yang dapat mewujudkan aspirasinya. Muncullah tokoh-tokoh yang merealisasikan potensi gerakan protes tradisional, yakni dari kelompok aristokrat tradisional, kelompok Islam, dan kelompok intelektual. Kedatangan para tokoh ini disambut dengan rasa gembira oleh para petani dan dianggap sebagai Ratul Adil atau Imam Mahdi. Gerakan protes rakyat ini timbul di mana-mana, yang mengakibatkan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menenenteramkan situasi. Meskipun perjuangan rakyat pe-

desaan belum berhasil seluruhnya, namun semakin matangnya jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat pedesaan, sehingga di sana-sini masih terjadi gerakan-gerakan yang menentang pemerintah kolonial Belanda, dan bertujuan memperjuangkan nasib bangsanya.

Kaum intelektual setelah mengenyam pendidikan, merasa berkewajiban moral untuk memperjuangkan nasib rakyatnya, sarana perjuangannya memakai bentuk organisasi modern yang bersifat nasional bukan lagi kedaerahan, sehingga disebut pergerakan nasional.

Pergerakan Nasional, pada hakekatnya merupakan usaha bangsa Indonesia untuk membina persatuan nasional, dan mencapai Kemerdekaan Nasional dengan mempergunakan wahana organisasi modern.

Pada tahun 1912 di Surabaya telah tergalang Persatuan Nasional religius, di bawah pimpinan HUS Cokroaminoto dengan wahana Sarekat Islam, yang bersifat nasionalistis — demokratis — religius — ekonomis, dan berorientasi kepada rakyat jelata. Dengan adanya Sarekat Islam, pemerintah kolonial Belanda merasa mendapat tantangan, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak mengakui persatuan seluruh Sarekat Islam, sebagai badan hukum dan yang diakui hanyalah cabang-cabang Sarekat Islam, dengan harapan politik *divide et impera* dapat dilaksanakan. Dengan adanya tindakan pemerintah kolonial Belanda tersebut HUS Cokroaminoto berusaha mempersatukan cabang-cabang tersebut, dengan membentuk *Centraal* Sarekat Islam di Surabaya. Usaha yang baik ini belum berhasil seluruhnya, namun jiwa nasionalisme, demokrasi, religius dan ekonomis, telah tertanam pada sanubari anggotanya dan berkembang di dalam organisasi yang timbul dari Sarekat Islam, yakni Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.

Pada situasi perpecahan organisasi, pemogokan buruh dan adanya organisasi yang sifatnya kedaerahan, Dr. Soetomo mengetahui bahwa ada beberapa generasi muda dan tua, yang tidak menjadi anggota organisasi-organisasi tersebut, maka untuk mereka didirikan suatu wadah, yakni *Indonesische Studie Club*. Di dalam wadah *Indonesische Studie Club* mengharapkan jiwa nasionalisme akan tumbuh dan berkembang. Kehendak ini ternyata tercapai dengan dilaksanakannya *Hari Inter Insulair* di Surabaya pada bulan Juli 1925, dengan dihadiri oleh wakil-wakil suku Jawa, Madura, Ambon, Sumatera, Sunda, Manado, Bali, dan lain-lain. Sehingga semangat nasionalisme idea Perhimpunan Indonesia telah disebar-luaskan oleh Dr. Soetomo di Surabaya.

Sebagai akibat Dr. Soetomo mendirikan *Indonesische Studie Club*, menarik perhatian kaum intelektual muda di kota-kota lain, sehingga muncullah *Algemeene Studie Club* di Bandung. Begitu pula di Solo, Yogya, Jakarta, Semarang dan Bogor mengikuti jejak Surabaya. Sebagai akibat dari Pergerakan Nasional ini, semakin matangnya kesadaran nasional rakyat Indonesia yang tercetus pada Konggres Pemuda I (pertama) di Jakarta tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, dengan munculnya cita-cita untuk mencapai Negara Kesatuan Indonesia yang merdeka. Lebih matang lagi pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, para Pemuda berikrar mengakui adanya satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Sesudah itu pergerakan nasional Indonesia diliputi semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan.

Pada tanggal 8 Maret 1942, setelah tentara Jepang mendarat di Jawa, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, sehingga Indonesia mulailah di bawah

kekuasaan militer Jepang. Tujuan Jepang di Indonesia bukan untuk memerdekakan Indonesia, melainkan sebagai sumber material dan tenaga dengan jalan bekerja sama dengan tokoh-tokoh Indonesia, yang seakan-akan Jepang akan membebaskan dari penjajahan. Sebagai realisasi kerja sama tersebut didirikanlah gerakan-gerakan Tiga A, Putera, Peta dan sebagainya. Untuk keperluan gerakan tersebut Jepang menggerakkan pemuda-pemuda Indonesia, dengan tujuan memperkuat pertahanan Jepang di Indonesia.

Tindakan Jepang di Indonesia semakin lama semakin kejam, dan melakukan pemerasan, sehingga menimbulkan akibat yang negatif bagi rakyat Indonesia. Tindakan pemerintah militer Jepang yang merendahkan martabat dan melampaui batas perikemanusiaan inilah yang menimbulkan perlawanan, antara lain Pemberontakan Peta di Blitar di bawah pimpinan *Syodanco* Supriyadi.

Akibat pemberontakan Peta di Blitar, setelah diadakan pemeriksaan, maka pada tanggal 12 Maret 1945 sebanyak 78 orang prajurit Peta yang dianggap bersalah dikirim ke Jakarta, untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diadakan pemeriksaan 26 orang dikembalikan lagi ke Blitar karena kesalahannya ringan, sedangkan 52 orang prajurit Peta lainnya dituntut di muka Pengadilan Tentara Jepang di Indonesia dengan hukuman mati untuk delapan orang, hukuman seumur hidup satu orang, dan dihukum dua tahun sampai dengan 15 tahun untuk 43 orang. Sedangkan *Syodanco* Supriyadi sendiri sebagai tokoh yang mengambil inisiatif dan memimpin pencetus pemberontakan tersebut hilang tak tentu rimbanya.

Meskipun pemberontakan Peta di Blitar mengalami kegagalan, namun pemerintah militer Jepang menyadari,

bahwa pemuda Indonesia tidak pernah mundur dalam perjuangannya untuk mencapai Indonesia Merdeka.

B A B V

HUBUNGAN PERLAWANAN DENGAN DAERAH LAIN

Hal-hal tersebut di atas, menandai adanya usaha perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk dan jenisnya yang berbeda-beda. Keadaan ini dapat terjadi sesuai dengan tantangan yang dihadapi, pada setiap periode tertentu.

Lebih dari pada itu semangat Nasionalisme berkembang, bahkan merupakan suatu kekuatan yang menghambat tertanamnya kekuasaan kolonialisme dan imperialisme. Hanya dengan kepandaian mengetrapkan politik pecah belah atau *divide et impera*, maka kekuatan nasionalisme sementara dapat dijinakkan, sehingga mengakibatkan penjajahan sampai dengan saatnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kekuatan Nasionalisme yang dimaksudkan di atas, yaitu terpadunya kesadaran yang mendalam tentang perlunya kesatuan suku-suku bangsa di Indonesia melawan kekuatan asing, yang hendak menegakkan kekuasaannya.

Dengan kata lain, bahwa mungkin sekali terdapat hubungan perlawanan yang berlangsung di Jawa Timur, dengan perlawanan di daerah lain. Untuk itu akan diuraikan, sebagai berikut :

A. PERLAWANAN TRUNAJAYA

Seperti diketahui, medan perlawanan bergerak di kawasan Madura Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Tengah. Berlangsung antara tahun 1675 sampai dengan 1679.

Dalam masa perlawanan Trunajaya itu, pihak-pihak yang terlibat ialah : Kumpeni Belanda (VOC), Sultan Amang-

kurat I dan Amangkurat II dari kerajaan Mataram, Pangeran Trunajaya dari Madura, serta Kraeng Galesung dari Makasar, yang dengan gigihnyamembantu perlawanan Trunajaya. Kiranya usaha Kompeni Belanda dalam membantu Mataram, telah dilakukan dengan gigihnya, yaitu mengirimkan tentara bantuan pimpinan : Jacob Couper, Speelman, Antoni Hurdt, Kapten Tack, Kapten Y.A. Sloot, dan pasukan Bone serta Kapten Jonker.

Meskipun menghadapi pasukan gabungan antara Mataram dan Kompeni, namun perlawanan Trunajaya berkobar terus, bahkan sempat pula menyerang jantung kekuasaan Mataram di Plered.

Hal demikian inilah, maka perlawanan Trunajaya merupakan perlawanan besar, khususnya dalam usaha menentang Kompeni karena sebagai penyebab meningkatnya keresahan dalam pemerintahan kerajaanMataram. Akibatnya berlarut-larut, dantidak hanya perlawanan lokal tetapi benar-benar luas yang menyangkut hubungan dengan daerah lain, yaitu selain di medan perlawanan itu sendiri (Madura, Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah) juga dengan pusat Kompeni (Jakarta), Sulawesi Selatan (Makasar dan Bone).

B. PERLAWANAN UNTUNG SURAPATI

Seperti halnya perlawanan Trunajaya medan perlawanan Untung Surapati sebagian besar di Jawa Timur. Perlawanan ini berlangsung antara tahun 1686 sampai dengan 1706.

Penyerangan terhadap kedudukan Untung Surapati dilaksanakan dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada pada Belanda, dengan pengharapan segala persoalan selesai sudah.

Ekspedisi Belanda ini dipimpin oleh pimpinan pasukan yang sudah berpengalaman, seperti : Kapten Zachauas, Kap-

ten Van de Herst, Herman de Wilde, dan lain-lain. Keinginan perang tersebut ternyata cepat berakhir tidak dapat dilaksanakan, perang hanya berlangsung selama 20 tahun.

Pada waktu perlawanan Untung Surapati, pantai-pantai Jawa Timur dapat dikuasai Untung Surapati. Jawa Timur dengan Pasuruan sebagai ibukota kerajaan, betul-betul mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Adipati Arya Wiranegara. Dan pantai-pantai yang dikuasai Untung Surapati itu mengadakan hubungan keluar daerahnya. Suatu ketika Untung Surapati pernah mengirim duta ke Muang Thai, dan dari pantai ini pula orang-orang Makasar dan orang-orang Melaya datang ke daerah Untung Surapati, bahkan ikut memperkuat pasukan Untung Surapati.

Sudah barang tentu hubungan dengan raja-raja Bali berlangsung pula. Ditilik dari keadaan demikian itu, jelas kedudukan Untung Surapati di Pasuruan cukup dikenal dengan susunan pemerintah yang tertib. Kondisi ini memberi kemungkinan bagi terselenggaranya hubungan dengan luar negeri.

C. GERAKAN SOSIAL

Seperti diutarakan di atas, bahwa dalam menghadapi pengaruh penetrasi kebudayaan Barat yang mempunyai sifat agresif dan destruktif. Masyarakat pedesaan mempunyai cara-cara sendiri untuk mempertahankan diri, dan kemudian mengadakan reaksi. Perasaan tidak puas dan tidak senang terhadap pemerintahan Jajahan, tidak diberi tempat atau lembaga sendiri sebagai wadah penyaluran keinginannya. Sehubungan dengan itu, jalan sepintas yang ditempuh oleh mereka ialah membentuk *Gerakan Sosial* sebagai wujud dari *Protes Sosial*.

Seringkali bentuk perwujudan yang selalu diperagakan berupa protes sosial, dengan mendapat dukungan dari mereka yang merasakan tertekan. Di samping aksi-aksi yang diperkuat perasaan keagamaan, harapan-harapan baru akan kedatangan yang merasakan tertekan. Di samping aksi-aksi yang diperkuat perasaan keagamaan, harapan-harapan baru akan kedatangan Mesias (Ratu Adil).

Tindakan gerakan itu melalui protes sosial dengan disertai kekerasan (pemberontakan), selalu mendapat dukungan dan dibenarkan rakyat. Namun demikian, gerakan itu masih sangat arkais, selain organisasinya yang sederhana juga programnya, strateginya, taktik perjuangannya.

Kelanjutan dan perjuangan yang dilancarkan tidak dapat bertahan lama, sewaktu menghadapi kekuatan militer kolonial. Sudah barang tentu hal semacam itu dapat dimaklumi, selain ada perbedaan dalam persenjataan juga dalam organisasi kekuatannya. Akibatnya gerakan semacam itu sangat pendek umurnya, dan kebanyakan aksi yang dilancarkan berada di suatu tempat yang jauh dari kota besar, tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan daerah lain.

D. SARIKAT ISLAM

Sarikat Islam merupakan perkembangan lebih lanjut dari gerakan Sarikat Dagang Islam. Sarikat Dagang Islam tersebut, di dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan agama dan ekonomi, sehingga tujuan organisasinya selain untuk memajukan agama Islam, juga memperkuat diri dari golongan pedagang Indonesia terhadap pedagang-pedagang Cina, yang pada waktu itu di Solo memegang peranan leveransir bahan-bahan yang diperlukan antara lain untuk perusahaan batik, seperti kain putih, malam, alat-alat untuk mencat, kesemuanya itu didapatkan dengan perantaraan Cina.

Pengaruh dari pemerintah kolonial Belanda, mengakibatkan timbulnya perubahan susunan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Belanda dalam melaksanakan pemerintahannya, dilandasi oleh prinsip rasial. Dengan prinsip tersebut mengakibatkan orang-orang Cina berkedudukan sebagai golongan menengah.

Beberapa kampung di Surabaya pada bulan Maret 1912, telah banyak penduduk bumipetera yang menjadi anggota Sarikat Dagang Islam. Di kota Surabaya terjadi ketegangan, antara orang-orang Bumiputera dengan Pedagang Cina. Beberapa tindakan telah diambil oleh toko-toko Cina.

Sarikat Dagang Islam, ketika akan mengusulkan Anggar-Dasar, mencari bantuan seorang pelajar Indonesia yang bekerja pada perusahaan dagang di Surabaya bernama Umar Said Cokroaminoto. Ia mengusulkan supaya jangan dibatasi, hanya kepada golongan pedagang, tetapi diperluas sehingga Sarikat Dagang Islam diganti menjadi Sarikat Islam. Dalam waktu singkat Sarikat Islam berkembang di wilayah Jawa dan Madura.

Di dalam akte Notaris yang ditetapkan tanggal 10 September 1912, ditetapkan tujuan dari perkumpulan itu, ialah:

- 1) Memajukan perdagangan.
- 2) Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesusahan.
- 3) Memajukan kepentingan rokhani dan jasmani dari penduduk asli (Bumiputera).
- 4) Menjamin kehidupan Agama Islam.

Lahirnya Sarikat Islam memberikan semacam sarana bagi para petani, untuk menyalurkan potensi kekuatan mereka melalui ideologi, kepemimpinan dan organisasi. Sarikat Islam dirumuskan atas faktor-faktor sosial ekonomi dan po-

litik, yang menyadarkan para petani, tentang situasi sosial yang melingkupinya. Tidak mengherankan bahwa Sarikat Islam harus dikembangkan dengan sejumlah agitas, dan kadangkala kekerasan yang dilancarkan terhadap orang-orang Cina. Mereka sebagai saingan para pedagang pribumi di pasaran. Para pedagang Bumiputera protes ketika orang-orang Cina meluaskan daerahnya, karena mengancam kepentingan perdaganganannya.

Kerusuhan timbul di Surabaya dan Tuban, kerusuhan ini juga terjadi di Surakarta, Semarang, Cirebon, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain. Namun sejauh ini belum diketahui hubungan langsung terjadinya kerusuhan-kerusuhan tersebut.

E. INDONESISCHE STUDIE CLUB

Tujuan didirikannya perkumpulan ini, ialah untuk mengumpulkan kaum intelek muda dan tua dari segala faham, aliran politik dan kepercayaan, agama, untuk berkomunikasi, serta berdiskusi secara ilmiah tentang hubungan persoalan kepentingan Nusa dan Bangsa. Dengan adanya perkumpulan, berkomunikasi serta berdiskusi secara ilmiah tentang hubungan nasional ini diharapkan timbul rasa persatuan dan sikap harga menghargai, di antara pemimpin-pemimpin kita. Kita ketahui pula, bahwa sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia bertindak dengan tangan besi, menindas golongan rakyat dan mengadu domba.

Landasan perjuangan ini mengakibatkan jiwa persatuan Dr. Soetomo dan kawan-kawannya. Jiwa persatuan inilah yang mendorong Dr. Soetomo aktif dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia), yaitu federasi dari perkumpulan-perkumpulan politik sosial yang pada waktu itu ada di Indonesia, sifat perjuangannya non-kooperasi.

Dengan berdirinya *Indonesische Studie Club* di Surabaya, mempengaruhi keadaan daerah-daerah lain. Dalam waktu yang singkat di daerah-daerah timbul organisasi *Studie Club*, antara lain di Bandung di bawah pimpinan Ir. Soekarno yang diberi nama *Algemeene Studie Club*. Selain itu juga berdiri *Studie Club* di Yogya, di Jakarta, di Semarang, dan di Solo. *Studie Club* di Solo didirikan pada tahun 1925 oleh beberapa kaum pelajar di Solo, di bawah pimpinan Dr. Rajiman dan Mr. Singgih. Majalah yang diterbitkan bernama *Timbul*.

Kaum intelek Indonesia kini memperoleh suatu tempat yang dianggap paling cocok pada waktu itu. Jiwa nasionalisme dan *Studie Club* berkembang dan mempengaruhi para pemuka Indonesia, untuk bersatu terbukti adanya konggres pada tahun 1928, yang melontarkan ikrarnya, yakni Sumpah Pemuda.

F. PEMBERONTAKAN PETA DI BLITAR

Pemberontakan Peta di Blitar, bukanlah satu-satunya perlawanan terhadap Jepang. Gejala frustrasi, kemarahan, kebencian dan cita-cita kemerdekaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan prajurit *Daidan-Daidan* Peta, menimbulkan semangat pemberontakan terhadap Jepang. Akibatnya, pada akhir tahun 1944, sebelum pemberontakan Peta Blitar meletus, di *Cudan* Pengalengan (termasuk *Dai Dan* Bandung) telah terjadi pembunuhan terhadap seorang perwira Jepang (*Syidokan*) oleh lima orang *Bundanco*. Begitu pula para prajurit Peta di Gumilir dari *Daidan* Susalit yang berkedudukan di Sumpiuh Cilacap. Pada tanggal 30 Juni 1945 di bawah pimpinan *Bundanco* Kusaeri telah mengepung markas Jepang yang ada di Gumilir. Hanya karena campur tangan atasan Indonesia, yang mempunyai pertimbangan lain, aksi

bersenjata di Gumilir tidak dilanjutkan dan dapat ditindas oleh Jepang.

Selanjutnya pada bulan Desember 1944, para Perwira bawahan yang terdiri dari tiga *Syodanco* dan sebagian besar *bundanco* Kesatrian (*Cudan*) Rengasdengklok ($\pm$ 20 Kilometer sebelah utara Karawang) telah menyatakan tekad "untuk memberontak terhadap Jepang dan menggabungkan diri dalam organisasi perlawanan Sapu Mas. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, mereka merencanakan pemberontakan Peta *Cudan* Rengasdengklok sebagai pemberontakan Peta di Blitar ke II.

Akhirnya mereka melancarkan pemberontakan terhadap Jepang dan berhasil menguasai Rengasdengklok selama lima hari (dari tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 1945).

Dengan demikian jelaslah bahwa meskipun pemberontakan Peta di Blitar mengalami kegagalan dan cetusan api di Gumilir sudah padam sebelum mulai berkembang, namun pemerintahan militer Jepang tidak dapat memungkiri arti historis peristiwa pemberontakan Peta Blitar, bahwa pemuda dan rakyat Indonesia tidak pernah mundur dalam perjuangannya mencapai Indonesia Merdeka.

B A B VI

P E N U T U P

Dalam uraian di bagian akhir dari buku ini, banyak dipetik manfaatnya dengan kembali mempelajari masa-masa yang telah lalu, khususnya yang berhubungan dengan daerah Jawa Timur. Kenyataannya memang daerah ini tidak lepas hubungannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama gerak peningkatan penetrasi imperialisme dan kolonialisme. Namun realitas yang timbul dan ditegakkan di dalam masyarakat, peningkatan penetrasi imperialisme dan kolonialisme. Namun realitas yang timbul dan ditegakkan di dalam masyarakat, terutama ditujukan untuk menahan lajunya ekspansi Barat itu, boleh dikata selalu ada.

Wujud reaksi yang diperagakan dalam bentuk perlawanan tidak menunjukkan persamaan waktu dan lama perlawanan pun tidak sama. Demikian juga perlawanan itu, baik yang dipimpin oleh seorang tokoh yang hidup dalam sejarah dengan memimpin pasukan yang bersenjata modern (pada waktu itu), maupun seorang tokoh yang dikenal oleh rakyat, di mana tokoh itu berdomisili dan berhasil menghimpun kekuatan rakyat yang setia kepadanya, serta hanya menggunakan senjata tradisional. Sampai saat ini tokoh yang terakhir itu tetap tinggal dalam ceritera rakyat.

Kesemua reaksi rakyat Jawa Timur senantiasa mengalami nasib yang sama. Mereka meskipun dengan heroisme, dan ada yang disertai spontanitas rakyat, kekuatan yang tiada imbang membawa kehancuran. Adanya ketidakseimbangan dalam segala bidang menurut ukuran kekuatan dan tata organisasi militer yang modern pada waktu itu. Nasib yang dialami rakyat tidak membawa jera, laksana tersirat dalam tam-

sil – patah tumbuh hilang berganti – atau tersimpul pula dalam motto Porpinsi Jawa Timur – *Jer Basuki Mawa Beya*

Demikian itulah perlawanan dan spontanitas semangat rakyat Jawa Timur, dalam menghadapi lajunya penetrasi imperialisme dan kolonialisme Belanda. Walaupun harus diakui antara peristiwa yang satu dengan yang lain berada dalam kurun waktu yang tidak sama, namun secara tradisional jelas telah hidup dan ada dalam khasanah dari generasi ke generasi. Bahkan sampai dewasa ini, ceritera-ceritera dengan tidak lepas dari ungkapan yang berlebihan, mengenai heroismenya yang dihayati sampai pada abad ke-20 ini. Kenyataan dalam hal ini pada masa mempertahankan kemerdekaan.

Bentrokan fisik dengan meninggalkan korban antara kedua belah pihak, mewarnai peristiwa sepanjang masa. Semenjak bangsa Eropa, dalam hal ini Belanda datang di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, perselisihan pendapat tidak dapat dihindarkan. Pertemuan dua bangsa yang berlainan kebudayaan, berlainan keinginan, berlainan asal dan struktur sosial menunjukkan perbedaan serta pandangan hidup yang berlawanan pula, senantiasa membawa ekses-ekses yang jelas tidak dikehendaki oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pertemuan diawali dengan datangnya Kompeni Dagang Hindia Timur, atau lebih dikenal dengan nama kependekannya VOC, organisasi dagang yang mempunyai tujuan utama berdagang atau dengan mengejar rejeki sebesar-besarnya. Meskipun demikian VOC pun tidak ketinggalan pula tujuan politiknya, yaitu menguasai daerah yang diinginkan. Sehubungan situasi daerah yang didatangi, telah terjadi pergolakan politik antara penguasa daerah dengan bangsawan-bangsawan bawahannya, mendorong VOC mengulurkan bantuan militer kepada penguasa pertama Jawa, dan sebagai imbalannya

daerah sepanjang pantai utara Jawa terlepas jatuh ke tangan Belanda, belum lagi dengan melalui praktek-praktek *divide et impera* yang cukup terkenal itu untuk menguasai daerah-daerah di Jawa, ataupun luar Jawa. Cara-cara itulah yang ditempuh Belanda untuk memperluas daerah yang telah dikuasainya.

Melalui penetrasi administrasi modern (dari Barat) yang dipraktekkan, sedikit demi sedikit mendesak tata administrasi tradisional. Mulai saat ini dan masa-masa seterusnya pengangkatan penguasa daerah, seperti bupati ada di tangan Belanda.

Sesudah tahun 1800-an, pengaruh Barat yang telah beberapa tahun dipraktekkan di daerah pesisir dapat berjalan dengan baik, kemudian dipraktekkan di pedalaman. Pembinaannya hampir sama memerlukan paksaan dan kekerasan, sejak lapisan atas maupun lapisan bawah. Hal serupa itulah yang acap kali menimbulkan pertentangan, sehingga muncul bentrokan-bentrokan dalam bentuk kedaerahan yang berskala kecil. Peranan bangsawan kecil makin lama makin tergeser, terlanda arus modernisasi Barat yang mengesampingkan peranannya. Desa yang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah agraris, telah diikutsertakan memproduksi untuk ekspor.

Penggantian politik kolonial Belanda yang konservatif dengan politik yang liberal, sampai dengan politik kolonial baru yang berpijak pada moral, tetap semata-mata politik untuk kepentingan pemerintah penjajahan.

Modernisasi Barat lewat teknologinya, menimbulkan keretakan dalam tata kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Berbagai hal yang membuat rakyat mengalami penderitaan dan kemiskinan, sehingga

ada jurang pemisah yang besar, antara yang berkuasa dengan yang dikuasai.

Keadaan itu tidak berubah sampai kedatangan Jepang, yang kemudian menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia ini. Kekejaman-kekejaman selalu diperagakan terhadap rakyat. Karena itu penderitaan yang seolah-olah telah menumpuk itu, akhirnya pun meledak dalam bentuk pemberontakan. Penderitaan inilah yang menimbulkan keberanian menghadapi segala bentuk penguasa, baik itu pemerintah penjajahan Belanda, maupun pemerintahan pendudukan Jepang.

Karena itu di daerah Jawa Timur ini banyak sekali peristiwa herois menentang penjajahan, dalam ukuran besar dan kecil yang bersifat kedaerahan.

DAFTAR CATATAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Abdurrachman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa Dan Masalah Historiografi*, Idayu, Jakarta, 1979, hal. 18–19.
2. Bung Karno, *Indonesia Menggugat*, Penerbit Sasongko, Solo, 1978, hal. 49.
3. Drs. Ariwiadi, *Ikhtiar Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971, hal. 43.

BAB II LATAR BELAKANG PERLAWANAN

1. Sarono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid III, Departemen P dan K, Jakarta, 1975, hal. 92–93.
2. Drs. S. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, jilid III, Yayasan Kanisius, cet. III, 1973, hal. 54.
3. Tim Penulis Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur (TPNPMK Jatim), *Monografi Daerah Jawa Timur*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Dep. P dan K, 1977, hal. 54–55.
4. Dr. H.J. Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, NV. Uitgeverij W. van Hoeve, 'Gravenhage'—Bandung, 1949, hal. 214.
5. Drs. F.A. Soetjipto, "Perang Trunojoyo", ed. Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Dep. Hankam Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1973, hal. 15.
6. TPNPMK Jatim, *op.cit.*, hal. 56.
7. *Ibid.*

8. Drs. F.A. Soetjipto, *op.cit.* ha. 22–23; Dr. F.W. Stapels, *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, deel III, NV. Uitgevermaatschappij "Joost van den Vondel", Amsterdam, 1939, hal. 408.
9. Sagimun MD. *Pahlawan Diponegoro Berjuang*, Gunung Agung, Jakarta, 1965, hal. 25.
10. R. Moh. Ali, *Perjuangan Feodal Indonesia*, Ganco, Bandung–Jakarta, 1963, hal. 164.
11. *Ibid.*
12. Winarsih Arifin, *Babad Wilis*, Lembaga Penelitian Perancis Untuk Timur Jauh, 1980, hal. xlii.
13. *Ibid.*, hal. xlviii.
14. *Ibid.*, hal. xxxviii.
15. R. Moh. Ali, *op.cit.*, hal. 170.
16. Winarsih Arifin, *op.cit.*, hal. xlii–xlviii.
17. PNPMK Jatim, *op.cit.*, hal. 200.
18. Laporan Tim Penelitian Dan pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur (LTPPKAD Jatim), *Sejarah Daerah*, BPP–IKIP, Surabaya, 1976, hal. 141.
19. *Ibid.*, hal. 32.
20. *Ibid.*, hal. 170.
21. Drs. I. Nyoman Dekker SH. *Sejarah Indonesia Dalam Abad XIX*, Lembaga Penerbit "Almamater", YPTP–Abad XIX, Lembaga Penerbit "Almamater", YPTP–IKIP, Malang, 1975, hal. 72.
22. Onghokam, "Pulung Affair", majalah: *Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, jilid VII, No. 1, Penerbit Bharatara, Januari, 1977, hal.
23. TPNPMK Jatim, *op.cit.*, hal. 64.
24. Drs. I Nyoman Dekker, *op.cit.*, hal. 76.
25. LTPPKD Jatim, *op.cit.*, hal. 284.

26. *Ibid.*, hal. 174.
27. *Ibid.*, hal. 175.
28. Sartono Kartodirjo, "*Kolonialisme Dan Nasionalisme Di Indonesia Abad XIX-XX*", *Lembaran Sejarah*, No. 1, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1967, hal. XXVI.
29. Sartono Kartodirjo dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V, Dep. P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 23.
30. *Ibid.*
30. *Ibid.*
31. Sartono Kartodirjo, *Protest Movements In Rural Java*, Institute of Southeast Asian Studies, Oxford University Press PT. Indira, London-New York-Melbourne, 1973, hal. 190.
32. Sartono Kartodirjo, "Mitos Ratu Adil Dan Aspirasi Petani" majalah: *PRISMA*, LP3ES, No. 1, Th. VI, Jakarta, Januari 1977, hal. 42-44.
33. Selo Soemardjan, "*Peranan Cendekiawan Dalam Pembangunan Nasional*", majalah: *RPISMA*, LP3ES, Jakarta, No. 1, Nopember 1976, hal. 5-7.
34. Onghokham, *op.cit.*, hal. 6-7.
35. Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaruan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, UP.Ken Mutia, cet. III, 1968, hal. 47.
36. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, (1977), hal. 41; S. Wismoady Wahono, "Mesianisme Dalam Perjuangan Petani Tinjauan Dari Sisi Kekristenan", majalah: *PRISMA*, LP3ES, No. 1, Januari 1977, hal. 56.
37. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, (1973), hal 80-86; 93-97.
38. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, (1977), hal. 40.

39. Sartono Kartodirdjo, dkk. *op.cit.*, (1977) jilid V, hal. 152–162.
40. Sartono Kartodirdjo, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, LP3ES, Januari 1981, hal. x-xi.
41. Drs. I Nyoman Dekker, *op.cit.*, (1969), hal. 10–11.
42. Prof. Dr. Abu Hanifah MD. *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu Dan Sekarang*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978, hal. 8.
43. Drs. I Nyoman Dekker, *op.cit.*, (1969), hal. 12.
44. Richard Z, Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI, 1975, hal. 51.
45. Abdurrachman Surjamihardjo, *op.cit.* hal. 78: Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, Pall Mall Press, London, 1977, hal. 28.
46. Abdurrachman Surjamihardjo, *op.cit.*, hal. 59.
47. Deliar Noor, *The Modern Muslim Movement in Indonesia*, Oxford University Press, Singapore-London and New York, 1973, hal. 150; Redaksi, "Gerakan Mesianis dan Aspirasi Petani", majalah: *PRISMA*, LP3ES, No. 1, Th. IV, Januari 1979, hal. 9.
48. L. Stoddard MA, Ph. D. *Dunia Baru Islam*, terj. HM. Muljadi Djomartono dkk. Panitia Penerbit Menko Kesejahteraan RI, Jakarta, 1966, hal. 325–326.
49. Ir. Soekarno, *Sarinah*, Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, cet. III, 1963, hal. 146–158.
50. Imam Supardi, *Swargi Dr. Sutomo*, Penerbit Penyebar Semangat, Surabaya, 1959, hal. 9.
51. AK. Pringgodigdo SH. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, cet. VII, Jakarta, 1970, hal. 52–53.
52. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Jakarta, 1974, hal. 331.

53. *Ibid.*, hal. 42.
54. Drs. I Nyoman Dekker, *op.cit.*, (1969), hal. 73–74.
55. Drs. Heru Soekadri K. *Lahirnya Nilai-Nilai Sumpah Pemuda*, Jurusan Sejarah FKIS–IKIP, Surabaya, 1977, hal.
56. Drs. I Nyoman Dekker, *op.cit.*, (1969), hal. 94–95.
57. Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1979, hal. 16–17.
58. *Ibid.*, hal. 25–34.
59. *Ibid.*, hal. 117–119.
60. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *100 Hari Di Surabaya*, Idayu, Jakarta, 1975, hal. 8.
61. Dr. Roeslan Abdulgani, *On Heroes Day And The Indonesian Revolution*, Prapanca, Jakarta, hal. 104.

BAB III WUJUD PERLAWANAN

1. Sartana Kartadirdjo, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia IV*, 1977, hal. 2.
2. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies II*(Ruler and Reahn in Early Java) 'S Gravenhage, 1959, hal. 83.
3. B. Schrieke, *ibid.*, hal. 159.
4. Sartono Kartodirdjo, dkk. *op.cit.*, hal. 14.
5. *Ibid.*, hal. 14.
6. *Ibid.*, hal. 18.
7. *Ibid.*, hal. 20 .
8. *Ibid.*, hal. 20.
9. Drs. F.A. Soetjipto, *Perang Trunajaya*, Dep. Hankam Pusat Sejarah ABRI, 1973, hal. 5.
10. Drs. F.A. Soetjipto, *ibid.*, hal. 7

11. Dra. Ny. Ratnawati Anhar. *Untung Surapati*, Dep. P dan K, 1976, hal. 5.
12. *Ibid.*, hal. 6.
13. Drs. F.A. Soetjipto, *op.cit.*, hal. 19 .
14. *Ibid.*, hal. 11.
15. *Ibid.*, hal.15 .
16. *Ibid.*, hal. 15.
17. *Ibid.*, hal. 16.
18. *Ibid.*, hal. 16.
19. *Ibid.*, hal. 16.
20. *Ibid.*,
20. *Ibid.*, hal. 20.
21. Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia I*, Kem. P.P.dan K. 1955, hal. 220.
22. Drs. F.A. Soetjipto. *op.cit.*, hal. 19.
23. Sanusi Pane, *op.cit.*, hal. 221.
24. Dra. Ny. Ratnawati Anhar, *op.cit.*, hal. 73.
25. *Ibid.*, hal. 74.
26. *Ibid.*, hal. 76.
27. *Ibid.*, hal. 77.
28. *Ibid.*, hal. 77.
29. *Ibid.*, hal. 79.
30. *Ibid.*, hal. 79.
31. *Ibid.*, hal. 83.
32. *Ibid.*, hal. 84.
33. Drs. Djoko Sukiman, *Perjuangan Untung Surapati*, Dep. Hankam, 1973, hal. 46.
34. *Ibid.*, hal. 51.
35. *Ibid.*, hal. 51.
36. *Ibid.* hal. 52.
37. Winarsih Arifin, *Babad Wilis*, Lembaga Penelitian Perancis Untuk Timur Jauh, 1980, hal. xliii–xlviii.

38. Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia*. Dies Natalis ke 18 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1967, hal. 6.
39. *Ibid.*, hal. 6.
40. Sartono Kartodirdjo, Mawarti Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosoesanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. Dep. P dan K, 1976 hal. 250.
41. *Ibid.*, hal. 251.
42. Contoh untuk masalah Codet di Jawa Barat, sebagai persamaan dengan peristiwa di Surabaya, *ibid.*, hal. 258.
43. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java*. Institute of Southeast Asian Studies. Oxford University Press/PT. Indera 1973. hal. 33.
44. Sartono Kartodirdjo, Mawarti Djoened Poesponegoro, Nugroho Noto Soesanto. *op.cit.*, hal. 252.
45. *Ibid.*, hal. 253.
46. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hal. 36.
47. Sartono Kartodirdjo, et al. *op.cit.* ha. 262.
48. *Ibid.*
49. *Ibid.*
50. *Ibid.* hal. 249.
51. *Ibid.* hal. 249.
52. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hal. 65. Periksa pula Ong Hok Ham. dalam *Pulung Affair*. Majalah Ilmu-Ilmu Sastra. Indonesian Yournal of Cultural Studies. January 1977. Jilid VII. No. 1. hal. 2.
53. Lihat. J. Tolmon, *Persuit of the millenzum*, the relation between religion and social change in AES. vol. III (1936), hal. 132–3. Dalam Sartono Kartodirdjo. *Protest movements in Rural Java*. hal. 67.
54. *Ibid.* hal. 69.

55. Sartono Kartodirdjo, *et al. op.cit.*, 277.
56. *Ibid.*, hal. 278.
57. Drs. Heru Sukadri K. et al. *Sejarah Pendidikan Jawa Timur*. IDKD. Dep. P dan K. 1980/1981. hal. 115.
58. Sartono Kartodirdjo. *op.cit.* hal. 77.
59. *Ibid.*
60. Ong Hok Ham. *Pulung Affair. op.cit.*, hal 2.
61. Sartono Kartodirdjo. *op.cit.* hal. 86.
62. *Ibid.*, hal. 93.
63. *Ibid.*, hal. 94.
64. Sartono Kartodirdjo. *et al. op.cit.*, hal. 287.
65. *Ibid.*
66. *Ibid.*, hal. 293.
- 67.
66. *Ibid.*, hal. 293.
67. *Ibid.*
68. Drs. Heru Sukadri K. et al. *op.cit.*, hal. 110.
69. Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*, hal. 16.
70. *Ibid.*
71. *Ibid.*
72. Drs. Heru Sukadri K. et al. *op.cit.*, hal. 115.
73. *Sartono Kart*
73. Sartono Kartodirdjo. *op.cit.*, hal. 108.
74. Sartono Kartodirdjo, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia IV, Dep. P dan K, Balai-Pustaka, Jakarta, 1977. ha IV, Dep. P dan K, Balai-Pustaka, Jakarta, 1977. hal. 247.*
75. PRISMA, *Aspirasi Rakyat Kecil dan Gerakan Sosial Keagamaan*, LP3ES, Januari 1977. hal. 8.
76. Sartono Kartodirdjo, *Op.cit.*, hal. 319.
77. *Ibid.*, hal. 317.
78. *Ibid.*, hal. 286.

79. HUS. Cokroaminoto, *Zelf bestuur*, Pidato pada kongres Nasional Sarikat Islam I di Bandung 17 s/d 24 Juli 1916, hal. 33, A. Zainoel Ihsan Drs. Pitut Suharto, *Aku Pemuda Kemarin Di Hari Esok*, Penerbit Jaya Sakti—Jakarta, 1981. hal. 11—47.
80. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 26.
81. *Ibid.* hal. 316.
82. *Drs.*
82. Drs. Susanto Tirtoprojo, SH. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan Jakarta, 1980. hal. 26.
83. J.Th. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*, Haarlem-HD. Tjoenk Willink & Zoon — NV, 1931, hal. 58.
84. Drs. Susanto Tirtoprodjo, SH. *op.cit.*, hal. 26.
85. *Ibid.*, hal. 27.
86. Amelz, HUS. Cokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1952. hal. 51.
87. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 318.
88. *Ibid.*, hal. 325.
89. *Ibid.*, hal. 326.
90. *Ibid.*, hal. 262.
91. *Ibid.*, hal. 286.
92. *Ibid.*, hal. 287.
93. *Ibid.*, hal. 287.
93. HUS. Cokroaminoto, *op.cit.*, hal. 33.
94. *Ibid.*, hal. 15.
95. Delier Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita*, hal. 19; *PRISMA*, Demokrasi dan Pemilihan Umum, Mencari penyambung Lidah, LLP3ES, 2 Januari 1977, hal. 18—34.
96. *Ibid.*, hal. 20.

97. AK. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, 1977. hal. 5.
98. Drs. M. Masyuk
nesia, Penerbit Dian Rakyat, 1977. hal. 5.
98. Drs. M. Masyukur Amin, *Saham HUS. Cokroaminoto dalam Kebangunan Islam dan Nasionalisme di Indonesia*, Penerbit Nur Cahaya, 1980. hal. 30.
99. Sartono Katodirdjo, *op.cit.*, hal. 318.
100. HUS. Cokroaminoto. *op.cit.*, hal. 23.
101. *Ibid.*, hal. 13.
102. Dr. Ruslan Abdoelgani, *Almarhum Dr. Soetomo yang saya kenal*, Yayasan Idayu, 1974. hal. 20.
103. *Ibid.*, hal. 24.
104. *Ibid.*, hal. 21.
105. *Ibid.*, h 1. 23.
106. Redaksi SK. Darmokondo, 1928; *Pengajaran Dan Pendidikan Kebangsaan*, hal. 135; A. Zainoel Ihsan Drs. — Pitut Suharto *op.cit.*, hal. 115—137.
107. Paul W. van der Veur, *Dr. Soetomo Pandangan Dan Cita-Cita Untuk Bangsanya*, Fakultas Ilmu Sosial — Universitas Airlangga, 1981. hal. 21.
108. Ruslan Abdoelgani, *op.cit.*, hal. 24.
109. Drs. I Nyoman Dekker, *Sejarah Indonesia Baru 1900—1945*, Lembaga Penerbit IKIP, Malang, 1969, hal. 107.
110. Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1979, hal. 22—27.
111. *Ibid.*, hal. 23—132; Drs. I Nyoman Dekker, *op.cit.*, hal. 110; Sudono Jusuf, *Sejarah Perkembangan Angkatan Laut*, Dep. Hankam Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971. hal. 13.

112. Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hal. 28; Sartono Kartodirdjo et.al. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Dep. P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, 1977. hal. 155.
113. Sartono Kartodirdjo, et. al. *ibid.*, hal. 5–6.
114. *Ibid.*, hal. 155.
115. *Ibid.*, hal. 163.
116. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 29–30.
117. Harry J. Benda, *The Crescent And The Rising Sun*, W. van Hoeve Ltd – The Hague And Bandung, New York, 1958. hal 122–124; Nugroho Notosusanto. *ibid.* hal. 23–124; Biro Pemuda Dep. P dan K. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965. hal. 103–121.
118. Nugroho Notosusanto, *ibid.* hal. 117–119; Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Cet. III, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1964. hal. 21–34.
119. Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hal. 13.
120. Harry J. Benda. *op.cit.*, hal. 112.
121. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, "Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila Dalam Masa Penjajahan/ Pendudukan Jepang", Canti Aji Pancasila, *Laboratorium Pancasila, IKIP Malang*. 1972. hal. 64–65.
rium Pancasila, IKIP Malang. 1972. hal. 64–65.
122. GEorge Mc. Turnan Ka
122. George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York, sixth printing, 1963. hal. 105–116.
123. *Ibid.*, hal. 107; Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 165.
124. Harry J. Benda, *op.cit.*, hal. 153–167.
125. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 46–47; Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1972. hal. 2–5.

126. George Mc. Turnan Kahin, *op.cit.*, hal. 113.
127. *Ibid.*, hal. 114.
128. Harry J. Benda. *op.cit.*, hal. 138–156.
129. *Ibid.*
130. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 67; Harry J. Benda. *op.cit.*, hal. 140–141.
131. Nugroho Notosusanto, *Ibid.*, hal. 71.
132. Drs. O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962, hal. 167.
133. Nugroho Notosusanto. *op.cit.*, hal. 88–92; *ibid.*
134. Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hal. 95–99–100–101.
135. Soejono, *Kisah Singkat Peristiwa Pemberontakan Peta Blitar* Perwakilan Bekas Anggota Peta Blitar, Jakarta, 1958. hal. 1.
136. Sartono Kartodirdjo. et.al. *op.cit.* hal. 113; Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 106.
137. Nugroho Notosusanto, *The Revolt Against The Japanese of A Peta-Battalion In Blitar*, Dep. pf Defence and Security Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1974. hal. 10.
138. *Ibid.*, hal. 15–16.
139. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, Th. 1979. hal. 119.
140. S. Talbi, *Sejarah Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, Naskah Dokumentasi DHD. Angkatan 45 Jawa Timur. hal. 11.
141. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, Th. 1979. hal. 121.
142. S. Talbi. *op.cit.*, hal. 12.
143. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, Th. 1979, hal. 121.
144. S. Talbi, *op.cit.*, hal. 11–12.
145. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural java*, Institute of South East Asian Studies Oxford University Press PT. Indira, London-New York-Melbourne, 1973, hal. 190.

146. Sartono Kartodirdjo, "Mitos Ratu Adil dan Aspirasi Petani" Majalah: *PRISMA*, LP3ES, No. 1 Th. VI, Jakarta, Januari 1977. hal. 42—44.
147. Soejono, *op.cit.*, hal. 4; S. Talbi, *op.cit.*, hal. 12.
148. Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, 1979, hal. 121.
149. Soejono, *op.cit.*, hal. 3; S. Talbi *loc.cit.*
150. Soejono, *ibid.*
151. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *op.cit.*, hal. 65—67; Bernhard Dahm, *History of Indonesia in Twentieth Century*, Pall Mall Press, London, 1971, hal. 95—97.
152. Soejono, *op.cit.*, hal. 4.
153. Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, Th. 1974. hal. 15.
154. *Ibid.*, hal. 16—18.
155. Soejono, *op.cit.*, hal. 4—5.
156. S. Talbi. *op.cit.*, hal. 16.
157. *Ibid.*
158. *Ibid.*, hal. 17; Soejono, *op.cit.*, hal. 5.
159. *Ibid.*, hal. 18; *ibid.*
160. Nugroho Notokusanto. *op.cit.*, Th. 1979, hal. 122.
161. S. Talbi, *loc.cit.*; Soejono. *op.cit.*, hal. 6.
162. Nugroho Notokusanto, *loc. cit.*
163. *Ibid.*; Soejono, *loc.cit.*; S. Talbi, *loc.cit.*
164. *Soejono*,
164. Soejono, *ibid.*
165. Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, Th. 1974. hal. 17—18.
166. Soejono, *op.cit.*, hal. 8.
167. Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, Th. 1974, hal. 19—20; S. Talbi. *op.cit.*, hal. 19.
168. Soejono, *op.cit.*, hal. 7; Nugroho Notokusanto, *ibid.*, hal. 9.
169. Soejono, *ibid.*
170. Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, Th. 1974. hal. 9—18.
171. Soejono, *loc.cit.*

172. S. Talbi, *op.cit.*, hal. 20–21; Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, Th. 1974. hal. 11.
173. S. Talbi, *ibid.*, hal. 21–22; Soejono. *loc.cit.*
174. Nugroho Notosusanto. *loc.cit.*
175. *Ibid.*, hal. 11–18–19.
176. *Ibid.*, hal. 21.
177. *Ibid.*
178. *Ibid.*, hal. 20.
179. *Ibid.*, hal. 22.
180. Soejono. *op.cit.*, hal. 8–9.
181. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 23 (Th. 1974).
182. *Ibid.*
183. *Ibid.*, hal. 24; Soejono, *op.cit.*, hal. 9.
184. Nugroho Notosusanto, *ibid.*
185. Soejono, *loc.cit.*
186. Biro Pemuda Departemen PD dan K, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965. hal. 118.
187. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, Th. 1979. hal. 109.
188. S. Talbi, *op.cit.*, hal. 12.
189. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, Th. 1977, hal. 225.
190. Kodim 0808, *Sejarah Kodim 0808*, tanpa tahun. hal. 24.
191. Sartono Kartodirdjo, et.al. *Sejarah Nasional Indonesia, jilid IV*. Dep. P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 225. Th. 1977.
192. Soejono, *op.cit.*, hal. 7.
193. Sartono Kartodirdjo, et.al. *op.cit.*, jilid IV. Th. 1977. hal. 225.
194. Soejono, *op.cit.*, hal. 9–10.
195. *Ibid.*, hal. 10–12.
196. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, Th. 1979. hal. 125.
197. *Ibid.*, hal. 125–126; Soejono, *op.cit.* hal. 10–11.

198. Dewan Harian Nasional Angkatan 1945, Gema Angkatan '45, No. 15, Jakarta, Januari 1977. hal. 8–9.
199. Siidik Kertopati, *op.cit.*, hal. 56–57.
200. *Ibid.*, hal. 40.
201. Dewan Harian Nasional Angkatan '45, Gema Angkatan '45, No. 31, Jakarta,, Juli–Agustus 1978. hal. 34–35.
-

DAFTAR SUMBER

Prof. Dr. Abu Hanifah MD. *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu Dan Sekarang*, Yayasan Idayu, Jakarta. Th. 1978.

Abdurrachman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa Dan Masalah Historiografi*, Idayu, Jakarta, Th. 1979.

Ali, R. Moh. *Perjuangan Feodal Indonesia*, Ganaco, Bandung—Jakarta, 1963.

Amelz, HUS Cokroaminoto, *Hidup Dan Perjuangannya*, jilid I Bulan Bintang, Jakarta, 1952.

Amir Hamsah Wirjosukarto, *Pembaruan Pendidikan Dan Pengajaran Islam*, UP. Ken Mutia, cet. ke 3, 1968.

Drs. Ariwiadi, *Ikhtisar Sejarah Nasional Indonesia*, Dep. Hankam, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta. 1971.

Benda, Harry J. *The Crescent And The Rising Sun*, W. van Hoeve Ltd. The Hague and Bandung, New York, 1958.

Biro Pemuda Dep. P dan K, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1965.

Blumberger, J. Th. Petrus, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*, Haarlem HD. Tjoenk Willink & Soon NV. 1931.

Bung Karno, *Indonesia Menggugat*, Pidato Pembelaan, Sa-songko, Solo, 1978.

Dahm, Bernhard, *History of Indonesia In Twentieth Century*, Pall Mall Press, London, 1971.

Deliar Noor, *Perkembangan Demokrasi Kita*,

Deliar Noor, *The Modern Muslim Movement In Indonesia*, Oxford University Press, Singapore-London and New York, 1973.

Dewan Harian Nasional Angkatan '45, *Gema Angkatan '45*, No. 15, Jakarta, Januari 1977.

Dewan Harian Nasional Angkatan '45, *Gema Angkatan '45*, No. 31, Jakarta, Juli–Agustus 1978.

Drs. Djoko Sukiman. "Perjuangan Untung Surapati", ed, Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Dep. Hankam Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1973.

Graaf; Dr. H.J. *Geschiedenis van Indonesia*, NV. Uitgeverij W. van Hoeve, Gravenhage, Bandung, 1949.

Drs. Heru Sukadri K. *Sejarah Pendidikan Di Jawa Timur*, IDKD. Dep. P dan K, 1980/1981.

Drs. Heru Sukadri K. *Lahirnya Nilai-Nilai Sumpah Pemuda*, Jurusan Sejarah FKIS–IKIP, Surabaya. 1977.

Imam Supardi, *Swargi Dr. Sutomo*, Penerbit Penyebar Semangat, Surabaya, 1959.

Laporan Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur, *Sejarah Daerah*, BPP–IKIP, Surabaya, 1976.

LP3ES, "Demokrasi dan Pemilihan Umum, Mencari Penyambung Lidah", *majalah: PRISMA*, 2 Januari 1977.

LP3ES, "Aspirasi Rakyat Kecil dan Gerakan Sosial Keagamaan", *Majalah: PRISMA*, Januari 1977.

Drs. M. Masykur Amin, *Saham HUS. Cokroaminoto Dalam Kebangunan Islam Dan Nasionalisme Indonesia*, Nur Cahaya, 1980.

Drs. I Nyoman Dekker, *Sejarah Indonesia Baru 1900–1945*, Lembaga Penerbit IKIP, Malang, 1969.

Drs. I Nyoman Dekker, *Sejarah Indonesia Dalam Abad XIX*, Lembaga Penerbit "Almamater", YPTP–IKIP, Malang, 1975.

Kahin, George Mc. Turnan, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca-New York, sixth printing, 1963.

Nugroho Notosusanto, *The Revolt Against The Japanese of A Peta-Battalion in Blitar*, Dep. of Defence and Security Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1974.

Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Idonesia*, PT. Gramedia, 1979.

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, "Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila Dalam Masa Pendudukan Jepang", *Canti Aji Pancasila*, Laboratorium Pancasila, IKIP, Malang, 1972.

Onghokham, "Pulung Affair", majalah: *Ilmu-Ilmu Sastra*, No. 1, Januari, 1977.

Pringgodigdo, A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, 1977.

Dra. Ratnawati Anhar, *Untung Surapati*, Dep. P&K. 1976.

Redaksi SK. Dharmokondo, *Pengajaran dan Pendidikan Kebangsaan*. 1928.

Richard Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI. Jakarta, 1975.

Dr. H. Roeslan Abdoelgani, *On Heroes Day And The Indonesian Revolution*, Prapanca, Jakarta, 1964.

Dr. H. Roeslan Abdoelgani, *Almarhum Dr. Sutomo Yang Saya Kenal*, Yayasan Idayu, 1974.

Dr. H. Roeslan Abdoelgani, *100 Hari Di Surabaya*, Idayu, Jakarta 1975.

Sagimun MD. *Pahlawan Diponegoro Berjuang*, Gunung Agung, Jakarta, 1965.

Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, jilid I, Kem. PP dan K, 1955.

Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia* Dies Natalis ke 18 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1967.

Sartono Kartodirdjo, "Kolonialisme Dan Nasionalisme Di Indonesia Abad XIX-XX", *Lembaran Sejarah*, No. 1, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1967.

Sartono Kartodirdjo, "*Mitos Ratu Adil Dan Aspirasi Petani*", majalah: *PRISMA*, LP3ES, No. 1, Th. VI, Jakarta, Januari 1977.

Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements In Rural Java*, Institute of Southeast Asian Studies, Oxford University Press /PT Indira 1973.

Sartono Kartodirdjo, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid III s/d VI, Dep. P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies*, II, 'gravenhage, 1959.

Selo Sumardjan, "*Peranan Cendekiawan Dalam Pembangunan Nasional*", majalah: *PRISMA*, No. 11, LP3ES, Jakarta, Nopember 1976.

Sidik Kertopati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, cet. III, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1964.

Drs. ODP. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962.

Drs. R. Soeksmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, jilid III, Yayasan Kanisius, cet. III, 1973.

Sojono, *Kisah Singkat Peristiwa Pemberontakan Peta Blitar*, Perwakilan Bekas Anggota Peta Blitar, Jakarta, 1958.

Drs. FA. Soetjipto, "Perang Trunajaya", ed. Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Dep. Hankam Pusat Sejarah ABRI, 1973.

Ir. Sukarno, *Sarinah*, Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Sukarno, cet. III. 1963.

Susanto Tirtoprodjo, SH. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1980.*

Sudono Yusuf, *Sejarah Perkembangan Angkatan Laut*, Dep. Hankam Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.

Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1972.

Dr. FW. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, dell III, NV. Uitgevermaatschappij, "Joost van den Vondel", Amsterdam, 1939.

Stoddard, MA, Ph. D, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, terj. HM. Muljadi Djojomartono, dkk. Panitia Penerbit Menko Kesejahteraan RI. Jakarta, 1966.

Talbi S. *Sejarah Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, Naskah Dokumentasi DHD. Angkatan '45 Jawa Timur.

HUS. Cokroaminoto, *Zelfbesuur*, Pidato pada Kongres Nasional Sarikat Islam I di Bandung, 17 s/d 24 Juli 1916.

Tim Penulis Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur, *Monografi Daerah Jawa Timur*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Dep. P dan K, 1977.

Tolman, J. *Persuit of Millenium, The relation Between Religion And Social Change In AES*, vol. III, 1936.

Van Der Veur, Paul W. Dr. *Sutomo Pandangan Dan Cita-Cita Untuk Bangsaanya*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Air-
langg, 1981.

Winarsih Arifin, *Babad Wilis*, Lembaga Penelitian Perancis Untuk Timur Jauh, 1980.

Wisnoady Wahono, S. "*Mesianis Dalam Perjuangan Petani Tinjauan Dari Sisi Kekristenan*", majalah: PRISMA, LP3ES, Jakarta, Januari 1977.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Jakarta, 1974.

Drs. A. Zainoel Ihsan, dan Pitut Suharto, *Aku Pemuda Kemarin Di Hari Esok*, Jaya Shakti, Jakarta. 1981.

Perpustakaan
Jenderal